



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

# **EVALUASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA**

## **TESIS**



**DELIMA HANUM  
1121202010**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2013**

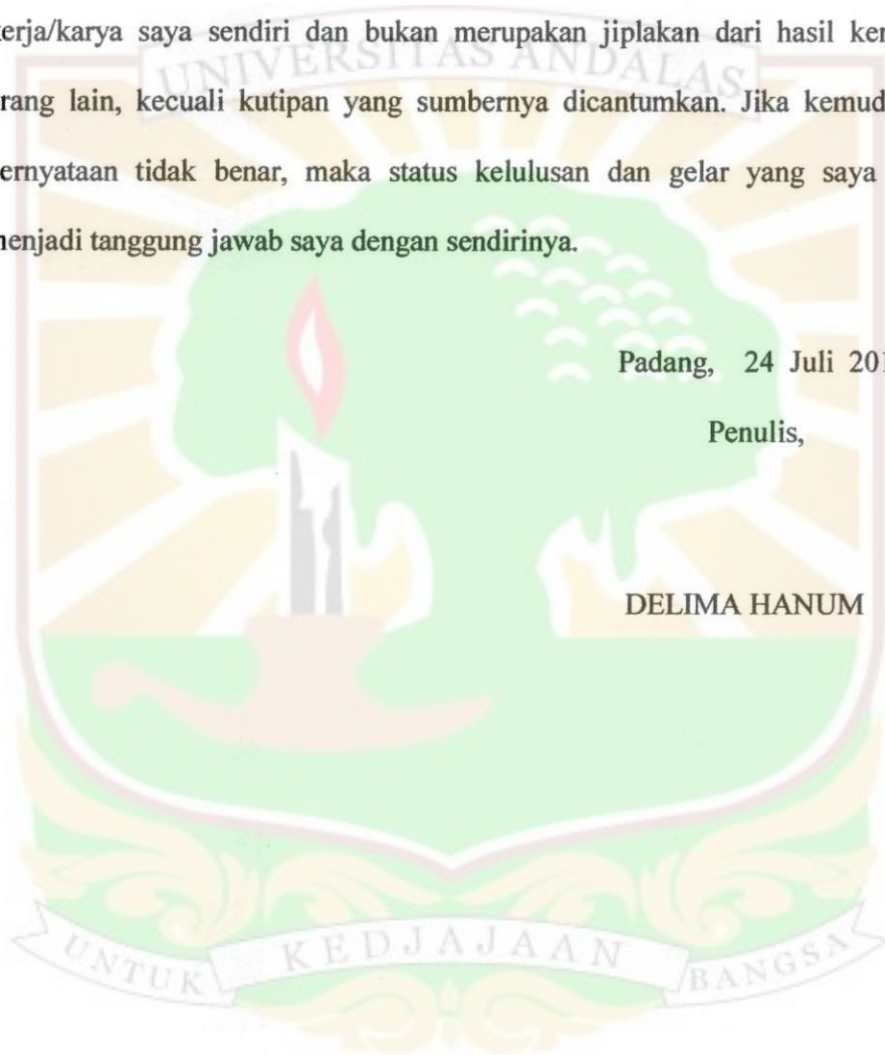
## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi Tesis yang saya tulis dengan judul “ Evaluasi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara”. Adalah hasil kerja/karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil kerja/karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan. Jika kemudian hari pernyataan tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi tanggung jawab saya dengan sendirinya.

Padang, 24 Juli 2013

Penulis,

DELIMA HANUM





**Evaluasi Partisipasi Masyarakat dalam  
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah  
Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara**

Oleh : Delima Hanum

Dibawah bimbingan :  
Dr. Ir. Jafrinur, MSP dan Prof. Dr. Melinda Noer, M.Sc

**RINGKASAN**

Pendekatan baru dalam penataan ruang menuntut pemerintah berperan dalam menggali dan mengembangkan visi secara bersama antara Pemerintah dan kelompok masyarakat di daerah dalam merumuskan struktur ruang, pola ruang dan pengendalian ruang. Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011–2031 telah dilaksanakan pada tahun 2011 yang lalu. Pada proses penyusunan tersebut untuk pertama kalinya telah dilaksanakan dengan menyertakan metode partisipasi masyarakat, yaitu dengan cara melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dan seminar rancangan rencana bersama masyarakat. Meskipun begitu, masih juga dijumpai permasalahan penyimpangan terhadap pemanfaatan rencana tata ruang. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan kajian proses penyusunan rencana umum tata ruang Kabupaten Mandailing Natal dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian lapangan dan metode yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif analisis kualitatif. Data terutama diperoleh dari responden dengan, didasarkan dari kuesioner dan hasil wawancara sebagai data primer, disamping itu juga dilengkapi dengan data sekunder.

Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyusunan rencana tata ruang Kabupaten Mandailing Natal pada prakteknya ternyata terdapat beberapa perbedaan dengan normatifnya. Partisipasi masyarakat didominasi oleh bentuk sumbangan masukan/saran/usul. Faktor yang mendorong partisipasi masyarakat adalah faktor kesadaran dari masing-masing anggota masyarakat dan didukung dengan faktor pendidikan, penghasilan dan peran masyarakat. Peran stakeholder masih didominasi oleh peran pemerintah, sedang peran swasta dan masyarakat relatif kecil.

Dapat disimpulkan bahwa metode partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kabupaten Mandailing Natal, baru merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, karena tuntutan desentralisasi dalam otonomi daerah yang menghendaki pemerintah berperan bersama stakeholder lain dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan tujuan masyarakat yang ingin dicapai dengan partisipasi itu sendiri belum dapat terwujud. Jadi agar tujuan program pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat tercapai dan rencana tata ruang yang dihasilkan dapat digunakan secara penuh sebagai acuan dalam pembangunan, maka perlu diterapkan prinsip transparansi pada setiap tahap dan diadakan perbaikan pada proses pelaksanaan kebijakan pemerintah, sebagaimana konsep ideal yang berlaku secara normatif.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat-Nya Tesis ini dapat terselesaikan. Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Magister Sains Program Studi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Universitas Andalas Padang. Tesis ini berjudul: “Evaluasi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara”.

Pengambilan topik ini didasari pemikiran bahwa di era otonomi daerah, perencanaan program pembangunan termasuk didalamnya perencanaan tata ruang menghendaki adanya partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang, diharapkan akan meningkatkan rasa memiliki masyarakat (sense of belonging) terhadap program pemanfaatan ruang yang sejalan dengan terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam program penataan ruang tersebut.

Dengan selesainya Tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc Sebagai Ketua Program Studi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, Universitas Andalas.
2. Bapak Dr. Ir. Jafrinur, MSP Sebagai Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, memberikan bimbingan dan arahan.
3. Ibu Prof. Dr. Ir. Melinda Noer, M.Sc Sebagai Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, memberikan bimbingan dan arahan.
4. Bapak Prof. Dr. Asdi Agustar, M.Sc Sebagai Penguji yang telah menyediakan waktu, memberikan masukan yang sangat berarti bagi Penyempurnaan Tesis.
5. Bapak Dr. Ir. Osmet, M.Sc Sebagai Penguji yang telah menyediakan waktu, memberikan masukan yang sangat berarti bagi Penyempurnaan Tesis.
6. Bapak/Ibu Dosen di Program Studi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, Universitas Andalas, yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, atas pengajaran dan bimbingan yang telah diberikan selama mengikuti perkuliahan.

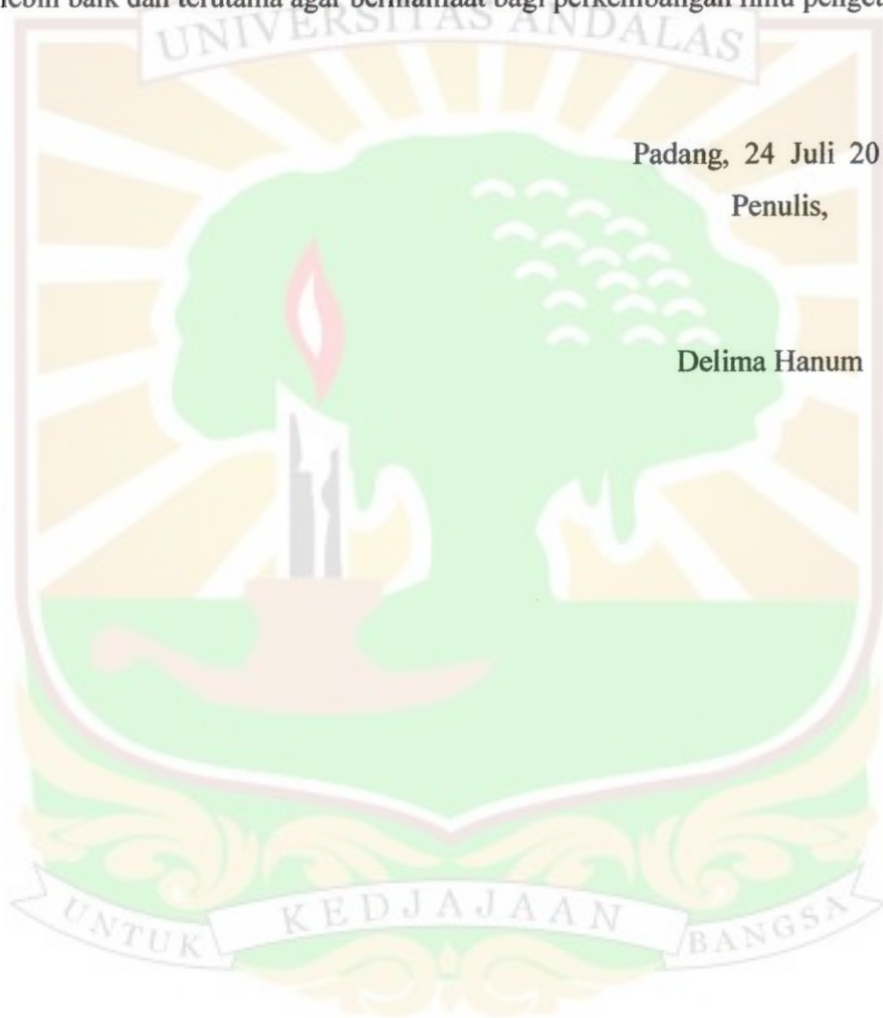
7. Bapak/Ibu Staf Administrasi Sekolah Pascasarjana Program Studi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, Universitas Andalas, yang telah memberi dukungan dan bantuan.
8. Rekan-rekan Stambuk 2011 di Sekolah Pascasarjana Program Studi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Universitas Andalas.

Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri bagi saran-saran agar Tesis ini menjadi lebih baik dan terutama agar bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Padang, 24 Juli 2013

Penulis,

Delima Hanum



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **DELIMA HANUM**  
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Sidempuan / 25 September 1977  
Alamat : Jl. Sukaramai Aek Galoga No. 46 B  
Pekerjaan : PNS  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Warga Negara : Indonesia  
Nama Orang Tua Laki-laki : Ir. H Muhammad Yamin, MAP  
Nama Orang Tua Perempuan : Hj. Yusmiati

### PENDIDIKAN FORMAL

SD Negeri No. 067241 Medan Denai : Lulus Tahun 1990  
SMP Negeri 1 Padang Sidempuan : Lulus Tahun 1993  
SMA Negeri 8 Medan : Lulus Tahun 1996  
Universitas Syiah Kuala : Lulus Tahun 2001

### PENGALAMAN KERJA

- 2002 s/d sekarang bertugas di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
LEMBAR PERNYATAAN .....	ii
RINGKASAN .....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1. Partisipasi Masyarakat .....	11
2.1.1 Pengertian Partisipasi .....	11
2.1.2. Pentingnya Partisipasi Masyarakat .....	12
2.1.3. Fungsi dan Manfaat Partisipasi Masyarakat .....	15
2.1.4. Tipe-tipe Partisipasi Masyarakat .....	18
2.1.5. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat .....	19
2.1.6. Faktor-faktor Yang Mendorong Partisipasi Masyarakat.....	20
2.2. Tingkatan Partisipasi Masyarakat .....	23
2.3. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan RTRW Kabupaten .....	27
2.4. Proses Penyusunan RTRW Kabupaten .....	29
2.4.1. Prosedur Penyusunan RTRW Kabupaten .....	36



2.5. Muatan RTRW Kabupaten .....	39
2.5.1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten .....	39
2.5.2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten .....	41
2.5.3. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten .....	42
2.5.4. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten .....	43
2.5.5. Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten ...	44
2.5.6. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten .....	45
2.5.7. Masa Berlaku RTRW Kabupaten .....	47
2.6. Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah .....	47
2.7. Definisi Operasional .....	49
2.8. Kerangka Penelitian .....	53
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
3.1. Kerangka Analisis.....	54
3.2. Waktu dan Tempat .....	54
3.3. Fokus Kajian .....	55
3.4. Metode Pengumpulan Data .....	56
3.5. Analisis Data .....	57
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI.....</b>	<b>58</b>
4.1. Aspek Fisik Wilayah .....	58
4.1.1. Kondisi Geografis .....	58
4.1.2. Iklim .....	60
4.1.3. Penggunaan Lahan .....	62
4.2. Aspek Kependudukan .....	64
4.2.1. Jumlah Penduduk .....	64
4.2.2. Jenis Pekerjaan .....	67
4.3. Aspek Sosial .....	69
4.3.1. Pendidikan .....	69
4.3.2. Kesehatan .....	70
4.3.3. Agama .....	70

<b>BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>71</b>
5.1. Proses Penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal	71
5.1.1. Persiapan Penyusunan .....	71
5.1.2. Pengumpulan Data dan Informasi.....	72
5.1.3. Pengolahan dan Analisis Data .....	73
5.1.4. Perumusan Konsepsi RTRW Kabupaten Mandailing Natal .....	73
5.1.5. Penyusunan Raperda RTRW Kabupaten Mandailing Natal .....	80
5.1.6. Penetapan RTRW Kabupaten Mandailing Natal .	80
5.1.7. Kesimpulan Proses Penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal .....	82
5.2. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal .....	87
5.2.1. Partisipasi Masyarakat Dalam Persiapan Penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal .....	88
5.2.2. Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Mandailing Natal .....	89
5.2.3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengidentifikasian Potensi dan Masalah Pembangunan Wilayah Kabupaten Mandailing Natal .....	95
5.2.4. Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Konsepsi Rencana Tata Ruang Kabupaten Mandailing Natal .....	98
5.2.5. Partisipasi Masyarakat Dalam Penetapan Rencana Tata Ruang Kabupaten Mandailing Natal .....	100
5.2.6. Kesimpulan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal	102

<b>BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>106</b>
6.1. Kesimpulan .....	106
6.2. Saran .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>
<b>LAMPIRAN</b>	





## DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
3.1. Fokus Kajian Evaluasi Keikutsertaan Masyarakat Dalam Penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal .....	55
3.2. Data Responden .....	57
4.1. Administrasi Wilayah Kabupaten Mandailing Natal .....	59
4.2. Luas Kabupaten Mandailing Natal Menurut Penggunaan Lahan .....	62
4.3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin perKecamatan Kabupaten Mandailing Natal .....	66
4.4. Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Mandailing Natal .....	67
4.5. Jenis Mata Pencanharian Penduduk Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2012 .....	68
5.1. Proses Penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal .....	83
5.2. Partisipasi Masyarakat Dalam Persiapan Penyusunan RTRW KabupatenMandailing Natal .....	89
5.3. Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Mandailing Natal .....	94
5.4. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengidentifikasian Potensi dan Masalah Wilayah Kabupaten Mandailing Natal .....	97
5.5. Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Konsepsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal .....	99
5.6. Partisipasi Masyarakat Dalam Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal .....	101
5.7. Kesimpulan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal .....	103

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
4.1. Peta RTRW Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2031 .....	60
5.1. Proses Penyusunan RTRW Kabupaten .....	85
5.2. Jangka Waktu Penyusunan RTRW Kabupaten .....	86



## DAFTAR LAMPIRAN

### Nomor

1. Kuesioner Untuk Masyarakat
2. Pedoman Wawancara Untuk Bappeda, PU, Perguruan Tinggi dan Camat
3. Surat Kementerian PU No. HK.01 03-Dr/1004 Tanggal 30 Desember 2011  
Perihal Substansi Atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten  
Mandailing Natal Tentang RTRW Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-  
2031
4. Surat Undangan Konsultasi Publik Ranperda RTRW Kabupaten Mandailing  
Natal Tahun 2011-2031
5. Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 050/418/K/2011 Tentang  
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Mandailing Natal  
Tahun 2011-2031
6. Nota Kesepakatan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal  
dengan Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman  
Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan
7. Foto Dokumentasi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah (termasuk perencanaan pergerakan di dalam ruang wilayah) dan perencanaan kegiatan pada ruang wilayah tersebut. Perencanaan penggunaan ruang wilayah diatur dalam bentuk perencanaan tata ruang wilayah, sedangkan perencanaan kegiatan dalam wilayah diatur dalam perencanaan pembangunan wilayah. Kedua bentuk perencanaan ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan bersifat saling mengisi antara yang satu dengan lainnya. Tata ruang wilayah merupakan landasan dan sekaligus juga sasaran dari perencanaan pembangunan wilayah. Tujuan perencanaan wilayah adalah menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, serta lestari dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh pihak pemerintah ataupun oleh pihak swasta (Tarigan, 2005).

Perencanaan tata ruang wilayah adalah suatu proses yang melibatkan banyak pihak dengan tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan terjaminnya kehidupan yang berkesinambungan. Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga seluruh masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan tersebut. Setiap rencana tata ruang harus mengemukakan kebijakan makro pemanfaatan ruang berupa :

1. Tujuan pemanfaatan ruang,

2. Struktur dan pola pemanfaatan ruang, dan
3. Pola pengendalian pemanfaatan ruang.

Tujuan penataan ruang adalah menciptakan hubungan yang serasi antara berbagai kegiatan di berbagai subwilayah agar tercipta hubungan yang harmonis dan serasi. Dengan demikian, hal itu mempercepat proses tercapainya kemakmuran dan terjaminnya kelestarian lingkungan hidup. Struktur ruang menggambarkan pola pemanfaatan ruang dan kaitan antara berbagai ruang berdasarkan pemanfaatannya serta hierarki dari pusat permukiman dan pusat pelayanan. Pola pemanfaatan ruang adalah tergambarkannya pemanfaatan ruang secara menyeluruh. Pola pengendalian pemanfaatan ruang adalah kebijakan dan strategi yang perlu di tempuh agar rencana pemanfaatan ruang dapat dikendalikan menuju sasaran yang diinginkan. Pada level kabupaten atau kota, pengendalian sudah berupa ketentuan arahan untuk setiap kawasan beserta cara monitoring dan pengawasannya (Tarigan, 2005).

Perdesaan merupakan suatu bagian wilayah yang tidak berdiri sendiri. Suatu wilayah bisa disebut perdesaan karena mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan perkotaan. Suatu kawasan yang aktifitas utamanya atau aktifitas ekonomi penduduknya bersandar pada pengelolaan sumberdaya alam setempat atau pertanian dinamakan dengan kawasan perdesaan.

Kawasan perdesaan merupakan desa yang mempunyai potensi cepat berkembang dan dapat meningkatkan perkembangan desa di sekitarnya. Dengan demikian, pemanfaatan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk melayani perkembangan berbagai kegiatan usaha dan atau kegiatan ekonomi, dan



permukiman masyarakat perdesaan baik di desa tersebut maupun desa di sekitarnya.

Dalam Pengembangan wilayah, kawasan perdesaan harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan perkotaan, agar terjadi sinergi dan keseimbangan perlakuan wilayah, khususnya oleh pelaku pembangunan. Selama ini masyarakat perdesaan dicirikan dengan kondisi yang serba kurang apabila dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Dari segi ekonomi, jelas terbukti bahwa masyarakat kota lebih mempunyai taraf kehidupan jauh diatas masyarakat perdesaan. Dari segi pendidikan, jumlah serta kualitas pendidikan masyarakat desa jauh di bawah masyarakat perkotaan.

Sehubungan dengan latar belakang yang demikian, perlu di pelajari Tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan yaitu :

1. Mengatur pemanfaatan ruang kawasan perdesaan guna meningkatkan kemakmuran rakyat dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan buatan dan lingkungan sosial.
2. Meningkatkan fungsi kawasan perdesaan secara serasi, selaras dan seimbang antara perkembangan lingkungan dan tata kehidupan masyarakat.
3. Mencapai tata ruang perdesaan yang optimal, serasi, selaras dan seimbang dalam pengembangan kehidupan manusia.
4. Mendorong dinamika kegiatan pembangunan di perdesaan sehingga dicapai kehidupan perdesaan yang berkeadilan serta menunjang pelestarian budaya.

5. Menciptakan keterkaitan fungsional antara kawasan perdesaan dan perkotaan.
6. Mengendalikan konservasi pemanfaatan ruang berskala besar.
7. Mencegah kerusakan lingkungan.
8. Meningkatkan pemanfaatan SDA dan SDB secara tepat.
9. Mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur.
10. Meningkatkan perekonomian masyarakat kawasan perdesaan

Sedangkan penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk :

1. Pemberdayaan masyarakat perdesaan.
2. Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya.
3. Konservasi sumber daya alam.
4. Pelestarian budaya lokal.
5. Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan.
6. Penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan perkotaan (www. Penataan ruang kawasan perdesaan.com diunduh tanggal 15 Februari 2013).

Proses penyusunan RTRW dalam partisipasi masyarakat sudah pernah diteliti sebelumnya (Suciati, 2006), dengan mengakomodasi kepentingan pembangunan wilayah dalam desentralisasi. Dimana dalam era otonomi sekarang ini diperlukan perubahan pola pikir pendekatan penataan ruang. Pola pikir pendekatan penataan ruang yang memandang masyarakat sebagai objek peraturan yang homogen, perlu diubah dengan memandang masyarakat sebagai subjek



peraturan dengan keanekaragaman perilaku. Pendekatan baru dalam penataan ruang ini menuntut pemerintah berperan dalam menggali dan mengembangkan visi secara bersama antar pemerintah dan kelompok masyarakat di daerah dalam merumuskan wajah ruang dimasa depan, standar kualitas ruang, dan aktivitas yang diinginkan atau dilarang pada suatu kawasan yang direncanakan (Haeruman, 2004).

Menurut Santosa dan Heroepoetri (2005), dalam konteks penataan ruang ada dua jenis kebutuhan yang mendasari partisipasi masyarakat yaitu kebutuhan fungsi kontrol dan kebutuhan informasi data sosial. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang menjadi penting dalam kerangka menjadikan sebuah perencanaan tata ruang sebagai hal yang responsif. Untuk mencapai perencanaan yang responsif, maka keterlibatan masyarakat harus dilakukan sejak awal proses perencanaan itu sendiri yaitu sejak tahap identifikasi permasalahan, aspirasi serta kebutuhan sampai dengan tahap pelaksanaan rencana tata ruang.

Partisipasi masyarakat dalam sistem penataan ruang diperlukan karena : (1) pada tahap perencanaan, masyarakat paling tahu apa yang mereka butuhkan, dengan demikian mengarahkan pada produk rencana tata ruang yang optimal dan proporsional untuk berbagai kegiatan, sehingga terhindar dari spekulasi dan distribusi alokasi ruang yang berlebihan untuk kegiatan tertentu; (2) pada tahap pemanfaatan, masyarakat akan menjaga pendayagunaan ruang yang sesuai dengan peruntukan dan alokasi serta waktu yang direncanakan, sehingga terhindar dari konflik pemanfaatan ruang; (3) pada tahap pengendalian, masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab dalam menjaga kualitas ruang yang nyaman dan serasi serta berguna untuk kelanjutan pembangunan (Ibrahim, 2004).

Hak Masyarakat dalam penataan ruang wilayah sesuai yang tertera pada pasal 60 Undang-Undang Penataan Ruang No 26 Tahun 2007, dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

1. Mengetahui rencana tata ruang.
2. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.
3. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
4. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya.
5. Mengajukan tuntutan pembatalan ijin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang.
6. Mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah dan/atau pemegang ijin apabila suatu kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian.

Kewajiban Masyarakat Pada Pasal 61 Undang-Undang Penataan Ruang No 26 Tahun 2007, setiap orang wajib untuk:

1. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
2. Memanfaatkan ruang sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang.
3. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan ijin pemanfaatan ruang.
4. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang- undangan dinyatakan sebagai milik umum.



Selain memiliki hak dan kewajiban, setiap orang yang melanggar rencana berhak menerima segala sanksi berupa sanksi administratif yang meliputi:

1. Peringatan tertulis.
2. Penghentian sementara kegiatan.
3. Penghentian sementara pelayanan umum.
4. Penutupan lokasi.
5. Pencabutan ijin.
6. Pembatalan ijin.
7. Pembongkaran bangunan.
8. Pemulihan fungsi ruang.
9. Denda administratif.

Peran masyarakat, sesuai pasal 65 Undang-undang Penataan Ruang No. 26

Tahun 2007 yaitu:

1. Partisipasi dalam penyusunan perencanaan tata ruang.
2. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang.
3. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Dengan dikeluarkannya Undang – Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau RTRW Kabupaten Mandailing Natal yang aman, nyaman, produktif, dan

berkelanjutan, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki kabupaten dengan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. RTRW Kabupaten menjadi pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang Kabupaten Mandailing Natal untuk 20 tahun ke depan, serta penyelaras penataan ruang dengan wilayah kabupaten yang berbatasan, lintas kecamatan dan lintas ekosistem.

Kabupaten Mandailing Natal memiliki masalah berkaitan dengan penataan ruang, yaitu terjadinya penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang karena kepentingan ekonomi, yaitu perkembangan kawasan yang tidak sesuai dengan fungsi peruntukannya seperti kawasan permukiman diluar kawasan yang telah direncanakan dalam tata ruang. Untuk mengurangi dan mencegah agar penyimpangan pemanfaatan ruang tidak semakin besar, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang pada masa yang akan datang. Karena dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam penyusunannya, diharapkan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi sehingga ikut menentukan arah pengembangan wilayah dan tumbuh kesadaran masyarakat untuk mematuhi rencana yang telah ikut disusunnya.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis ingin melakukan suatu kajian untuk mengetahui proses penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mandailing Natal dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mandailing Natal, sehingga diharapkan akan diperoleh suatu kesimpulan dan saran yang dapat digunakan sebagai arah kebijakan peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan tata ruang di Kabupaten Mandailing Natal pada masa mendatang. Maka penulis mencoba untuk

mengangkat permasalahan ini dilakukan penelitian dengan judul :” *Evaluasi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara*”.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan permasalahan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah proses penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mendeskripsikan proses penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Menganalisis partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mandailing Natal.



#### 1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara akademik :

Menambah referensi tentang penataan ruang khususnya tentang evaluasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang dan substansi penataan ruang.

b. Secara teknis :

Sebagai masukan bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam menyempurnakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Partisipasi Masyarakat**

##### **2.1.1. Pengertian Partisipasi**

Terdapat banyak definisi mengenai partisipasi diantaranya adalah sebagai berikut : Bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, yang berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya (Allport dalam Sastropetro, 1988 ). Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan (Davis dalam Sastropetro, 1988 ).

Partisipasi masyarakat berarti menyiapkan pemerintah dan masyarakat untuk menerima tanggung jawab dan aktifitas tertentu. Dalam hal ini terdapat pendelegasian wewenang dari pemerintah dan masyarakat dalam aktivitas tertentu (Ramos dan Roman dalam Yeung dan Mc. Gee, 1986). Partisipasi masyarakat adalah berbagai kegiatan orang seorang, kelompok atau badan hukum yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak di penyelenggaraan penataan ruang (UU 26/2007).

Partisipasi adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan (Soetrisno, 1995). Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan

masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai subyek dan obyek pembangunan, keterlibatan dalam tahap pembangunan dimulai sejak tahap perencanaan sampai dengan pengawasan berikut segala hak dan tanggung jawab (Kamus Tata Ruang, 1998). Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa yang dimaksud partisipasi masyarakat dalam penataan ruang adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam suatu proses kegiatan penataan ruang, dimulai dari proses penyusunan rencana tata ruang.

### **2.1.2. Pentingnya Partisipasi Masyarakat**

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang penting karena berkaitan langsung dengan hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berfokus pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan (Panudju, 1999).

Menurut Conyers (1994), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek yang gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat



dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa merekapun mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini selaras dengan konsep *man-centred development* (suatu pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan manusia), yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan itu sendiri.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur yang sungguh penting dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan dasar pandang demikian, maka pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, dan pengalaman demokrasi (Kartasasmita, 1996).

Menurut Siahaan (2002), partisipasi masyarakat memiliki keuntungan sosial, politik, *planning* dan keuntungan lainnya, yaitu :

- Dari pandangan sosial, keuntungan utamanya adalah untuk mengaktifkan populasi perkotaan yang cenderung individualistik, tidak punya komitmen dan dalam khusus yang ekstrim teralienasi. Di dalam proses partisipasi ini, secara simultan mempromosikan semangat komunitas dan rasa kerjasama dan keterlibatan.
- Dari segi politik, partisipasi telah mempromosikan *participatory* dibanding demokrasi perwakilan (*representative democracy*) sebagai hak demokrasi dari setiap orang dan dengan demikian publik secara umum, untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi publik juga akan membantu dewan (*consellers*) dan para pembuat keputusan lainnya untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai permintaan-permintaan

dan aspirasi konstituen mereka atau semua pihak yang akan terpengaruh, dan sensitivitas pembuatan keputusan dapat dimaksimalkan jika ditangani secara tepat.

- Dari segi *planning*, partisipasi menyediakan sebuah forum untuk saling tukar gagasan dan prioritas, penilaian akan *public interest* dalam dinamikanya serta diterimanya proposal-proposal perencanaan.
- Keuntungan lain dan *public participation* adalah kemungkinan tercapainya hubungan yang lebih dekat antara warga dengan otoritas kota dan menggantikan perilaku *they/we* menjadi perilaku *us*.

Sementara itu menurut Sanoff (2000), tujuan utama partisipasi adalah (1) untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan desain keputusan; (2) untuk melengkapi masyarakat dengan suatu suara dalam membuat desain keputusan untuk memperbaiki rencana; dan (3) untuk mempromosikan masyarakat dengan membawanya sebagai bagian dari tujuan umum. Dengan partisipasi masyarakat secara efektif bergabung dalam proses pembangunan, lingkungan fisik yang lebih baik, semangat publik yang lebih besar, dan lebih puas hati.

Partisipasi mengandung pengetahuan lebih dari sekedar peran serta. Partisipasi memiliki peran yang lebih aktif dan mengandung unsur kesetaraan dan kedaulatan dari para pelaku partisipasi. Sedangkan peran serta bisa diartikan sebagai pelengkap dan tidak harus kesetaraan.

Menurut Abe (2005), suatu perencanaan yang berbasis prakarsa masyarakat adalah perencanaan yang sepenuhnya mencerminkan kebutuhan konkrit masyarakat dan dalam proses penyusunannya benar-benar melibatkan



masyarakat. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan akan membawa dampak penting yaitu (1) terhindar dari peluang terjadinya manipulasi dan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki masyarakat, (2) memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan. Semakin banyak jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik ; (3) meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

Schubeller (1996) menyatakan, bahwa partisipasi tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan dan menurutnya ada 4 pendekatan strategi partisipasi yaitu :

1. *Community-Based Strategies*

Merupakan bentuk paling dasar dari pembangunan partisipatif

2. *Area- Based Strategies*

Merupakan bentuk umum dari program-program pemerintah

3. *Functionally- Based Strategies*

Merupakan struktur fungsional dari sistem insfrastruktur sebagai kerangka referensi

4. *Process- Based Strategies*

Dimana memerlukan seluruh proses manajemen infrastruktur sebagai kerangka referensi.

### **2.1.3. Fungsi dan Manfaat Partisipasi Masyarakat**

Fungsi dari partisipasi masyarakat dalam Santosa dan Heroepoetri (2005) yaitu sebagai berikut :

- 1) Partisipasi masyarakat sebagai suatu kebijakan
- 2) Partisipasi masyarakat sebagai strategi
- 3) Partisipasi masyarakat sebagai alat komunikasi



- 4) Partisipasi masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa
- 5) Partisipasi masyarakat sebagai terapi

Lebih lanjut Santosa dan Heroepoetri (2005) juga merangkum manfaat dari partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut :

- 1) Menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab

Kesepakatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan publik, akan memaksa orang yang bersangkutan untuk membuka cakrawala pikirannya dan mempertimbangkan kepentingan publik, sehingga orang tersebut tidak semata-mata memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi akan lebih memiliki sifat bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kepentingan bersama.

- 2) Meningkatkan proses belajar

Pengalaman berpartisipasi secara psikologis akan memberikan seseorang kepercayaan yang lebih baik untuk berpartisipasi lebih jauh.

- 3) Mengeliminir perasaan terasing

Karena turut aktifnya berpartisipasi dalam suatu kegiatan, seseorang tidak akan merasa terasing. Karena dengan berpartisipasi akan meningkatkan perasaan dalam seseorang bahwa ia merupakan bagian dari masyarakat.

- 4) Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah

Ketika seseorang langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya, mereka cenderung akan mempunyai kepercayaan dan menerima hasil akhir dari keputusan itu. Jadi, program partisipasi masyarakat menambah legitimasi dan kredibilitas

dari proses perencanaan kebijakan publik. Serta menambah kepercayaan publik atas proses politik yang dijalankan para pengambil keputusan.

5) Menciptakan kesadaran politik

Partisipasi masyarakat pada tingkat lokal, dimana pendidikan nyata dari partisipasi terjadi, seseorang akan belajar demokrasi. Ia mencatat bahwa orang tidaklah belajar membaca atau menulis dengan kata-kata semata, tetapi dengan melakukannya. Jadi, hanya dengan terus berpraktek pemerintahan dalam skala kecil akan membuat masyarakat belajar bagaimana mempraktekannya dalam lingkup yang lebih besar lagi.

6) Keputusan dari hasil partisipasi mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Melalui partisipasi masyarakat distribusi yang lebih adil atas keuntungan pembangunan akan didapat, karena rentang kepentingan yang luas tercakup dalam proses pengambilan keputusan.

7) Menjadi sumber dari informasi yang berguna

Masyarakat sekitar, dalam keadaan tertentu akan menjadi pakar yang baik karena belajar dari pengalaman atau karena pengetahuan yang didapatnya dari kegiatan sehari-hari. Keunikan dari partisipasi adalah masyarakat dapat mewakili pengetahuan lokal yang berharga yang belum tentu dimiliki pakar lainnya, sehingga pengetahuan itu haruslah termuat dalam proses pembuatan keputusan.

8) Merupakan komitmen sistem demokrasi

Program partisipasi masyarakat membuka kemungkinan meningkatnya akses masyarakat kedalam proses pembuatan.

#### 2.1.4. Tipe-tipe Partisipasi Masyarakat

Klasifikasi tipe partisipasi menurut Slamet (1993) yaitu :

1. Penggolongan berdasarkan derajat kesukarelaan, terdiri dari partisipasi bebas dan partisipasi terpaksa.
2. Penggolongan berdasarkan pada cara keterlibatan, terdiri dari partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung.
3. Penggolongan berdasarkan pada keterlibatan di dalam berbagai tahap dalam proses pembangunan terencana, terdiri dari partisipasi lengkap dan partisipasi sebagian.
4. Penggolongan berdasarkan pada tingkatan organisasi, terdiri dari partisipasi yang terorganisasi dan partisipasi yang tidak terorganisasi.
5. Penggolongan berdasarkan pada intensitas dan frekuensi kegiatan, terdiri dari partisipasi intensif dan partisipasi ekstensif.
6. Penggolongan berdasarkan pada lingkup liputan kegiatan, terdiri dari partisipasi tak terbatas dan partisipasi terbatas.
7. Penggolongan berdasarkan pada efektivitas, terdiri dari partisipasi efektif dan partisipasi tidak efektif.
8. Penggolongan berdasarkan pada siapa yang terlibat.

Orang-orang yang dapat berpartisipasi dibedakan sebagai berikut :

- a. Anggota masyarakat setempat
  - Penduduk setempat
  - Pemimpin setempat



#### Pegawai Pemerintah

- Penduduk dalam masyarakat
- Bukan penduduk

#### b. Orang-orang luar

- Penduduk dalam masyarakat
- Bukan penduduk

#### c. Wakil-wakil masyarakat yang terpilih

### 9. Penggolongan berdasarkan gaya partisipasi

Dibedakan menjadi 3 model peraktek organisasi masyarakat yaitu :

- a. Pembangunan lokalitas
- b. Perencanaan sosial
- c. Aksi sosial

#### 2.1.5. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut Sastropetro (1988), bentuk-bentuk partisipasi meliputi : (1) konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa; (2) sumbangan spontan berupa uang dan barang; (3) mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari pihak ketiga; (4) menjadikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh masyarakat; (5) sumbangan dalam bentuk kerja; (6) aksi massa; (7) mengadakan pembangunan di kalangan keluarga; dan (8) membangun proyek masyarakat yang bersifat otonom. Adapun jenis-jenis partisipasinya meliputi : (1) pikiran; (2) tenaga (3) pikiran dan tenaga; (4) keahlian; (5) barang; dan (6) uang.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010

Pasal 6 menyebutkan bahwa bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

- a. Masukan mengenai:
  1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang
  2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan
  3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan
  4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang
  5. Penetapan rencana tata ruang
- b. Kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang

#### **2.1.6. Faktor-Faktor Yang Mendorong Partisipasi Masyarakat**

Menurut Slamet (1993), faktor-faktor internal yang mendorong partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan mata pencaharian. Faktor internal berasal dari individu itu sendiri. Secara teoritis, tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis, yaitu :

##### **1. Jenis kelamin**

Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam pembangunan adalah berbeda. hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat antara pria dan wanita. Perbedaan kedudukan dan derajat ini, akan menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban

antara pria dan wanita menurut Soedarno et. al (1992) dalam Yulianti (2000), bahwa di dalam sistem pelapisan atas dasar seksualitas, golongan pria memiliki sejumlah hak istimewa dibandingkan golongan wanita. Dengan demikian maka kecenderungannya, kelompok pria akan lebih banyak ikut berpartisipasi.

## 2. Usia

Perbedaan usia juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Dalam masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga akan memunculkan golongan tua dan golongan muda, yang berbeda-beda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan Soedarno et. al (1992) dalam Yulianti (2000). Usia berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk berpartisipasi (Slamet). Dalam hal ini golongan tua yang dianggap lebih berpengalaman atau senior, akan lebih banyak memberikan pendapat dan dalam hal menetapkan keputusan.

## 3. Tingkat pendidikan

Demikian pula halnya dengan tingkat pengetahuan. Litwin (1986) dalam Yulianti (2000) mengatakan bahwa, salah satu karakteristik partisipan dalam pembangunan partisipatif adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang usaha-usaha partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pembangunan. Salah satu faktor yang mendorong tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi latar belakang pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan. Faktor pendidikan



dianggap penting karena dengan melalui pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap inovasi.

#### 4. Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan juga mendorong partisipasi masyarakat. Menurut Barros (1993) dalam Yulianti (2000), bahwa penduduk yang lebih kaya kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara penduduk yang berpenghasilan pas-pasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga. Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Tingkat penghasilan ini mempengaruhi kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi. Masyarakat hanya akan bersedia untuk mengerahkan semua kemampuannya apabila hasil yang dicapai akan sesuai dengan keinginan dan prioritas kebutuhan mereka (Turner dalam Panudju, 1999).

#### 5. Mata Pencarian

Mata pencarian ini akan berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mata pencarian dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan karena pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti dan sebagainya.

Sementara itu faktor-faktor eksternal dapat dikatakan sebagai petaruh (*Stakeholder*), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program (Sunarti, 2003). Adapun faktor-faktor eksternal dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kabupaten Mandailing Natal ini adalah : pemerintah, konsultan perencanaan, dan swasta (LSM).

## 2.2. Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Menurut Sherry Arnstein (1969) pada makalahnya yang termuat dengan judul “A Ladder of Citizen Participation”, bahwa terdapat 8 tangga/tingkatan partisipasi berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan, sebagaimana berikut ini, yaitu :

### 1. *Manipulation* (Manipulasi)

Tingkatan partisipasi ini adalah yang paling rendah, yang memposisikan masyarakat hanya dipakai sebagai pihak yang memberikan persetujuan dalam berbagai badan penasehat. Dalam hal ini tidak ada partisipasi masyarakat yang sebenarnya dan tulus, tetapi diselewengkan dan dipakai sebagai alat publikasi dari pihak penguasa.

### 2. *Theraphy* (Terapi/penyembuhan)

Dengan berkedok melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, para ahli memperlakukan anggota masyarakat seperti proses penyembuhan pasien dalam terapi. Meskipun masyarakat terlibat dalam kegiatan, pada kenyataannya kegiatan tersebut lebih banyak untuk mendapatkan masukan dari masyarakat demi kepentingan pemerintah.



### 3. *Informing* (Infomasi)

Memberikan informasi pada masyarakat tentang hak-hak mereka, tanggung jawab dan berbagai pilihan, dapat menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat. Meskipun yang sering terjadi adalah pemberian informasi satu arah dari pihak pemegang kekuasaan kepada masyarakat, tanpa adanya kemungkinan untuk memberikan umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Dalam situasi saat itu terutama informasi diberikan pada akhir perencanaan, masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana.

### 4. *Consultation* (Konsultasi)

Mengundang opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada mereka, dapat merupakan langkah penting dalam menuju partisipasi penuh dari masyarakat. Meskipun telah terjadi dialog dua arah, akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang sering digunakan adalah survei, pertemuan lingkungan masyarakat, dan dengar pendapat dengan masyarakat.

### 5. *Placation* (Penentrman/perujukan)

Pada tingkatan ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Dalam pelaksanaanya beberapa anggota masyarakat dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam badan-badan kerjasama pengembangan kelompok masyarakat yang anggota-



anggotanya wakil dari berbagai instansi pemerintah. Walaupun usulan dari masyarakat diperhatikan sesuai dengan kebutuhannya, namun suara masyarakat sering kali tidak didengar karena kedudukannya relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit dibanding anggota instansi pemerintah.

6. *Partnership* (Kerjasama)

Pada tingkatan ini, atas kesepakatan bersama kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan. Dalam hal ini disepakati bersama untuk saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan dan pembuatan keputusan serta pemecahan berbagai masalah. Telah ada kesamaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat.

7. *Delegated power* (Pelimpahan Kekuasaan)

Pada tingkatan ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk memberikan keputusan dominan pada rencana atau program tertentu. Untuk memecahkan perbedaan yang muncul, pemilik kekuasaan harus mengadakan tawar-menawar dengan masyarakat dan tidak dapat memberikan tekanan-tekanan dari atas. Jadi masyarakat diberi wewenang untuk membuat keputusan rencana dan rencana tersebut kemudian ditetapkan oleh pemerintah.

8. *Citizen Control* (Control Masyarakat)

Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Mereka mempunyai kewenangan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Dalam hal ini usaha

bersama warga dapat langsung berhubungan dengan sumber-sumber dana untuk mendapat bantuan atau pinjaman tanpa melalui pihak ketiga. Jadi masyarakat memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program yang dibuatnya.

Pada tingkatan 1 dan 2 disimpulkan sebagai tingkat yang bukan partisipasi atau non participation. Tingkatan 3, 4, dan 5 disebut tingkatan penghargaan/tokenisme atau Degree of Tokenism. Dan tingkatan 6, 7, 8 disebut tingkatan kekuatan masyarakat atau Degree of Citizen Power.

Sedangkan menurut Goethert (1998) dalam Imparato dan Ruster (2003) membagi 5 tingkat partisipasi yaitu :

1. None, artinya outsider semata-mata bertanggung jawab pada semua pihak, dengan tanpa keterlibatan masyarakat.
2. Information or Indirect, sama dengan tidak ada partisipasi tetapi informasi merupakan sesuatu yang spesifik.
3. Consultation, outsider mendasarkan atas informasi dengan tidak langsung diperoleh dari masyarakat.
4. Shared Control, masyarakat dan outsider berinteraksi sejauh mungkin secara bersamaan.
5. Full Control, Masyarakat mendominasi dan outsider membantu ketika diperlukan

Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan mengukur tingkat partisipasi individu atau keterlibatan individu dalam kegiatan bersama-sama yang dapat diukur dengan skala yang dikemukakan oleh Chapin (dalam Slamet, 1993), yaitu :

- a. Keanggotaan dalam organisasi
- b. Kehadiran di dalam pertemuan
- c. Sumbangan-sumbangan
- d. Keanggotaan di dalam kepengurusan
- e. Kedudukan anggota di dalam kepengurusan

Sementara Goldhamer (dalam Slamet, 1993) mengukur tingkat partisipasi masyarakat dengan menggunakan lima variabel yaitu :

- a. Jumlah asosiasi yang dimasuki
- b. Frekuensi kehadiran
- c. Jumlah asosiasi dimana dia memegang jabatan
- d. Lamanya menjadi anggota
- e. Tipe asosiasi yang dimasuki

### **2.3. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan RTRW Kabupaten**

Perencanaan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu proyek pembangunan. Permasalahannya terkadang perencanaan pembangunan yang telah disusun tidak dapat diimplementasikan dengan efektif, sehingga pembangunan tidak bisa berjalan lancar, atau bisa berjalan tetapi tidak mencapai target-target yang telah ditentukan dalam perencanaan. Maka dalam proses perencanaan pembangunan, sangat diperlukan partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan, rencana, dan program - program pembangunan.

Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan cara ( Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010):



- a. Menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan
- b. Kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting agar mereka bukan hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek. Dengan demikian segala yang dilaksanakan dan dihasilkan dapat mereka hasilkan manfaatnya. Disamping itu pembangunan tidak akan mencapai hasil yang optimal dan keberhasilan yang dicapainya tidak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata tanpa partisipasi aktif mereka.

Dalam perencanaan pembangunan di daerah, kualitas perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh sejauhmana perencanaan pembangunan tersebut mampu melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pembangunan merupakan tingkatan yang paling tinggi bila diukur dari derajat keterlibatan masyarakat. Slamet (1993) menyatakan bahwa dalam tahap perencanaan pembangunan, masyarakat sekaligus diajak turut membuat keputusan yang mencakup perumusan tujuan, maksud dan target program pembangunan.

Peran serta masyarakat dalam penataan ruang menjadi hal yang sangat penting dalam rangka menciptakan wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan dibangun berdasarkan kearifan lokal yang mengutamakan kepentingan masyarakat.

Berdasar hal tersebut diatas, maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Menempatkan posisi masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai pelaku pembangunan wilayah dengan difasilitasi oleh pemerintah.
2. Meningkatkan upaya-upaya untuk mendorong *public awarness, public services, dan public campaign* (<http://aisitimunawaroh.blogspot.com/2012/05/prosedur-penyusunan-rencana-tata-ruang.html>. diunduh tanggal 7 Maret 2013).

#### **2.4. Proses Penyusunan RTRW Kabupaten**

Proses penyusunan RTRW kabupaten disyaratkan berlandaskan atas asas: keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan ; keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan serta asas akuntabilitas (Peraturan Menteri PU No. 16/PRT/M/2009).

Proses penyusunan RTRW kabupaten meliputi persiapan penyusunan RTRW kabupaten, pengumpulan data yang dibutuhkan, pengolahan dan analisis data, perumusan konsepsi RTRW kabupaten, serta penyusunan raperda tentang RTRW kabupaten, adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan RTRW Kabupaten

Dalam tahap persiapan ini, dilakukan beberapa kegiatan yang akan menunjang kelancaran penyusunan RTRW Kabupaten, yaitu :



- a. Persiapan awal pelaksanaan, meliputi: pemahaman Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan penyiapan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- b. Kajian awal data sekunder, mencakup *review* RTRW kabupaten sebelumnya dan kajian kebijakan terkait lainnya;
- c. Persiapan teknis pelaksanaan yang meliputi:
  - Penyimpulan data awal.
  - Penyiapan metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan.
  - Penyiapan rencana kerja rinci, dan
  - Penyiapan perangkat survey (*checklist* data yang dibutuhkan, panduan wawancara, kuesioner, panduan observasi dan dokumentasi, dan lain-lain), serta mobilisasi peralatan dan personil yang dibutuhkan.
- d. Pemberitaan kepada publik perihal akan dilakukannya penyusunan RTRW Kabupaten.

## 2. Pengumpulan data.

Untuk keperluan pengenalan karakteristik tata ruang wilayah dan penyusunan rencana tata ruang, dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dapat meliputi:

- a. Penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui penyebaran angket, temu wicara, wawancara orang per-orang, dan lain sebagainya; dan
- b. Pengenalan kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah secara langsung melalui kunjungan ke semua bagian wilayah kabupaten.

Data sekunder yang harus dikumpulkan sekurang-kurangnya meliputi:



a. Peta-peta, meliputi:

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) atau peta topografi skala 1:250.000 sebagai peta dasar;
- Citra satelit untuk memperbaharui peta dasar dan membuat peta tutupan lahan;
- Peta batas wilayah administrasi;
- Peta batas kawasan hutan;
- Peta-peta masukan untuk analisis kebencanaan; dan
- Peta-peta masukan untuk identifikasi potensi sumber daya alam.

b. Data dan Informasi, meliputi:

- Data tentang kependudukan.
- Data tentang sarana dan prasarana wilayah.
- Data tentang pertumbuhan ekonomi wilayah.
- Data tentang kemampuan keuangan pembangunan daerah.
- Data tentang kelembagaan pembangunan daerah
- Data tentang kebijakan penataan ruang terkait (RTRW Propinsi, RTRW Nasional).
- Data tentang kebijakan pembangunan sektoral, terutama yang merupakan kebijakan pemerintah pusat; dan
- Peraturan perundang-undangan terkait.

Tingkat akurasi data, sumber penyedia data, kewenangan sumber atau instansi penyedia data, tingkat kesalahan, variabel ketidakpastian, serta variabel-variabel lainnya yang mungkin ada, perlu diperhatikan dalam pengumpulan data. Data dalam bentuk data statistik dan peta, serta

informasi yang dikumpulkan berupa data tahunan minimal 5 (lima) tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat kelurahan/desa. Dengan data berdasarkan kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan apa yang terjadi pada wilayah kabupaten.

### 3. Pengolahan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mengenali karakteristik wilayah kabupaten terkait, terdiri atas:

#### a. Karakteristik fisik wilayah, sekurang-kurangnya meliputi:

- Karakteristik umum fisik wilayah (letak geografis, morfologi wilayah, dan sebagainya);
- Potensi rawan bencana alam (longsor, banjir, tsunami, dan bencana alam geologi);
- Potensi sumber daya alam (mineral, batubara, migas, panas bumi, dan air tanah); dan
- Kesesuaian lahan pertanian (tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan sebagainya).

#### b. Karakteristik sosial-kependudukan, sekurang-kurangnya meliputi:

- Sebaran kepadatan penduduk di masa sekarang dan di masa yang akan datang (20 tahun);
- Proporsi penduduk perkotaan dan perdesaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang (20 tahun); dan
- Kualitas SDM dalam mendapatkan kesempatan kerja.

#### c. Karakteristik ekonomi wilayah, sekurang-kurangnya meliputi:

- Basis ekonomi wilayah;

- Prospek pertumbuhan ekonomi wilayah di masa yang akan datang ( 20 tahun); dan
- Prasarana dan sarana penunjang pertumbuhan ekonomi.

d. Kemampuan keuangan pembangunan daerah, sekurang-kurangnya meliputi:

- Sumber penerimaan daerah dan alokasi pembiayaan pembangunan; dan
- Prediksi peningkatan kemampuan keuangan pembangunan daerah.

e. Kedudukan kabupaten di dalam wilayah lebih luas, sekurang-kurangnya meliputi:

- Kedudukan kabupaten di dalam jakstra struktur ruang nasional; dan
- Kedudukan kabupaten di dalam sistem perekonomian regional.

Pengenalan karakteristik wilayah kabupaten ini akan menjadi dasar bagi perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, serta menjadi masukan bagi seluruh penyusunan rencana tata ruang selanjutnya.

#### 4. Penyusunan Konsep RTRW Kabupaten

Kegiatan perumusan konsepsi RTRW Kabupaten terdiri atas perumusan konsep pengembangan wilayah dan perumusan RTRW Kabupaten itu sendiri. Konsep pengembangan wilayah dilakukan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya dengan menghasilkan beberapa alternatif konsep pengembangan wilayah, yang berisi:



- Rumusan tentang tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah kabupaten; dan
- Konsep pengembangan wilayah kabupaten.

Setelah dilakukan beberapa kali iterasi, dipilih alternatif terbaik sebagai dasar perumusan RTRW Kabupaten. Hasil kegiatan perumusan konsepsi RTRW yang berupa RTRW Kabupaten terdiri atas:

- Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan kabupaten

Dirumuskan berdasarkan karakteristik tata ruang wilayah kabupaten yang dipertajam dengan aspirasi pemangku kepentingan.

- Rencana struktur ruang kabupaten

Disusun berdasarkan hasil analisis sistem pusat-pusat permukiman yang berangkat dari strategi penataan ruang kabupaten dengan memperhatikan kebijakan dan strategi struktur ruang wilayah provinsi dan nasional.

- Rencana pola ruang kabupaten

Disusun berdasarkan analisis optimasi pemanfaatan ruang yang berangkat dari strategi penataan ruang kabupaten dengan memperhatikan kebijakan dan strategi pola ruang provinsi dan nasional.

- Penetapan kawasan-kawasan strategis kabupaten

Berangkat dari karakteristik tata ruang wilayah kabupaten yang menunjukkan adanya bagian wilayah kabupaten yang memerlukan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang khusus yang tidak dapat diakomodasi sepenuhnya di dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang kabupaten.

- Arahan pemanfaatan ruang

Disusun berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kabupaten yang dikaitkan dengan kemampuan keuangan pembangunan daerah.

- Arahan pengendalian pemanfaatan ruang

Disusun berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kabupaten yang dikaitkan dengan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi serta peraturan perundang-undangan terkait, termasuk di dalamnya berbagai standar teknis perencanaan tata ruang.

Selanjutnya dilakukan pemantapan terhadap konsep pengembangan wilayah kabupaten tersebut melalui beberapa kali iterasi sehingga menghasilkan alternatif terbaik yang dipilih untuk menjadi RTRW kabupaten.

#### 5. Penyusunan Raperda Tentang RTRW Kabupaten

Kegiatan penyusunan naskah raperda tentang RTRW kabupaten merupakan proses penuangan materi teknis RTRW kabupaten ke dalam bentuk pasal-pasal dengan mengikuti kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai UU No. 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan.

#### 2.4.1. Prosedur Penyusunan RTRW Kabupaten

Prosedur penyusunan RTRW kabupaten merupakan pentahapan yang harus dilalui dalam penyusunan RTRW kabupaten sampai dengan pembahasan raperda tentang RTRW kabupaten yang melibatkan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten termasuk masyarakat (Peraturan Menteri PU No. 16/PRT/M/2009).

Masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan dalam penyusunan RTRW kabupaten meliputi:

- a. Orang perorangan atau sekelompok orang;
- b. Organisasi masyarakat tingkat wilayah kabupaten atau yang memiliki cakupan wilayah layanan satu kabupaten atau lebih dari wilayah kabupaten yang sedang melakukan penyusunan RTRW kabupaten;
- c. Perwakilan organisasi masyarakat tingkat kabupaten dan kabupaten/kota yang berdekatan secara sistemik (memiliki hubungan interaksi langsung) yang dapat terkena dampak dari penataan ruang di daerah yang sedang disusun RTRW kabupaten-nya; dan
- d. Perwakilan organisasi masyarakat tingkat kabupaten dan kabupaten/kota dari daerah yang dapat memberikan dampak bagi penataan ruang di daerah yang sedang disusun RTRW kabupaten-nya.

Prosedur penyusunan RTRW kabupaten meliputi:

- a. Pembentukan tim penyusunan RTRW kabupaten yang beranggotakan unsur-unsur dari pemerintah daerah kabupaten, khususnya dalam lingkup Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kabupaten yang bersangkutan;



- b. Pelaksanaan penyusunan RTRW kabupaten;
- c. Pelibatan peran masyarakat di tingkat kabupaten dalam penyusunan RTRW kabupaten melalui:
  - 1) Pada tahap persiapan, pemerintah melibatkan masyarakat secara pasif dengan pemberitaan mengenai informasi penataan ruang melalui:
    - a) Media massa (televisi, radio, surat kabar, dan majalah);
    - b) Brosur, leaflet, *flyers*, surat edaran, buletin, jurnal, dan buku;
    - c) Kegiatan pameran, pemasangan poster, pamflet, papan pengumuman, *billboard*;
    - d) Kegiatan kebudayaan (misal: pagelaran wayang dengan menyisipkan informasi yang ingin disampaikan di dalamnya);
    - e) Multimedia (video, VCD, dan DVD);
    - f) *Website*;
    - g) Ruang pameran atau pusat informasi; dan/atau
    - h) Pertemuan terbuka dengan masyarakat/kelompok masyarakat.
  - 2) Pada tahap pengumpulan data dan informasi, masyarakat/organisasi masyarakat berperan lebih aktif dalam bentuk:
    - a) Pemberian data dan informasi kewilayahan yang diketahui/dimiliki datanya;
    - b) Pendataan untuk kepentingan penataan ruang yang diperlukan;
    - c) Pemberian masukan, aspirasi, dan opini awal usulan rencana penataan ruang; dan
    - d) Identifikasi potensi dan masalah penataan ruang.

Media yang digunakan untuk mendapatkan informasi/masukan dapat melalui:

- a) Kotak aduan;
- b) Pengisian kuesioner, wawancara;
- c) *Website*, surat elektronik, form aduan, *polling*, telepon, dan pesan singkat/SMS;

- d) Pertemuan terbuka atau *public hearings*;
- e) Kegiatan *workshop*, *focus group discussion* (FGD);
- f) Penyelenggaraan konferensi; dan/atau
- g) Ruang pameran atau pusat informasi.

3) Pada tahap perumusan konsepsi RTRW kabupaten, masyarakat terlibat secara aktif dan bersifat dialogis/komunikasi dua arah. Dialog dilakukan antara lain melalui konsultasi publik, *workshop*, FGD, seminar, dan bentuk komunikasi dua arah lainnya. Pada kondisi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang telah lebih aktif, maka dalam penyusunan RTRW kabupaten dapat memanfaatkan lembaga/forum yang telah ada seperti:

- a) Satuan kerja (*task force/technical advisory committee*);
- b) *Steering committee*;
- c) Forum delegasi; dan/atau;
- d) Forum pertemuan antar pemangku kepentingan.

c. Pembahasan raperda tentang RTRW kabupaten oleh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten. Pada tahap pembahasan raperda ini,

masyarakat dapat berperan dalam bentuk pengajuan usulan, keberatan, atau sanggahan terhadap raperda tentang RTRW kabupaten melalui:

- 1) Media massa (televisi, radio, surat kabar, dan majalah);
- 2) *Website* resmi lembaga pemerintah yang berkewenangan menyusun RTRW kabupaten;
- 3) Surat terbuka di media massa;
- 4) Kelompok kerja (*working group/public advisory group*); dan/atau
- 5) Diskusi/temu warga (*public hearings/meetings*), konsultasi publik, *workshop, focus group discussion* (FGD), seminar, konferensi, dan panel.

## **2.5. Muatan RTRW Kabupaten**

RTRW kabupaten memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten (penataan kabupaten); rencana struktur ruang wilayah kabupaten; rencana pola ruang wilayah kabupaten; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten (Peraturan Menteri PU No. 16/PRT/M/2009).

### **2.5.1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten**

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten (penataan kabupaten ) merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.



**a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten**

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun).

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi :

- 1) Sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- 2) Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
- 3) Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;

**b. Kebijakan**

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai :

- 1) Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- 2) Sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten;
- 3) Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten;
- 4) Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;

### c. Strategi

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi :

- 1) Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
- 2) Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
- 3) Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;

#### 2.5.2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi :

- a) Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
- b) Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.



Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas :

- Sistem prasarana utama : sistem jaringan transportasi darat; jaringan kereta api; jaringan sungai, danau dan penyeberangan; sistem jaringan transportasi laut; sistem jaringan transportasi udara.
- Sistem prasarana lainnya : sistem jaringan energi/kelistrikan; sistem jaringan telekomunikasi; sistem jaringan sumber daya air; sistem jaringan prasarana lingkungan

### 2.5.3. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi :

- a) Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
- b) Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- c) Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
- d) Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten;

Klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas :

- Kawasan lindung : kawasan hutan lindung; kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam, pelestarian alam dan



cagar budaya; kawasan rawan bencana alam; kawasan lindung geologi; kawasan lindung lainnya

- Kawasan budidaya : kawasan peruntukan hutan produksi; kawasan hutan rakyat; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perkebunan; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman.

#### **2.5.4. Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten**

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan strategis kabupaten berfungsi :

- a) Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kabupaten;
- b) Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kabupaten bersangkutan;
- c) Untuk mewadai penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;

- d) Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kabupaten; dan
- e) Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.

Sebaran kawasan strategis nasional dan provinsi yang berada dalam wilayah kabupaten, serta kawasan strategis kabupaten perlu digambarkan dalam peta kawasan strategis dengan skala peta minimal 1:50.000. Penentuan batasan fisik kawasan strategis kabupaten pada RTRW kabupaten lebih bersifat indikatif.

Penetapan kawasan strategis harus didukung oleh tujuan tertentu daerah sesuai pertimbangan aspek strategis masing-masing kabupaten. Kawasan strategis yang ada di kabupaten memiliki peluang sebagai kawasan strategis nasional dan provinsi. Penetapan kawasan strategis kabupaten didasarkan pada kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan.

#### **2.5.5. Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten**

Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan wilayah kabupaten dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun).

Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berfungsi :

- a) Sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman penataan/pengembangan wilayah kabupaten;
- b) Sebagai arahan untuk sektor dalam penyusunan program (besaran, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan);



- c) Sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
- d) Sebagai acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi

#### **2.5.6. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten**

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan yang diperuntukan sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berfungsi :

- a) Sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
- b) Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang
- c) Menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang;
- d) Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e) Mencegah dampak pembangunan yang merugikan.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten memuat :

- 1) Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten

Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.



2) Ketentuan perizinan

Ketentuan perizinan adalah ketentuan yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang.

3) Ketentuan pemberian intensif

Ketentuan pemberian intensif adalah ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang, dapat diberikan dalam bentuk :

- Pemberian kompensasi
- Pengurangan retribusi
- Penyediaan sarana dan prasarana
- Penghargaan
- Kemudahan perizinan

4) Ketentuan pemberian disinsentif

Ketentuan pemberian disinsentif adalah ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang, dapat diberikan dalam bentuk :

- Pengenaan pajak/retribusi yang tinggi
- Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana

5) Arahan pengenaan sanksi

Arahan pengenaan sanksi merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah kabupaten, dapat diberikan dalam bentuk :

- Peringatan tertulis

- Penghentian sementara kegiatan
- Penutupan lokasi
- Pencabutan izin
- Pembongkaran bangunan

#### **2.5.7. Masa Berlaku RTRW Kabupaten**

RTRW kabupaten berjangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali setiap 5(lima) tahun. RTRW kabupaten dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun jika :

- a) Terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten
- b) Terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar, seperti bencana alam skala besar atau pemekaran wilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

#### **2.6. Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah**

Pengertian evaluasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti penilaian ; hasil. Menurut (Bryan & White, 1987), evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasi dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi, evaluasi yang paling sederhana adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program/rencana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diatur tentang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Rencana Tata Ruang. Pasal 55 menyebutkan bahwa:

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan wewenangnya.

Pasal 56 ayat 1 menyebutkan bahwa:

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat
- (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu;

- 1). Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkan rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;
- 2) Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, dan



- 3) Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

## 2.7. Definisi Operasional

- a. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya (UU RI No. 26 Tahun 2007).
- b. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang (UU RI No. 26 Tahun 2007).
- c. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010).
- d. Perencanaan adalah sebuah proses untuk menentukan langkah-langkah di masa depan melalui beberapa pilihan-pilihan. Menurut Lewis Keeble (dalam Sujarto, 1985) perencanaan adalah keseluruhan kegiatan dalam memecahkan masalah guna mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan bersama, proses ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya sebaik-baiknya melalui seleksi optimasi alternative Davidoff dan Reiner (dalam Sujarto, 1985).

- e. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten (Peraturan Menteri PU No. 16/PRT/M/2009).
- f. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional (Peraturan Menteri PU No. 16/PRT/M/2009).
- g. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun (Peraturan Menteri PU No. 16/PRT/M/2009).
- h. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten (Peraturan Menteri PU No. 16/PRT/M/2009).



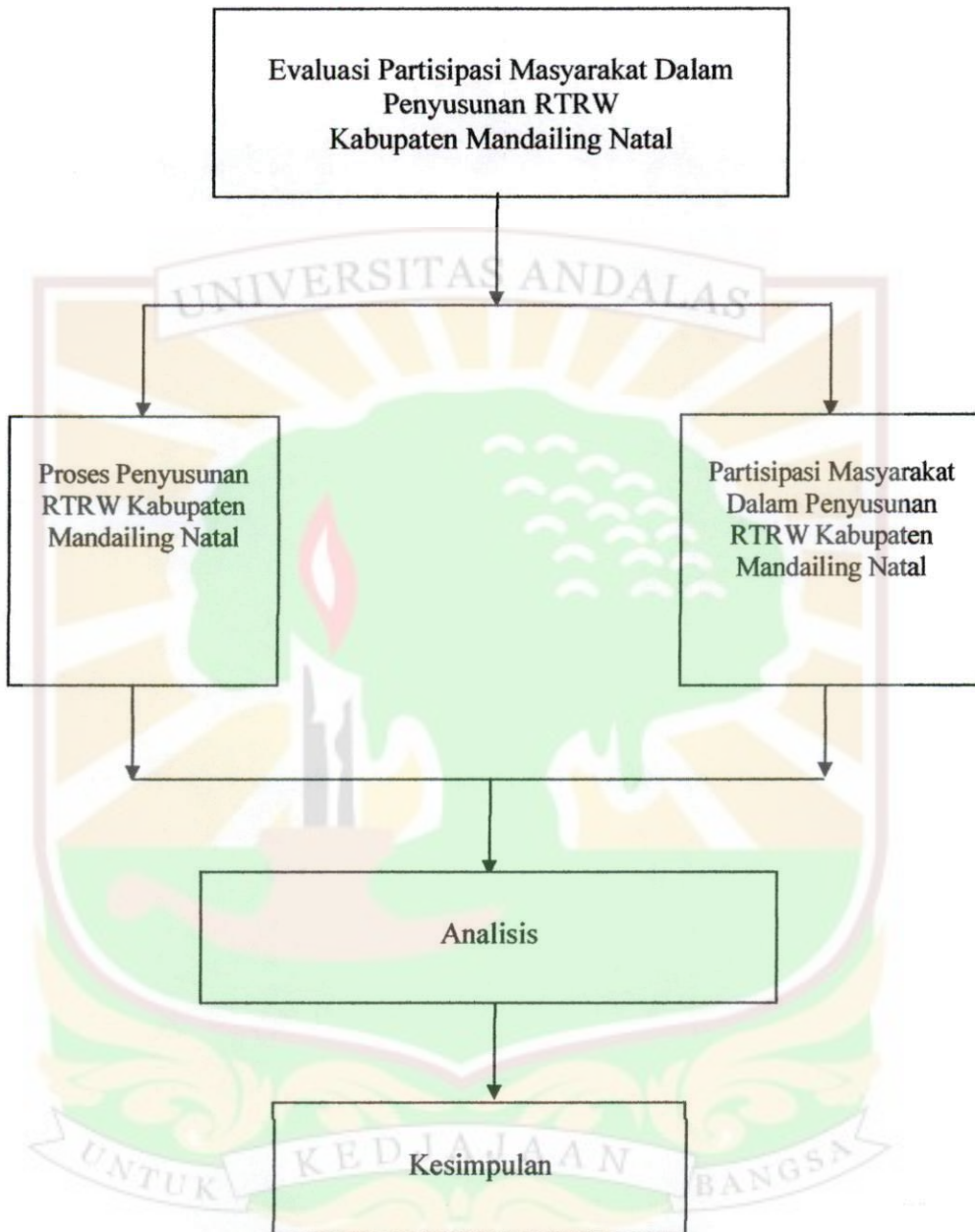
- i. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya (Peraturan Menteri PU No. 16/PRT/M/2009).
- j. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang (Peraturan Menteri PU No. 16/PRT/M/2009).
- k. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya (UU RI No. 26 Tahun 2007).
- l. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang (UU RI No. 26 Tahun 2007).
- m. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU RI No. 26 Tahun 2007).



- n. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang (Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010).
- o. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010).
- p. Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010).



## 2.8. Kerangka Penelitian



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Kerangka Analisis

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif ini digunakan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, M, 1988).

Penggunaan metoda deskriptif karena penelitian ini memfokuskan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data atau masukan dari masyarakat sebagai data primer. Sedangkan deskriptif kualitatif yaitu menitikberatkan pada pengungkapan berbagai informasi kualitatif melalui data yang dikumpulkan kemudian dianalisa.

#### 3.2. Waktu dan Tempat

Dipilihnya Kabupaten Mandailing Natal sebagai lokasi penelitian adalah didasarkan atas pertimbangan: *Pertama*, Kabupaten Mandailing Natal memiliki Taman Nasional Batang Gadis dan potensi wilayah memicu pemanfaatan ruang. *Kedua*, Kota Mandailing Natal merupakan pusat komunikasi dan simpul transportasi pada sentral jalur lintas Medan Padang. *Ketiga*, perlu pengarahan dan pengendalian secara terpadu agar pembangunan dan pengembangan wilayah Kabupaten Mandailing Natal dapat sesuai dengan daya dukung lingkungan dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.



### 3.3. Fokus Kajian

Fokus kajian dari penelitian ini adalah evaluasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2031 agar pembangunan dan pengembangan wilayah Kabupaten Mandailing Natal dapat sesuai dengan daya dukung lingkungan serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, dapat di rinci pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1. : Fokus Kajian Evaluasi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal**

No	Fokus Kajian	Jenis Data	Kebutuhan Data	Bagian Dari Data	Sumber
1.	Kondisi wilayah Kabupaten Mandailing Natal	Sekunder	Luas wilayah kondisi geografis kependudukan sosial ekonomi	-	Bappeda
2.	Proses penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal	Sekunder	Data proses penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan penyusunan RTRW Kab</li> <li>• Pengumpulan data</li> <li>• Pengolahan &amp; analisis data</li> <li>• Penyusunan konsep RTRW Kabupaten</li> <li>• Penyusunan raperda tentang RTRW Kabupaten</li> </ul>	Bappeda
3.	Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal	Primer	Data tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahap persiapan</li> <li>• Penentuan arah pengembangan wilayah</li> <li>• Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah</li> <li>• Perumusan konsepsi rencana tata ruang</li> <li>• Penetapan rencana tata ruang</li> </ul>	Masyarakat

Sumber : Peraturan Menteri PU No. 16/PRT/M/2009 dan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010

### 3.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Bappeda dan PU dengan studi pustaka/literatur, peta, foto dan gambar-gambar yang relevan dengan tujuan penelitian; sedangkan data primer diperoleh dilapangan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu kuesioner dan wawancara dengan responden terkait. Periode waktu data yang dibutuhkan pada penelitian ini tahun 2012.

Data sekunder yang dibutuhkan terdiri atas (1) aspek fisik wilayah, meliputi : letak geografis, batas dan luas wilayah, iklim dan penggunaan lahan. (2) aspek kependudukan, meliputi : jumlah penduduk dan mata pencaharian di Kabupaten Mandailing Natal. (3) aspek sosial, meliputi : pendidikan, kesehatan, agama.

Masyarakat yang ikut terlibat dalam penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, meliputi para KTNA, Badan Pemangku Adat dan KNPI. Jumlah masyarakat yang terlibat pada saat itu sebanyak 5 (lima) orang dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini.

**Tabel 3.2. : Data Responden**

No.	Sumber Data	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Bappeda	Harry Rizal Hsb	Kabid Fisik Sarana Bappeda	1
2.	PU	Nazaruddin Sitorus	Kabid Tata Ruang Dinas PU	1
3.	Perguruan Tinggi	Mukhlis	Wakil Ketua Perguruan Tinggi STAIM	1
4.	Camat Panyabungan	Hapisuddin, S.Sos	Camat Panyabungan	1
5.	Wakil Masyarakat	Monang Nasution	KTNA Kab. Mandailing Natal	1
		H. Kholihul Yakini Nasution	Badan Pemangku Adat	1
		Sutan Naposo Nasution	Badan Pemangku Adat	1
		Mulyadi Nasution	Ketua KNPI Kab. Mandailing Natal	1
		Darto Siregar	Sekretaris KNPI Kab. Mandailing Natal	1
	Jumlah			9

### 3.5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari penelitian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif. Tujuan analisis di dalam penelitian adalah membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur, serta tersusun dan lebih berarti (Marzuki, 2002).

Analisis terhadap data kualitatif yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara yang merupakan jawaban terbuka, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992).



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

#### 4.1. Aspek Fisik Wilayah

##### 4.1.1. Kondisi Geografis

Gambaran secara geografis, Kabupaten Mandailing Natal terletak antara 00. 10'-10°50' Lintang Utara dan 98°50'-100°10' Bujur Timur yang merupakan daerah kabupaten paling selatan dari wilayah Provinsi Sumatera Utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat dan Samudera Indonesia. Secara lengkap batas administrasi wilayah Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Administrasi Wilayah Kabupaten Mandailing Natal memiliki 23 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 377 Desa. Adapun nama kecamatan, ibukota kecamatan, luas wilayah, jumlah desa, dan kelurahan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini :

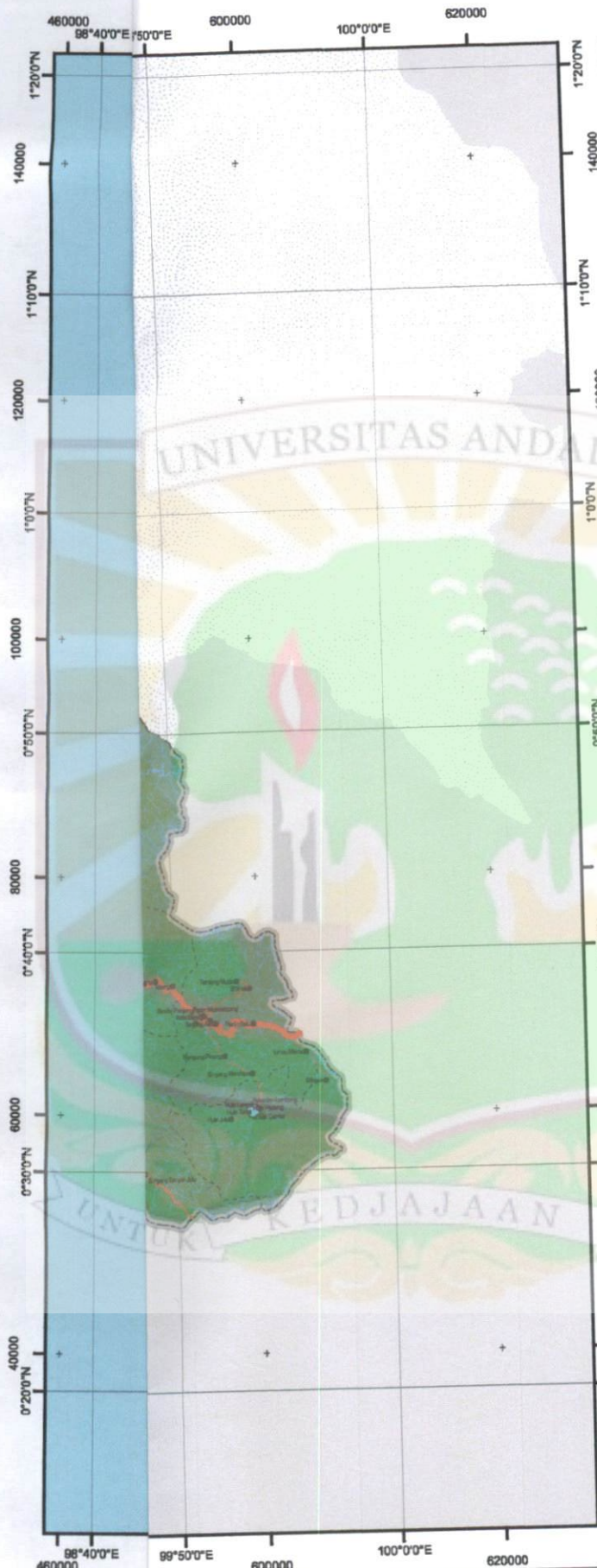
**Tabel 4.1. Administrasi Wilayah Kabupaten Mandailing Natal**

No.	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah	
				Kel	Desa
1	Siabu	Siabu	34.536,48	2	26
2	Bukit Malintang	Malintang Jae	12.743,52	-	11
3	Panyabungan Utara	Mompang	6.372,64	1	11
4	Huta Bargot	Bangun Sejati	11.620,97	-	14
5	Panyabungan	Panyabungan	25.977,43	9	30
6	Panyabungan Timur	Gunung Baringin	39.787,40	1	14
7	Panyabungan Barat	Longat	8.721,83	1	9
8	Panyabungan Selatan	Tano Bato	8.759,72	1	10
9	Lembah Sorik Marapi	Pasar Maga	3.472,57	1	8
10	Puncak Sorik Marapi	Sibanggor Tonga	5.553,79	-	11
11	Tambangan	Laru	15.859,86	1	19
12	Kotanopan	Kotanopan	32.514,72	2	34
13	Ulu Pungkut	Huta Godang	29.519,06	1	12
14	Muarasipongi	Muarasipongi	13.570,31	1	15
15	Pakantan	Pakantan	9.359,69	-	8
16	Batang Natal	Muara Soma	65.150,99	1	30
17	Lingga Bayu	Simpang Gambir	19.267,50	2	17
18	Ranto Baek	Manisak	15.271,52	-	18
19	Batahan	Batahan	49.707,30	1	17
20	Sinunukan	Sinunukan III	17.263,70	-	14
21	Natal	Natal	93.537,00	2	28
22	Muara Batang Gadis	Singkuang	143.502,00	-	14
23	Naga Juang	Banua Simanosor		-	7
<b>Total</b>			<b>662.070,00</b>	<b>27</b>	<b>377</b>

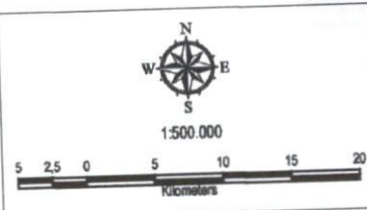
Sumber : Bappeda Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan tabel 4.1 diatas Kabupaten Mandailing Natal mempunyai luas wilayah 662.070 Ha. Kecamatan yang terluas wilayahnya adalah Kecamatan Muara Batang Gadis dengan luas wilayah 143.502,00 Ha, sedangkan Kecamatan Lembah Sorik Marapi memiliki wilayah yang paling kecil yakni 3.472,57 Ha dan Kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan dan desa terbesar adalah Kecamatan Panyabungan dengan jumlah 9 kelurahan dan 30 desa, serta Kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan dan desa terkecil adalah Kecamatan Naga Juang yang memiliki 7 desa.





# PETA POLA RUANG KAB. MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA



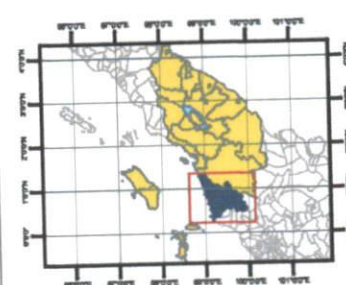
## LEGENDA

- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- ▲ Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
- Ibu Kota Desa
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 2
- Jalan Lokal Primer
- - - Rencana Jalan Kolektor Primer 1
- - - Rencana Jalan Kolektor Primer 2
- - - Rencana Jalan Lokal Primer
- - - Rencana Jalan Karata Api
- Sungai
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Kabupaten
- - - Batas Provinsi
- Garis Pantai
- Buffer Tsunami
- Damsu
- Enclave
- Hutan Lindung
- Hutan Mangrove
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi Tidak
- Kawasan TNBB
- Kebun
- Ladang
- Lahan Terbuka
- Perkuburan
- Permukiman
- Rawa
- Sawah
- Tambak

DISAHKAN OLEH :  
KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ABU HANIFAH, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19610220 198603 1 002

## PETA ORIENTASI :



## SUMBER PETA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250.000, BAKOSURTANAL Tahun 1999



TAL



#### 4.1.2. Iklim

Wilayah Kabupaten Mandailing Natal mempunyai dua iklim yaitu musim hujan dan kemarau. Musim kemarau terjadi antara bulan Juni sampai bulan September dimana arus angin berasal dari Australia yang tidak mengandung uap air sebaliknya musim hujan terjadi pada bulan Desember sampai bulan Maret karena arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik. Keadaan ini seperti silih berganti setiap tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November.

Tinggi atau rendahnya suhu udara di suatu tempat dipengaruhi oleh ketinggian daerah di atas permukaan laut. Daerah Mandailing Natal yang terletak di ketinggian antara 0-1.000 meter di atas permukaan laut mengakibatkan suhunya berkisar antara 23°C-32°C dengan kelembaban antara 80-85 %. Curah hujan bulanan maksimum pada tahun 2012 terjadi di Bulan November yaitu 3.234 mm dan curah hujan harian minimum terjadi pada Bulan Juli yaitu 328 mm. Jumlah curah hujan rata-rata di Kabupaten Mandailing Natal  $\pm 1.630$  mm/tahun.

Dampak dari perubahan iklim ini terhadap kehidupan manusia dalam penggunaan ruang di Kabupaten Mandailing Natal diantaranya adalah:

1. Bidang Pertanian

Manfaat iklim dalam bidang pertanian diantaranya: menentukan waktu tanam, menentukan tanaman yang sesuai. Selain itu cuaca dan iklim juga memiliki dampak bagi pertanian diantaranya:

a. Dampak secara langsung :

Misalnya: Curah hujan yang lebat atau terus menerus dapat menimbulkan tanah longsor saat itu, angin kencang menimbulkan kerusakan batang tanaman dan gagal panen.

b. Dampak tidak langsung

Misalnya: Timbulnya hama, penyakit, parasit yang justru hidup subur karena didukung cuaca waktu itu, harga pangan melonjak naik.

2. Bidang Transportasi

Faktor-faktor cuaca dan iklim mempunyai peranan yang besar terhadap bidang transportasi. Seperti cuaca, suhu, awan dan kabut sangat mempengaruhi kelancaran transportasi darat dan transportasi laut. Seperti arah dan kecepatan angin, tinggi gelombang, badai dan lain-lain sangat mempengaruhi terhadap hasil tangkapan laut.

3. Bidang Telekomunikasi

Faktor cuaca dan iklim berpengaruh pula terhadap bidang telekomunikasi, seperti arus angin dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar daerah dengan menggunakan telepon angin. Pengaruh lain yaitu kondisi cuaca yang kurang baik dapat mengganggu jaringan telekomunikasi. Misalnya saat kondisi hujan atau mendung sinyal handphone menjadi melemah.

#### 4. Bidang Pariwisata

Faktor cuaca dan iklim berpengaruh pula terhadap bidang pariwisata, seperti cuaca cerah, banyak cahaya matahari, kecepatan angin, udara sejuk dan sebagainya sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan wisata, baik wisata darat maupun wisata laut.

##### 4.1.3. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan Kabupaten Mandailing Natal terbagi atas 11 (sebelas) kategori penggunaan lahan, dengan dominasi hutan, disusul berturut-turut oleh perkebunan, sawah, ladang, kebun, lahan terbuka, permukiman, hutan mangrove, rawa, danau, dan tambak. Kabupaten Mandailing Natal memiliki luas wilayah seluas 662.070 Ha dimana dari luas tersebut terdapat kawasan hutan seluas 411.451 Ha (62,23 % dari luas wilayah Kabupaten Madina) yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 152.675 Ha, Hutan Produksi seluas 18.264 Ha, Hutan Produksi Terbatas 164.572 Ha, dan Taman Nasional Batang Gadis seluas 76.000 Ha serta Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 249.249 Ha (37,72%) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2. Luas Kabupaten Mandailing Natal Menurut Penggunaan Lahan**

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Danau	248,47	0,038
2.	Hutan	411.451,00	62,146
3.	Hutan Mangrove	998,19	0,151
4.	Kebun	42.876,34	6,476
5.	Ladang	57.821,61	8,733
6.	Lahan Terbuka	4.664,01	0,704
7.	Perkebunan	106.120,19	16,029
8.	Permukiman	2.040,08	0,308
9.	Rawa	344,25	0,052
10.	Sawah	35.493,61	5,361
11.	Tambak	12,25	0,002
	Jumlah	662.070,00	100,00

*Sumber : Bappeda Kabupaten Mandailing Natal*



Secara keseluruhan penggunaan lahan di Kabupaten Mandailing Natal didominasi peruntukan sebagai lahan perkebunan yaitu seluas 106.120,19 Ha ( 8,733%). Karet merupakan salah satu komoditi perkebunan penting di Kabupaten Mandailing Natal, baik sebagai sumber pendapatan, kesempatan kerja dan devisa, serta pendorong pertumbuhan ekonomi sentra-sentra baru di wilayah sekitar perkebunan karet maupun pelestarian lingkungan dan sumber daya hayati. Selain itu, tanaman karet ke depan akan merupakan sumber kayu potensial yang dapat mensubstitusi kebutuhan kayu yang selama ini mengandalkan hutan alam. Sedangkan penggunaan lahan ladang seluas 57.821,16 Ha ( 8,733% ), lahan kebun seluas 42.876,34 Ha ( 6,476% ), kemudian diikuti peruntukan sebagai lahan sawah seluas 35.493,61 Ha ( 5,361 % ).

Sementara itu pemanfaatan lahan untuk kegiatan permukiman dan komersial masih terpusat pada daerah pusat kota. Kegiatan perdagangan dan jasa masih memusat pada beberapa ruas jalan utama dan simpul-simpul jalan di Kabupaten Mandailing Natal. Pola pemanfaatan lahan ini tentunya kurang optimal dalam menopang pertumbuhan Kabupaten Mandailing Natal. Penyebaran aktivitas perdagangan dan jasa juga mulai berkembang menuju daerah pinggiran kota. Namun perkembangan yang terjadi masih secara linier mengikuti jalan regional yang ada di Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam pengembangan Kabupaten Mandailing Natal lebih lanjut perlu dipertimbangkan kebutuhan untuk menarik aktivitas perkotaan ke daerah yang belum maju. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru atau dengan memindahkan aktivitas-aktivitas yang ada didalam

kota. Aktivitas perkotaan yang mungkin dipindahkan antara lain adalah aktivitas industri, perdagangan dan jasa, serta terminal.

Namun dalam pengembangan pusat pertumbuhan baru ini perlu diwaspadai kemungkinan terjadinya konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Untuk mencegah terjadinya konversi yang tidak terkendali, maka perlu diadakan perencanaan dan pengawasan dalam hal ini pemanfaatan lahan.

## **4.2. Aspek Kependudukan**

### **4.2.1. Jumlah Penduduk**

Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 23 Kecamatan dengan kepadatannya yakni 62 jiwa/km. Kepadatan tertinggi di kecamatan Lembah Sorik Marapi yaitu 685 jiwa/km dan terendah di kecamatan Muara Batang Gadis (11 jiwa/km). Sesuai nama daerahnya, penduduk mayoritas adalah suku Batak Mandailing. Selain itu dihuni juga oleh suku-suku lainnya seperti Batak, Jawa, Melayu, Minang, dan lainnya.

Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan dapat memecahkan masalah kependudukan di daerah dengan cara pemindahan penduduk dari pulau Jawa melalui program transmigrasi yang terdapat di Kecamatan Natal dan Batang Natal berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Serta Program KB yang dimulai pada awal tahun 1970-an dapat menekan laju penduduk di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

Penduduk merupakan salah satu potensi yang dimiliki oleh setiap daerah karena penduduk bukan lagi hanya sebagai obyek dari pembangunan,



tetapi juga adalah pelaku dari keseluruhan proses pembangunan itu sendiri. Sedangkan aspek kependudukan dan sosial merupakan hal-hal yang mempengaruhi karakteristik suatu wilayah, mengingat pada dasarnya proses perencanaan wilayah ditujukan bagi kepentingan penduduk secara keseluruhan. Selain jumlah penduduk, perkiraan laju pertumbuhan penduduk diperlukan dalam perencanaan tata ruang, khususnya dalam hal ini memperkirakan jumlah, jenis sarana dan infrastruktur pelayanan sosial ekonomi yang dibutuhkan selama waktu perencanaan.

Sasaran pokok yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan, salah satunya adalah masalah kependudukan yang mencakup antara lain mengenai jumlah, komposisi dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan bila kualitasnya baik, dan sebaliknya dapat menjadi beban pembangunan bila kualitasnya rendah. Untuk itu, pembangunan kualitas penduduk perlu menjadi perhatian integral dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Keadaan penduduk Kabupaten Mandailing Natal dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah penduduk menurut jenis kelamin per kecamatan Kabupaten Mandailing Natal menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2012 adalah 456.051 jiwa, dimana laki-laki sebanyak 221.901 jiwa dan perempuan sebanyak 234.150 jiwa.



**Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin perKecamatan Kabupaten Mandailing Natal.**

No.	Kecamatan	2012	
		Pria	Wanita
1	Batahan	9.586	10.114
2	Sinunukan	8.024	8.875
3	Batang Natal	11.649	12.412
4	Lingga Bayu	12.972	11.721
5	Ranto Back	6.060	6.494
6	Kotanopan	13.660	14.551
7	Ulu Pungkut	2.567	2.588
8	Tambangan	5.593	6.227
9	Lembah Sorik Marapi	9.621	9.000
10	Puncak Sorik Marapi	4.613	5.209
11	Muara Sipongi	5.833	6.071
12	Pakantan	1.305	1.320
13	Panyabungan	39.723	44.513
14	Panyabungan Selatan	5.188	5.663
15	Panyabungan Barat	5.925	6.183
16	Panyabungan Utara	10.886	11.545
17	Panyabungan Timur	7.258	7.710
18	Huta Bargot	3.365	3.722
19	Natal	14.049	14.419
20	Muara Batang Gadis	8.409	8.449
21	Siabu	27.390	29.081
22	Bukit Malintang	6.076	6.232
23	Naga Juang	2.149	2.051
Jumlah		221.901	234.150
Total		456.051	

*Sumber : Bappeda Kabupaten Mandailing Natal*

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2012 dapat digambarkan bahwa secara berurutan Kecamatan Panyabungan mempunyai penduduk yang paling banyak di Kabupaten Mandailing Natal yaitu sejumlah 84.236 jiwa disusul oleh Kec. Siabu dengan jumlah 56.471 jiwa dan diikuti oleh Kec. Natal sejumlah 28.468 jiwa, selanjutnya ditempati oleh Kec. Kotanopan dan Kec. Batang Natal dengan masing-masing jumlah penduduk yaitu 28.211 jiwa dan 24.061 jiwa.

**Tabel 4.4. Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Mandailing Natal**

No.	Golongan Umur	2012	
		Pria	Wanita
1	0-4	25,960	25,115
2	5-9	24,087	23,328
3	10-14	25,273	23,871
4	15-19	23,350	23,042
5	20-24	16,293	17,156
6	25-29	14,379	15,213
7	30-34	13,200	14,129
8	35-39	12,377	13,178
9	40-44	10,826	11,890
10	45-49	10,271	11,371
11	50-54	8,951	9,590
12	55-59	6,604	6,997
13	60-64	4,247	4,842
14	65 keatas	5,868	9,523
	Total	201,686	209,245

*Sumber : Bappeda Kabupaten Mandailing Natal*

Berdasarkan tabel dan grafik diatas struktur penduduk Mandailing Natal menunjukkan bahwa usia produktif (15-64 tahun) laki-laki pada tahun 2012 adalah sebesar 120.498 jiwa dan perempuan sebesar 127.408 jiwa, usia ketergantungan (0-14 tahun) laki-laki adalah sebesar 75.32 jiwa dan perempuan adalah sebesar 72.314 jiwa, dan Lansia (65+) laki-laki sebesar 5.868 jiwa dan perempuan sebesar 9.523 jiwa. Struktur penduduk yang demikian menunjukkan cukup tingginya angka ketergantungan penduduk terhadap usia produktif.

#### 4.2.2. Jenis Pekerjaan

Sejumlah 71,12 % mata pencaharian penduduk di Kabupaten Mandailing Natal bergerak di bidang pertanian, hal ini disebabkan karena sebagian masyarakatnya bertempat tinggal di daerah pedesaan, penduduk yang bekerja di bidang kontruksi 1,60 %. Disamping itu terdapat juga penduduk yang bekerja pada sektor lain seperti sektor Angkutan dan Komunikasi 2,87 % serta sektor Jasa



Kemasyarakatan dan sosial sebesar 5,62 %. Untuk lebih jelas tentang mata pencaharian penduduk di Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.5. Jenis Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2012.**

No.	Lapangan Usaha	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	109.620	71,12
2	Pertambangan dan Penggalian	2.523	1,63
3	Industri Pengolahan	4.251	2,76
4	Listrik, Gas dan Air	958	0,62
5	Bangunan	2.465	1,60
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	19.881	12,90
7	Angkutan dan Komunikasi	4.421	2,87
8	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa	1.349	0,88
9	Jasa Kemasyarakatan dan Sosial	8.660	5,62
	<b>Total (Orang)</b>	<b>154.128</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Bappeda Kabupaten Mandailing Natal*

Struktur perekonomian Kabupaten Mandailing Natal pada dasarnya didominasi oleh sektor Pertanian. Sektor terbesar berikutnya dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB kabupaten adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Sebagian besar kontribusi utama sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran berasal dari subsektor Perdagangan Besar dan Eceran, sementara subsektor lainnya yaitu subsektor Hotel dan subsektor Restoran hanya memberikan kontribusi yang relative sangat kecil.

Sektor Jasa-Jasa juga menunjukkan peranan yang semakin penting dengan meningkatnya persentase output yang dihasilkan dibandingkan dengan total keseluruhan output yang dihasilkan perekonomian Kabupaten Mandailing Natal. Sementara itu sektor Bangunan juga memberikan kontribusi yang tidak kalah pentingnya bagi perekonomian Kabupaten Mandailing Natal. Pembangunan fisik



yang beberapa tahun terakhir dilakukan telah menunjukkan output yang cenderung meningkat.

Perhatian mendalam perlu ditujukan pada sektor Industri Pengolahan mengingat sektor ini dapat menjadi sektor unggulan yang dapat memberikan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan dalam perekonomian. Sektor ini di Kabupaten Mandailing Natal masih belum menjadi sektor yang memberikan kontribusi besar bagi pembentukan nilai tambah untuk perekonomian kabupaten. Sektor berikutnya yaitu sektor Pengangkutan dan Komunikasi merupakan sektor yang menunjukkan peranan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

#### **4.3. Aspek Sosial**

##### **4.3.1. Pendidikan**

Untuk meningkatkan partisipasi sekolah pendidikan tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru yang memadai. Ditingkat pendidikan dasar, jumlah sekolah pada tahun 2012 ada sebanyak 397 buah dengan jumlah guru 4.606 orang dan jumlah murid sebanyak 128.675 orang. Sementara jumlah sekolah SMP 99 sekolah dengan jumlah guru 1.563 orang dan jumlah murid sebanyak 14.069 orang.

Pada tahun 2012 jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) ada sebanyak 22 sekolah dengan jumlah guru dan murid masing-masing 522 orang dan 6.858 orang. Sedangkan jumlah sekolah, guru, dan murid pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masing-masing sebanyak 18 sekolah, 535 orang, dan 6.323 orang.

#### **4.3.2. Kesehatan**

Ketersediaan sarana kesehatan berupa rumah sakit merupakan faktor utama dalam menunjang perbaikan kualitas hidup. Di Kabupaten Mandailing Natal ada 4 buah rumah sakit dengan 250 tempat tidur. Sementara sarana kesehatan tingkat kecamatan dan pedesaan cukup banyak di Mandailing Natal. Puskesmas berjumlah 26 buah dan Puskesmas Pembantu sebanyak 59 buah. Sedangkan posyandu ada 474 buah.

Jumlah tenaga medis dokter yang tersedia di Kabupaten Mandailing Natal hanya 55 orang yang terdiri dari 47 orang dokter umum dan 8 orang dokter gigi. Sedangkan tenaga medis bidan tersedia sebanyak 567 orang dan perawat sebanyak 143 orang.

#### **4.3.3. Agama**

Sesuai dengan filsafah Negara, pelayanan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan untuk membina kehidupan masyarakat dan mengatasi berbagai masalah sosial budaya yang mungkin dapat menghambat kemajuan bangsa. Untuk sarana ibadah umat beragama, pada tahun 2012 jumlah mesjid di Kabupaten Mandailing Natal terdapat sebanyak 506 buah, langgar/musolah sebanyak 976 buah, gereja katolik 6 buah dan gereja protestan 68 buah. Sedangkan kuil dan wihara tidak terdapat di Mandailing Natal.







## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1. Proses Penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal**

Proses penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal dimulai pada bulan Maret Tahun 2011, yang meliputi persiapan penyusunan, pengumpulan data yang dibutuhkan, pengolahan dan analisis data, perumusan konsepsi RTRW Kabupaten Mandailing Natal, penyusunan raperda, serta penetapan tentang RTRW Kabupaten Mandailing Natal.

Peran masyarakat dalam penataan ruang, tidak hanya diwujudkan dalam kegiatan penyampaian aspirasi dan informasi pada tahap penyusunan Rencana Tata Ruang. Pelibatan masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2031 dilakukan pada tahap proses pengumpulan data dan penjangkaran aspirasi masyarakat, tahap penyusunan rencana (konsultasi publik), dan sampai dengan tahap penetapan rencana menjadi Perda.

##### **5.1.1. Persiapan Penyusunan**

Dalama tahapan persiapan ini, dilakukan beberapa kegiatan yang akan menunjang kelancaran penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, yaitu :

1. Penyusunan kerangka acuan kerja (KAK);
2. Penyiapan anggaran biaya;
3. Penyiapan rencana kerja;
4. Penyiapan perangkat survey dan perjalanan dinas;
5. Pemahaman awal wilayah perencanaan;

6. Pemberitaan penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal kepada masyarakat melalui surat undangan;
7. Waktu pelaksanaan 1 (satu) bulan;
8. Pihak yang terlibat dalam tahap persiapan penyusunan adalah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal

#### **5.1.2. Pengumpulan Data dan Informasi**

Tahap ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi kondisi awal wilayah dan kecenderungan perkembangannya. Data dan informasi tersebut berdasarkan runtun waktu (*time series*). Pengumpulan data dilakukan dengan survey lapangan, wawancara, penyebaran kuesioner dan survey kepada instansi-instansi terkait untuk memperoleh:

1. Data/informasi kebijaksanaan pembangunan;
2. Data/informasi terkait kondisi sosial budaya;
3. Data/informasi terkait sumber daya manusia;
4. Data/informasi terkait sumber daya buatan;
5. Data/informasi terkait sumber daya alam;
6. Data/informasi terkait penggunaan lahan;
7. Data/informasi terkait kelembagaan;
8. Data/informasi terkait kondisi ekonomi.

Waktu pelaksanaan pada tahap pengumpulan data dan informasi dilakukan selama 2 (dua) bulan dan pihak yang terlibat adalah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

### 5.1.3. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis dilakukan untuk memahami kondisi unsur-unsur pembentuk ruang serta hubungan sebab akibat terbentuknya kondisi ruang wilayah, dengan memperhatikan kebijaksanaan pembangunan wilayah yang ada. Analisis yang dilakukan meliputi analisis terhadap kondisi sekarang dan kecenderungan di masa depan dengan menggunakan data dan informasi yang dikumpulkan dalam proses pengumpulan data dan informasi. Aspek-aspek yang dianalisis meliputi:

1. Review terhadap RTRW Kota Medan;
2. Analisis kebijakan pembangunan;
3. Analisis sumber daya alam;
4. Analisis sumber daya manusia;
5. Analisis sumber daya buatan;
6. Analisis ekonomi;
7. Analisis penggunaan lahan;
8. Analisis kelembagaan;
9. Analisis kondisi sosial budaya.

Waktu pelaksanaan pada tahap pengolahan dan analisis data dilakukan selama 4 (empat) bulan dan pihak yang terlibat adalah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal serta konsultan.

### 5.1.4. Perumusan Konsepsi RTRW Kabupaten Mandailing Natal

Perumusan konsep RTRW Kabupaten Mandailing Natal diawali dengan identifikasi potensi dan masalah pembangunan. Identifikasi potensi dan masalah pemanfaatan ruang tidak hanya mencakup perhatian pada masa sekarang namun juga potensi dan masalah yang akan mengemukakan di masa depan.



Identifikasi dari potensi dan masalah tersebut membutuhkan terjalannya komunikasi antara perencana dengan representasi masyarakat yang akan terpengaruh oleh rencana. Langkah berikutnya adalah perumusan tujuan pemanfaatan ruang, perumusan strategi dan kebijakan tata ruang Kabupaten Mandailing Natal. Rumusan konsep RTRW Kabupaten Mandailing Natal yang dilengkapi peta dengan tingkat ketelitian skala 1: 500.000 mencakup:

**1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal.**

Tujuan dirumuskan berdasarkan karakteristik wilayah Kabupaten Mandailing Natal, isu strategis, kondisi obyektif yang diinginkan, serta harus jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan. Tujuan tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi yang ada di atasnya maupun peraturan perundang-undangan No. 26 Tahun 2007.

Tujuan penataan ruang Kabupaten Mandailing Natal adalah” *Mewujudkan wilayah Kabupaten Mandailing natal yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, dengan didukung oleh prasarana/infrastruktur yang memadai”.*

Mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, maksudnya adalah bahwa pengalokasian kegiatan dalam penataan ruang Kabupaten Mandailing Natal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kendala dan limitasi wilayah, baik berupa kawasan lindung (hutan lindung, taman nasional, dll), maupun kawasan rawan bencana, sehingga dapat digunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka optimalisasi sumberdaya pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan yang ada, maksudnya adalah bahwa kegiatan budidaya yang akan dialokasikan difokuskan pada kegiatan pertanian, perkebunan dan kelautan, dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan pengembangan sebagai upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.

Didukung oleh prasarana/infrastruktur yang memadai, maksudnya adalah bahwa sistem jaringan/infrastruktur transportasi akan difokuskan pada upaya menciptakan keterhubungan antara pusat-pusat kegiatan budidaya masyarakat, serta sistem jaringan energi dan telekomunikasi akan dikembangkan untuk mendukung kegiatan dunia usaha dan masyarakat. Yang dimaksud memadai disini tidak hanya mencakup kuantitas yang cukup, namun juga kualitas yang layak (transportasi yang cepat, aman, handal, dan terjangkau serta ketersediaan energi dan telekomunikasi yang dapat diandalkan).

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal dirumuskan berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah, karakteristik wilayah, dan kapasitas sumberdaya yang dimiliki wilayah. Kebijakan yang disusun harus dapat mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi, dan mampu menjawab isu-isu strategis tata ruang baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa mendatang.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal merupakan penjabaran dari kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah operasional yang sekaligus berfungsi sebagai arahan dalam menyusun rencana struktur ruang, rencana pola ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Strategi yang dirumuskan selain harus memiliki keterkaitan logis dengan



kebijakan yang telah ditetapkan, juga harus dapat dijabarkan secara spasial ke dalam rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah.

Untuk mencapai tujuan penataan ruang maka kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal :

- a. Pengembangan sektor dan komoditi unggulan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan daya dukung lahan

Strategi dari kebijakan ini adalah:

1. Mengembangkan sistem pertanian terpadu sejak dilahan pertanian/perkebunan (*on farm*), agribisnis hulu, agribisnis hilir, jasa pendukung, serta menawarkan kualitas produk yang tinggi dan memiliki keunggulan kompetitif;
2. Mengembangkan kegiatan pertambangan dan industri bagi kesejahteraan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan;
3. Mengidentifikasi potensi pariwisata dan mengembangkan kegiatan pariwisata berbasis lingkungan.

- b. Pengembangan bagian barat wilayah Kabupaten Mandailing Natal

Strategi dari kebijakan ini adalah:

1. Mengembangkan Pelabuhan Natal sebagai pelabuhan nasional untuk melayani angkutan penumpang dan barang yang merupakan pelabuhan utama tersier;
2. Mengembangkan Pelabuhan Sikara-kara di Natal;
3. Mengembangkan Pelabuhan Teluk Ilalang di Batahan;
4. Mengembangkan pelabuhan khusus perikanan;



5. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian/perkebunan;
6. Mengembangkan kegiatan pariwisata bahari di wilayah pantai natal;
7. Meningkatkan jalan penghubung dan membangun jalan alternatif antara jalan lintas tengah dan jalan pantai barat dengan tidak mengganggu keberadaan Taman Nasional Batang Gadis;
8. Memperhatikan kawasan lindung sekitar pantai sebagai pelindung abrasi.

c. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana/infrastruktur yang mendukung kegiatan dunia usaha dan masyarakat

Strategi dari kebijakan ini adalah:

1. Membangun jaringan jalan yang menghubungkan seluruh kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal;
2. Mengembangkan sistem angkutan umum lokal yang melayani seluruh kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal serta sistem angkutan regional yang melayani pergerakan penumpang dan barang dari dan ke kota-kota di sekitar wilayah Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membangun bandar udara di Bukit Malintang;
4. Memperluas dan meningkatkan ketersediaan jaringan energi dan telekomunikasi ke seluruh kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal.

d. Keberlanjutan kawasan lindung yang mampu mengakomodasi kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Strategi dari kebijakan ini adalah:

1. Melestarikan Taman Nasional Batang Gadis dan kawasan lindung lainnya di wilayah Kabupaten Mandailing Natal;

2. Mengidentifikasi kawasan rawan bencana gempa, gunung api dan tsunami, didukung dengan konsep mitigasi kebencanaan.

## **2. *Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal***

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal menguraikan konsepsi pengembangan, rencana sistem perkotaan, mitigasi bencana alam, rencana sistem jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air.

## **3. *Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal***

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal, berisi rencana kawasan lindung dan budidaya baik untuk wilayah daratan maupun lautan.

## **4. *Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Mandailing Natal***

Kawasan strategis wilayah Kabupaten Mandailing Natal ditetapkan berdasarkan:

1. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Mandailing Natal
2. Mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan.

## **5. *Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal***

Arahan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Mandailing Natal, yang membahas prioritas pemanfaatan ruang, indikasi program utama dan pembiayaan serta kelembagaan.

## **6. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal**

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, ketentuan umum peraturan sistem zonasi, ketentuan umum perizinan, ketentuan umum insentif-desinsentif serta arahan sanksi.

## **7. Peran masyarakat**

Peran masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal dilakukan dalam bentuk:

- a. Pemberian saran dan masukan untuk menentukan arah pengembangan struktur dan pola ruang wilayah yang akan dicapai.
- b. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang wilayah, termasuk perencanaan tata ruang kawasan.
- c. Pemberian masukan dalam merumuskan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal.
- d. Pemberian Informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Mandailing Natal.
- e. Pengajuan keberatan terhadap rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal.
- f. Kerja sama dalam penelitian dan pengembangan, dan atau bantuan tenaga ahli.



Waktu pelaksanaan pada tahap perumusan konsepsi RTRW Kabupaten Mandailing Natal dilakukan selama 6 (enam) bulan dan pihak yang terlibat adalah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, konsultan, tokoh adat, ketua KNPI, ketua KTNA, PT Sorik Marapi Geothermal, PDAM Tirta, Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal.

#### **5.1.5. Penyusunan Raperda RTRW Kabupaten Mandailing Natal**

Kegiatan penyusunan naskah raperda tentang RTRW Kabupaten Mandailing Natal merupakan proses penuangan materi teknis RTRW Kabupaten Mandailing Natal ke dalam bentuk pasal-pasal dengan mengikuti kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan.

Waktu pelaksanaan pada tahap penyusunan raperda dilakukan selama 1 (satu) bulan dan pihak yang terlibat adalah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal serta konsultan.

#### **5.1.6. Penetapan RTRW Kabupaten Mandailing Natal**

Penetapan RTRW Kabupaten Mandailing Natal menjadi Peraturan daerah dilakukan oleh DPRD Kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi. Dalam penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya, maka proses Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2031 melalui beberapa tahapan antara lain:

- 1. Melakukan pembahasan dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota wilayah perbatasan*
- 2. Konsultasi dengan Tim BKPRD Provinsi Sumatera Utara*

3. *Konsultasi dengan Tim BKPRN*
4. *Pembahasan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2031 dengan DPRD*
5. *Penetapan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2031 menjadi Peraturan Daerah.*

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal dalam tahap pembahasan di DPRD. Setelah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2031 ini disahkan melalui Peraturan Daerah, maka RTRWK siap diimplementasikan dan menjadi dokumen perencanaan yang harus dijadikan pegangan atau acuan bagi masyarakat dan pemerintah kabupaten dalam melakukan berbagai kegiatan pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal. Pihak yang terlibat adalah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan DPRD.



#### **5.1.7. Kesimpulan Proses Penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal**

Proses penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal berlandaskan atas asas: keterpaduan, keserasian, keselarasan, keberlanjutan, kebergunaan, kepastian hukum dan keadilan serta asas akuntabilitas.

Proses penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal meliputi persiapan penyusunan, pengumpulan data yang dibutuhkan, pengolahan dan analisis data, perumusan konsepsi, penyusunan raperda dan penetapan tentang RTRW Kabupaten Mandailing Natal. Proses penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal membutuhkan waktu 14 (empat belas) bulan dan selebihnya digunakan untuk proses penetapan RTRW Kabupaten Mandailing Natal

Tahap penyusunan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi aspek politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, keuangan pembangunan daerah, ketersediaan data, dan faktor lainnya. Sehingga perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahap penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan peraturan terkait lainnya (sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini).



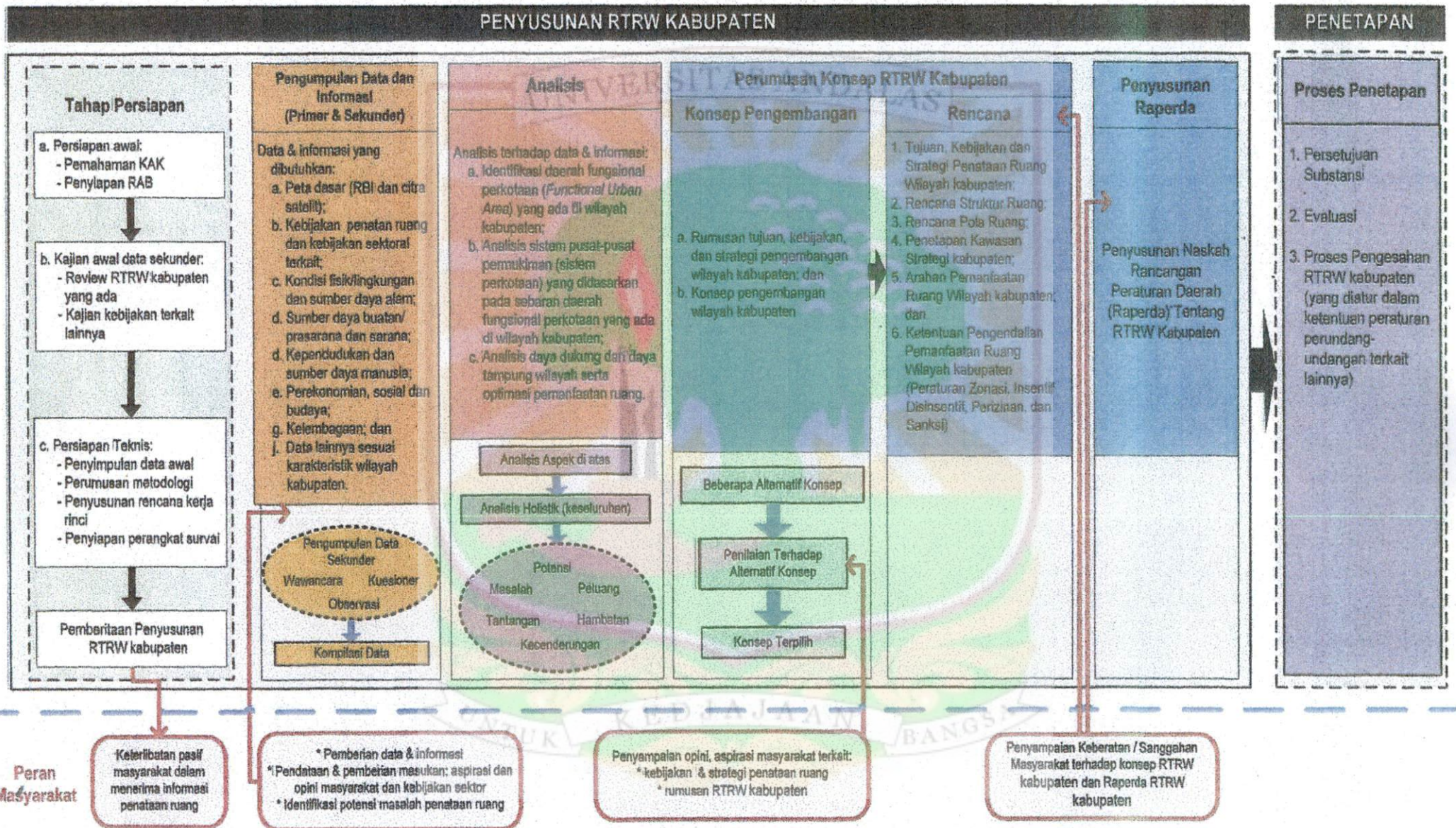
**Tabel 5.1. Proses Penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal**

Proses Kegiatan	Proses Penyusunan		
	Persiapan	Pengumpulan Data & Informasi	Analisis
RINCIAN KEGIATAN	<p>Persiapan penyusunan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan KAK</li> <li>• Penyiapan anggaran biaya</li> <li>• Penyiapan rencana kerja</li> <li>• Penyiapan perangkat survey dan perjalanan dinas</li> <li>• Pemahaman awal wilayah perencanaan</li> <li>• Pemberitaan penyusunan RTRW kepada masyarakat melalui surat undangan</li> </ul>	<p>Pengumpulan data dilakukan dengan survei lapangan, wawancara, penyebaran kuesioner dan survei sekunder kepada instansi – instansi terkait untuk memperoleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data/informasi kebijaksanaan pembangunan</li> <li>• Data/informasi terkait kondisi sosial budaya</li> <li>• Data/informasi terkait sumber daya manusia</li> <li>• Data/informasi terkait sumber daya buatan</li> <li>• Data/informasi terkait sumber daya alam</li> <li>• Data/informasi terkait penggunaan lahan</li> <li>• Data/informasi terkait kelembagaan</li> <li>• Data/informasi terkait kondisi ekonomi</li> </ul>	<p>Aspek-aspek analisis meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Review terhadap RTRW kota medan</li> <li>• Analisis kebijakan Pembangunan</li> <li>• Analisis sumber daya Alam</li> <li>• Analisis sumber daya Manusia</li> <li>• Analisis sumber daya Buatan</li> <li>• Analisis ekonomi</li> <li>• Analisis penggunaan Lahan</li> <li>• Analisis kelembagaan</li> <li>• Analisis kondisi sosial Budaya</li> </ul>
WAKTU PELAKSANAAN	1 bulan	2 bulan	4 bulan
PIHAK TERLIBAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Kab. Madina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Kab. Madina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Kab. Madina</li> <li>• Konsultan</li> </ul>

Proses Kegiatan	Proses Penyusunan		
	Perumusan Konsepsi RTRW	Penyusunan Raperda RTRW Kabupaten	Penetapan RTRW Kabupaten
RINCIAN KEGIATAN	<p>Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mandailing Natal terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang</li> <li>2. Rencana struktur ruang</li> <li>3. Rencana pola ruang</li> <li>4. Penetapan kawasan Strategis</li> <li>5. Arahan pemanfaatan ruang wilayah</li> <li>6. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang</li> <li>7. Peran masyarakat</li> </ol> <p>RTRW Kab. Mandailing Natal dilengkapi dengan peta tingkat ketelitian skala 1 : 500.000.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penuangan materi teknis dalam bentuk pasal-pasal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi dengan Tim BKPRD Provinsi Sumatera Utara</li> <li>2. Konsultasi dengan Tim BKPRN</li> <li>3. Koordinasi dengan Kabupaten/ Kota wilayah perbatasan</li> <li>4. Konsultasi publik dengan melibatkan peran serta masyarakat dan stakeholder Lainnya</li> </ol>
WAKTU PELAKSANAAN	6 bulan	1 bulan	Masih Dalam Pembahasan di DPRD
PIHAK TERLIBAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Kab. Madina</li> <li>• Konsultan</li> <li>• Tokoh adat</li> <li>• Ketua KNPI</li> <li>• Ketua KTNA</li> <li>• PT Sorik Marapi Geothermal Power</li> <li>• PDAM Tirta Kab. Madina</li> <li>• BPN</li> <li>• Kementerian Agama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Kab. Madina</li> <li>• Konsultan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Kab. Madina</li> <li>• DPRD</li> </ul>



Gambar 5.1. Proses Penyusunan RTRW Kabupaten



**Peran Masyarakat**

Keterlibatan pasif masyarakat dalam menerima informasi penataan ruang

\* Pemberian data & informasi  
\* Pendataan & pemberian masukan, aspirasi dan opini masyarakat dan kebijakan sektor  
\* Identifikasi potensi masalah penataan ruang

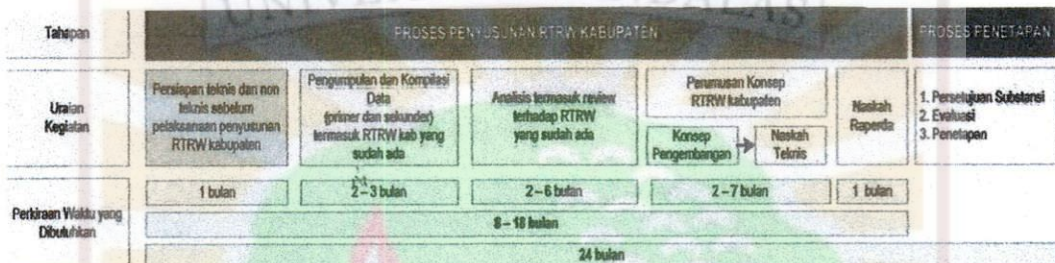
Penyampaian opini, aspirasi masyarakat terkait:  
\* kebijakan & strategi penataan ruang  
\* rumusan RTRW kabupaten

Penyampaian Keberatan / Sanggahan Masyarakat terhadap konsep RTRW kabupaten dan Raperda RTRW kabupaten



Keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk proses penyusunan dan penetapan RTRW kabupaten diupayakan seefektif mungkin, maksimal selama 24 (dua puluh empat) bulan. Proses penyusunan RTRW kabupaten membutuhkan waktu antara 8 (delapan) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dan selebihnya digunakan untuk proses penetapan sebagaimana pada gambar berikut ini.

Gambar 5.2. Jangka Waktu Penyusunan RTRW Kabupaten



Sumber : Peraturan Menteri PU No. 16/PRT/M/2009

Untuk memperoleh efektivitas dalam implementasi RTRW Kabupaten Mandailing Natal ini, maka dibutuhkan peran masyarakat, baik dalam pelaksanaan maupun pengendaliannya.

Partisipasi masyarakat telah disadari merupakan komponen yang penting dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana terurai pada bab-bab terdahulu, namun diakui oleh banyak pihak dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat sering terkendala. Pembahasan tentang kajian partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang Kabupaten Mandailing Natal terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal; (2) partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan RTRW Kabupaten Mandailing Natal; (3) partisipasi masyarakat dalam pengendalian RTRW Kabupaten Mandailing Natal.

## **5.2. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal**

Pada sub bab ini dibahas mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang Kabupaten Mandailing Natal, yang meliputi:

- a. Masukan mengenai:
  1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
  4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan atau
  5. Penetapan rencana tata ruang.

- b. Kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, peran serta masyarakat harus terlibat dalam seluruh proses dimulai dari tahap persiapan sampai pada tahap pengesahan. Untuk itu, Pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal harus selalu mengundang masyarakat (misal: anggota DPRD, LSM, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, ikatan profesi) untuk ikut terlibat dalam setiap tahapan penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal.

#### **5.2.1. Partisipasi Masyarakat Dalam Persiapan Penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal**

Persiapan penyusunan rencana tata ruang merupakan kegiatan untuk mempersiapkan penyusunan rencana tata ruang dalam satu wilayah tertentu termasuk penyusunan kerangka acuan (*Terms of Reference*) yang memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, serta sumber pembiayaan).

Wujud peran serta masyarakat dalam persiapan penyusunan dimulai dengan mengetahui penyusunan RTRW Kabupaten melalui pengumuman. Pengumuman tersebut menjadi kewajiban dari pihak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, dan dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan forum pertemuan.

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam persiapan penyusunan rencana tata ruang Kabupaten Mandailing Natal dilakukan dengan mengundang masyarakat untuk menghadiri rapat pertemuan di aula Bappeda Kabupaten Mandailing Natal. Pemberian informasi pengumuman kepada masyarakat tentang persiapan penyusunan rencana tata ruang belum



dilakukan melalui media cetak dan elektronik disamping lewat forum pertemuan sampai ke wilayah perencanaan sehingga masyarakat tidak mengetahui tujuan dan sasaran dari penyusunan rencana tata ruang Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dalam tabel berikut ini.

**Tabel 5.2. Partisipasi Masyarakat Dalam Persiapan Penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal**

	Teori	Fakta	Kesimpulan
Tahap Persiapan	<p>a. Wujud peran serta masyarakat dalam persiapan penyusunan dimulai dengan mengetahui penyusunan melalui pengumuman</p> <p>b. Pengumuman tersebut dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan forum pertemuan</p>	<p>a. Masyarakat tidak mengetahui penyusunan RTRW Kab. Mandailing Natal</p>	<p>a. Wujud peran serta masyarakat dalam persiapan penyusunan dimulai dengan mengetahui penyusunan melalui pengumuman</p> <p>b. Pengumuman tersebut dilakukan melalui media cetak, elektronik dan forum pertemuan, sehingga semua masyarakat mengetahui ada penyusunan RTRW Kab. Mandailing Natal</p>

### 5.2.2. Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Mandailing Natal

Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan merupakan kegiatan untuk menentukan arah pengembangan wilayah atau kawasan yang akan dicapai ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya, daya dukung, dan daya tampung lingkungan serta fungsi pertahanan keamanan.

Menurut Plumer (dalam suryawan, 2004), beberapa faktor yang mendorong masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

a) Pengetahuan dan keahlian

Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut, hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada.

b) Pekerjaan masyarakat

Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi.

c) Tingkat pendidikan dan buta huruf

Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.

d) Jenis kelamin

Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan.

e) Kepercayaan terhadap budaya tertentu

Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan



serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

Faktor yang mendorong partisipasi masyarakat adalah faktor kesadaran dalam diri masing-masing masyarakat didukung dengan faktor pendidikan dan faktor penghasilan. Semakin tinggi latar belakang pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan. Faktor pendidikan dianggap penting karena dengan melalui pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap inovasi.

Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Tingkat penghasilan yang mencukupi akan mempengaruhi waktu luang masyarakat karena mereka tidak disibukkan lagi dengan mencari tambahan penghasilan sehingga lebih aktif untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan. Dari hasil kuesioner diperoleh bahwa penghasilan responden sebagian besar berada pada tingkat yang rendah.

Sementara peran swasta boleh dikatakan sebagai jembatan untuk menyerap aspirasi masyarakat agar dapat dimasukkan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam rencana kabupaten sehingga diperlukan komunikasi antara penentu kebijakan (pemerintah), peran swasta dan masyarakat.

Sesuai dengan pendapat Conyers (1994), bahwa pertama, masyarakat tidak akan berpartisipasi atas kemauan sendiri atau dengan antusias yang tinggi kalau mereka merasa bahwa partisipasi tidak mempunyai pengaruh pada rencana akhir, dan kedua, masyarakat merasa enggan berpartisipasi dalam kegiatan yang tidak



menarik minat atau aktivitas yang tidak mempunyai pengaruh langsung yang dapat mereka rasakan. Senada dengan pendapat Santosa dan Heroepoetri (2005), bahwa salah satu manfaat dari partisipasi masyarakat adalah bahwa masyarakat bisa menjadi sumber informasi yang berguna. Masyarakat sekitar dalam keadaan tertentu akan menjadi pakar yang baik karena belajar dari pengalaman atau karena pengalaman yang didapatnya dari kegiatan sehari-hari. Keunikan dari partisipasi adalah masyarakat dapat mewakili pengetahuan lokal yang berharga yang belum tentu dimiliki pakar lainnya, sehingga pengetahuan itu haruslah termuat dalam proses pembuatan keputusan.

Sementara itu dari jawaban responden atas pertanyaan terbuka kuesioner tentang persepsi masyarakat terhadap partisipasi yang telah dilaksanakan pemerintah daerah, sebagian besar responden menyatakan masih kurang memadai karena pemberian informasi pemerintah kepada masyarakat dianggap masih kurang mencukupi, jumlah masyarakat yang terlibat atau dilibatkan baru sedikit dan juga jumlah stakeholder lain yang terlibat atau dilibatkan jumlahnya masih terlalu sedikit.

Dengan melihat persepsi masyarakat terhadap partisipasi yang demikian, maka jawaban terbuka kuesioner, masyarakat berharap agar di masa-masa mendatang ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang. Sebagian besar responden berharap agar ada peningkatan penyebarluasan informasi rencana penyusunan tata ruang melalui media cetak dan elektronik, peningkatan pembinaan pemerintah kepada masyarakat lewat penyuluhan atau sosialisasi, peningkatan jumlah masyarakat dan stakeholder lain yang terlibat dalam partisipasi pada setiap penyusunan rencana tata ruang. Hal ini

juga terungkap dari hasil wawancara dengan Dinas PU, Perguruan Tinggi, dan Camat Panyabungan Kota serta diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bappeda bahwa dimasa mendatang, proses pelibatan/partisipasi masyarakat akan dilakukan dengan undangan kepada perwakilan masyarakat yang terpilih.

Dalam penentuan arah pengembangan wilayah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mandailing Natal, dengan mengemukakan masukan usulan rencana yang komprehensif, sinergis, dan terkoordinasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun tujuan dalam mengemukakan masukan/saran/usul pada penentuan arah pengembangan wilayah Rencana Tata Ruang Kabupaten Mandailing Natal adalah:

- a. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku (ujung tombak) dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi (termasuk dalam penataan ruang).
- b. Memfasilitasi masyarakat agar menjadi pelaku dalam proses taru (Pemerintah sebagai fasilitator, dan menghormati hak masyarakat,serta menghargai kearifan lokal/keberagaman budayanya).
- c. Mendorong agar stakeholder mampu bertindak secara transparans, akuntabel dan profesional dalam proses penataan ruang(terutama dalam perencanaan tata ruang).
- d. Mendorong perkuatan kelembagaan yang mewadahi berbagai aspirasi dari berbagai stakeholder.

Partisipasi masyarakat dalam penentuan arah pengembangan wilayah Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 5.3. Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Mandailing Natal**

	Teori	Fakta	Kesimpulan
Tahap Penentuan Arah Pengembangan Wilayah	a. Wujud peran serta masyarakat untuk menentukan arah pengembangan wilayah di tinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya, daya dukung, dan daya tampung lingkungan serta fungsi pertahanan keamanan	a. Masyarakat tidak ikut terlibat dalam penyusunan RTRW Kab. Mandailing Natal sehingga penentuan arah pengembangan wilayah tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat baik dari aspek ekonomi, sosial budaya, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi pertahanan keamanan b. Pemberian informasi kepada masyarakat tentang penyusunan RTRW tidak ada melalui media cetak dan elektronik c. Dalam penyusunan RTRW tidak ada mengadakan penyuluhan maupun sosialisasi	a. Wujud peran serta masyarakat untuk menentukan arah pengembangan wilayah di tinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi pertahanan keamanan b. Dalam mengemukakan masukan saran yang komprehensif, sinergis dan terkoordinasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, keberagaman budaya dan menghargai kearifan lokal c. Peningkatan penyebarluasan informasi rencana penyusunan tata ruang melalui media cetak dan elektronik d. Peningkatan pembinaan pemerintah kepada masyarakat lewat penyuluhan dan sosialisasi dan peningkatan jumlah masyarakat dan stakeholder yang terlibat dalam partisipasi pada setiap penyusunan rencana tata ruang



### **5.2.3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengidentifikasian Potensi dan Masalah Pembangunan Wilayah Kabupaten Mandailing Natal**

Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan merupakan kegiatan untuk mengidentifikasikan berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam satu wilayah atau kawasan perencanaan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang.

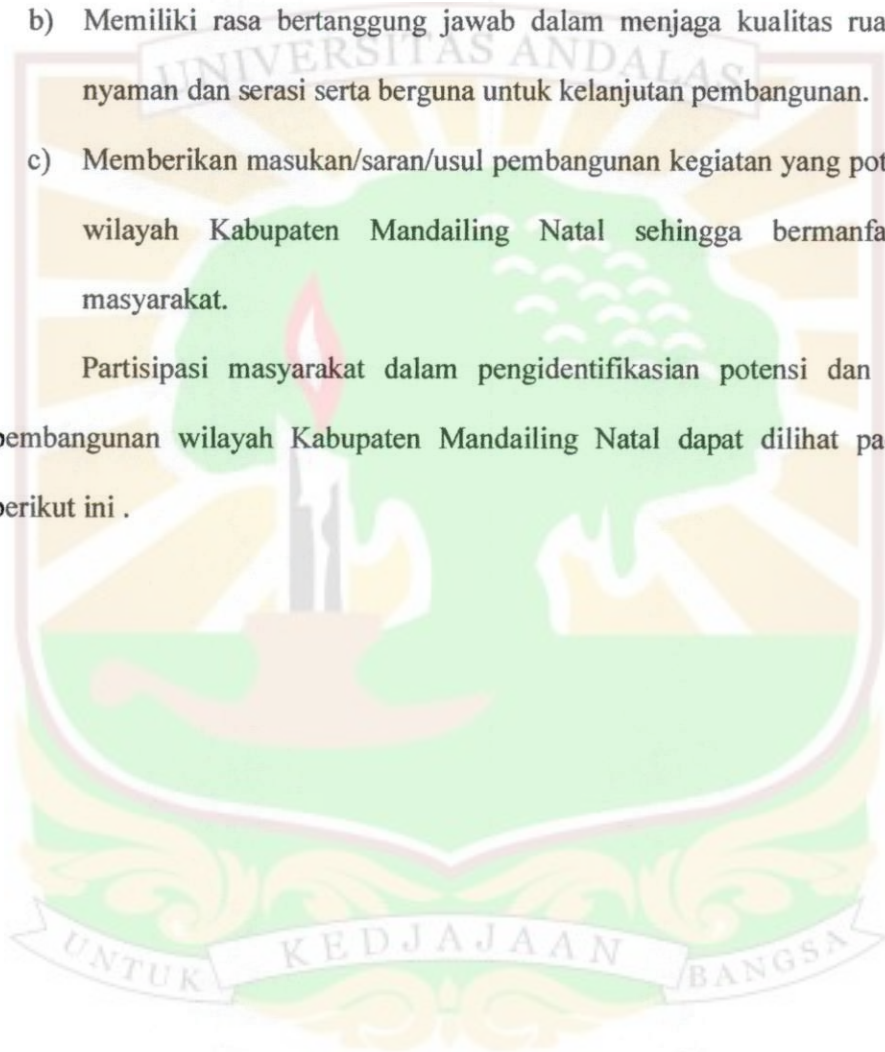
Berdasarkan hasil analisis dengan responden terkait, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah Kabupaten Mandailing Natal dilakukan, dimana masyarakat diperkenankan memberikan masukan/saran/usul.

Dengan adanya sumbangan masukan berarti partisipasi telah memberikan ruang dan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan haknya masyarakat, serta mengembangkan potensi dan prakarsa lokal. Hak dan tindakan masyarakat menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan pemerintah, tujuannya adalah mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun menentukan agenda bersama untuk penyusunan rencana tata ruang kabupaten. Dalam hal ini partisipasi masyarakat digunakan sebagai alat komunikasi, yaitu alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan, agar diwujudkan keputusan yang responsif. Sebuah perencanaan yang responsif menurut Mc. Connel (1981) dalam Santosa dan Heroepoetri (2005) adalah proses pengambilan keputusan tentang perencanaan tata ruang yang tanggap pada preferensi serta kebutuhan dari masyarakat yang potensial terkena dampak apabila perencanaan tersebut diimplementasikan.

Adapun tujuan pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan Kabupaten Mandailing Natal adalah:

- a) Memberikan solusi dari masalah rencana tata ruang Kabupaten Mandailing Natal sehingga terhindar dari spekulasi dan distribusi alokasi ruang untuk kegiatan tertentu saja.
- b) Memiliki rasa bertanggung jawab dalam menjaga kualitas ruang yang nyaman dan serasi serta berguna untuk kelanjutan pembangunan.
- c) Memberikan masukan/saran/usul pembangunan kegiatan yang potensial di wilayah Kabupaten Mandailing Natal sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada tabel berikut ini .



**Tabel 5.4. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengidentifikasian Potensi dan Masalah Pembangunan Wilayah Kabupaten Mandailing Natal**

	Teori	Fakta	Kesimpulan
Tahap Pengidentifikasian Potensi dan Masalah Pembangunan Wilayah	a. Wujud peran serta masyarakat untuk mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan serta bantuan memperjelas hak atas ruang	a. Masyarakat yang ikut dalam memberikan masukan/saran/usul untuk mengembangkan potensi dan masalah pembangunan wilayah rencana tata ruang Kab. Mandailing Natal yakni: - Monang Nst : Ketua KTNA - H. Kholihul Yakim Nst : BPA - Sutan Naposo : BPA - Mulyadi : Ketua KNPI - Darto : Sekretaris KNPI	a. Dalam memberikan masukan/ saran/usul pada tahap pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah: setiap kecamatan di Mandailing Natal ada perwakilan untuk daerah kecamatan masing-masing, guna : - Memberikan solusi sehingga terhindar dari spekulasi dan distribusi alokasi ruang untuk kegiatan tertentu saja - Memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga kualitas ruang yang nyaman dan serasi b. Sebaiknya jumlah masyarakat ada 46 orang karena di Mandailing Natal ada 23 Kecamatan x 2 orang untuk menjadi utusan setiap kecamatan c. Jumlah masyarakat yang hadir 5 (lima) orang tersebut sudah memenuhi syarat sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan mereka bertempat tinggal didesa yang bersangkutan, berumur diatas 25 tahun, pendidikan mereka diatas SLTP



#### **5.2.4. Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Konsepsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal**

Konsepsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
3. Rencana pola ruang wilayah kabupaten;
4. Penetapan kawasan strategis;
5. Arahan pemanfaatan ruang;
6. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
7. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mandailing Natal dilengkapi dengan peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000.

Berdasarkan hasil analisis dengan responden terkait, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam perumusan konsepsi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mandailing Natal dilakukan, dimana telah ada komunikasi dengan masyarakat namun masih bersifat terbatas, inisiatif datang dari pemerintah (pemegang kekuasaan) dan hanya satu arah.

Dalam menetapkan konsep pada penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten Mandailing Natal dilakukan melalui rapat di Aula Bappeda dengan melibatkan dinas/instansi terkait dan masyarakat dengan memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang. Adapun tujuan dalam menetapkan konsep pada penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten Mandailing Natal adalah: Agar kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Partisipasi masyarakat dalam perumusan konsepsi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mandailing Natal dapat di lihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.5. Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Konsepsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal**

	Teori	Fakta	Kesimpulan
Tahap Perumusan Konsepsi	<p>a. Wujud peran serta masyarakat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang</li> <li>- Rencana struktur ruang</li> <li>- Rencana pola ruang</li> <li>- Penetapan kawasan strategis</li> <li>- Arahana pemanfaatan ruang</li> <li>- Arahana pengendalian pemanfaatan ruang</li> </ul>	<p>a. Masyarakat diperkenankan memberikan masukan/saran/usul untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang</li> <li>- Rencana struktur ruang</li> <li>- Rencana pola ruang</li> <li>- Penetapan kawasan strategis</li> <li>- Arahana pemanfaatan ruang</li> <li>- Arahana pengendalian pemanfaatan ruang</li> </ul> <p>b. Komunikasi telah ada namun bersifat terbatas, inisiatif datang dari pemerintah (pemegang kekuasaan) dan keputusan ada di tangan pemegang kekuasaan</p> <p>c. Masyarakat yang ikut dalam memberikan masukan/saran/usul untuk perumusan konsepsi rencana tata ruang Kab. Mandailing Natal yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monang Nst : Ketua KTNA</li> <li>- H. Kholihul Yakim Nst : BPA</li> <li>- Sutan Naposo : BPA</li> <li>- Mulyadi : Ketua KNPI</li> <li>- Darto : Sekretaris KNPI</li> </ul>	<p>a. Dalam memberikan masukan/ saran/usul pada tahap perumusan konsepsi : setiap kecamatan di Mandailing Natal ada perwakilan untuk daerah kecamatan masing-masing, guna :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat</li> </ul> <p>b. Sebaiknya jumlah masyarakat ada 46 orang karena di Mandailing Natal ada 23 Kecamatan x 2 orang untuk menjadi utusan setiap kecamatan</p> <p>c. Jumlah masyarakat yang hadir 5 (lima) orang tersebut sudah memenuhi syarat sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan mereka bertempat tinggal didesa yang bersangkutan, berumur diatas 25 tahun, pendidikan mereka diatas SLTP</p>



#### **5.2.5. Partisipasi Masyarakat Dalam Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal**

Dalam memberikan persetujuan terhadap rancangan Rencana Tata Ruang Kabupaten Mandailing Natal dilakukan melalui rapat di Aula Bappeda dengan melibatkan dinas/instansi terkait dan masyarakat dalam memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana mengenai kebijakan pemanfaatan ruang. Adapun tujuan dalam memberikan persetujuan terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten Mandailing Natal adalah:

- a. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan.
- b. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan.

Bentuk dari persetujuan terhadap rancangan Rencana Tata Ruang Kabupaten Mandailing Natal adalah: Surat dari Kementerian PU No. HK.01 03-Dr/1004 tanggal 30 Desember 2011. Perihal, Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Mandailing Natal tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2031.

Indikator dalam memberikan persetujuan terhadap rancangan Rencana Tata Ruang Kabupaten Mandailing Natal diantaranya yaitu:

- a. Konsultasi publik dengan melibatkan peran serta masyarakat dan stakeholder lainnya.
- b. Melakukan pembahasan dan koordinasi dengan kabupaten/kota wilayah perbatasan.
- c. Konsultasi dengan Tim BKPRD Provinsi Sumatera Utara dan BKPRN



Penetapan RTRW Kabupaten menjadi Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD Kabupaten. Langkah awal dari proses penetapan RTRW Kabupaten dimulai dengan mempresentasikan konsep akhir rencana tata ruang oleh tim penyusun di hadapan DPRD Kabupaten untuk dibahas sebagai rancangan Perda. Selanjutnya, konsep rencana tata ruang yang telah disempurnakan ditetapkan sebagai suatu Perda melalui sidang paripurna DPRD Kabupaten.

Partisipasi masyarakat dalam penetapan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.6. Partisipasi Masyarakat Dalam Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal**

	Teori	Fakta	Kesimpulan
Tahap Penetapan	<p>a. Wujud peran serta masyarakat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyampaikan pendapat : setuju, keberatan/sanggahan terhadap konsep RTRW dan Raperda RTRW Kab</li> </ul>	<p>a. Masyarakat tidak ada diundang</p>	<p>a. Masyarakat harus diundang untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyampaikan pendapat setuju, keberatan/sanggahan terhadap konsep RTRW dan Raperda RTRW Kab</li> </ul> <p>b. Komunikasi telah ada namun bersifat terbatas, inisiatif datang dari pemerintah (pemegang kekuasaan) dan keputusan ada di tangan pemegang kekuasaan</p>

#### **5.2.6. Kesimpulan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal**

Dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, partisipasi masyarakat masih kurang dalam seluruh proses yang dimulai dari tahap persiapan sampai pada tahap pengesahan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal harus selalu mengundang representasi masyarakat (misal: tokoh masyarakat, LSM, perguruan tinggi, ikatan profesi) untuk ikut terlibat dalam setiap tahapan penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal

Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal dapat berupa:

- a. Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah;
- b. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan;
- c. Pemberian masukan dalam perumusan konsepsi hendaknya diperhatikan;
- d. Pemberian informasi atau pendapat dalam penyusunan strategi penataan ruang melalui media cetak dan elektronik;
- e. Penyampaian pembinaan penyuluhan atau sosialisasi;
- f. Jangka waktu untuk memberikan masukan/saran/usul hendaknya mencukupi;
- g. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan.

Peran serta masyarakat dalam tahap penyusunan RTRW kabupaten Mandailing Natal dapat dilakukan pada langkah-langkah penentuan arah pengembangan, identifikasi potensi dan masalah pembangunan, perumusan rencana, hingga penetapan rencana sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 5.7. Kesimpulan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal**

	Teori	Fakta	Kesimpulan
Tahap Persiapan	<p>a. Wujud peran serta masyarakat dalam persiapan penyusunan dimulai dengan mengetahui penyusunan melalui pengumuman</p> <p>b. Pengumuman tersebut dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan forum pertemuan</p>	<p>a. Masyarakat tidak mengetahui penyusunan RTRW Kab. Mandailing Natal</p>	<p>a. Wujud peran serta masyarakat dalam persiapan penyusunan dimulai dengan mengetahui penyusunan melalui pengumuman</p> <p>b. Pengumuman tersebut dilakukan melalui media cetak, elektronik dan forum pertemuan, sehingga semua masyarakat mengetahui ada penyusunan RTRW Kab. Mandailing Natal</p>
Tahap Penentuan Arah Pengembangan Wilayah	<p>a. Wujud peran serta masyarakat untuk menentukan arah pengembangan wilayah di tinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya, daya dukung, dan daya tampung lingkungan serta fungsi pertahanan keamanan</p>	<p>a. Masyarakat tidak ikut terlibat dalam penyusunan RTRW Kab. Mandailing Natal sehingga penentuan arah pengembangan wilayah tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat baik dari aspek ekonomi, sosial budaya, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi pertahanan keamanan</p> <p>b. Pemberian informasi kepada masyarakat tentang penyusunan RTRW tidak ada melalui media cetak dan elektronik</p> <p>c. Dalam penyusunan RTRW tidak ada mengadakan penyuluhan maupun sosialisasi</p>	<p>a. Wujud peran serta masyarakat untuk menentukan arah pengembangan wilayah di tinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi pertahanan keamanan</p> <p>b. Dalam mengemukakan masukan saran yang komprehensif, sinergis dan terkoordinasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, keberagaman budaya dan menghargai kearifan lokal</p> <p>c. Peningkatan penyebarluasan informasi rencana penyusunan tata ruang melalui media cetak dan elektronik</p> <p>d. Peningkatan pembinaan pemerintah kepada masyarakat lewat penyuluhan dan sosialisasi dan peningkatan jumlah masyarakat dan stakeholder yang terlibat dalam partisipasi pada setiap penyusunan rencana tata ruang</p>



	Teori	Fakta	Kesimpulan
Tahap Pengidentifikasian Potensi dan Masalah Pembangunan Wilayah	a. Wujud peran serta masyarakat untuk mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan serta bantuan memperjelas hak atas ruang	a. Masyarakat yang ikut dalam memberikan masukan/saran/usul untuk mengembangkan potensi dan masalah pembangunan wilayah rencana tata ruang Kab. Mandailing Natal yakni: - Monang Nst : Ketua KTNA - H. Kholihul Yakim Nst : BPA - Sutan Naposo : BPA - Mulyadi : Ketua KNPI - Darto : Sekretaris KNPI	a. Dalam memberikan masukan/saran/usul pada tahap pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah: setiap kecamatan di Mandailing Natal ada perwakilan untuk daerah kecamatan masing-masing, guna : - Memberikan solusi sehingga terhindar dari spekulasi dan distribusi alokasi ruang untuk kegiatan tertentu saja - Memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga kualitas ruang yang nyaman dan serasi b. Sebaiknya jumlah masyarakat ada 46 orang karena di Mandailing Natal ada 23 Kecamatan x 2 orang untuk menjadi utusan setiap kecamatan c. Jumlah masyarakat yang hadir 5 (lima) orang tersebut sudah memenuhi syarat sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan mereka bertempat tinggal didesa yang bersangkutan, berumur diatas 25 tahun, pendidikan mereka diatas SLTP

	Teori	Fakta	Kesimpulan
Tahap Perumusan Konsep	<p>a. Wujud peran serta masyarakat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang</li> <li>- Rencana struktur ruang</li> <li>- Rencana pola ruang</li> <li>- Penetapan kawasan strategis</li> <li>- Arahan pemanfaatan ruang</li> <li>- Arahan pengendalian pemanfaatan ruang</li> </ul>	<p>a. Masyarakat diperkenankan memberikan masukan/saran/usul untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang</li> <li>- Rencana struktur ruang</li> <li>- Rencana pola ruang</li> <li>- Penetapan kawasan strategis</li> <li>- Arahan pemanfaatan ruang</li> <li>- Arahan pengendalian pemanfaatan ruang</li> </ul> <p>b. Komunikasi telah ada namun bersifat terbatas, inisiatif datang dari pemerintah (pemegang kekuasaan) dan keputusan ada di tangan pemegang kekuasaan</p> <p>c. Masyarakat yang ikut dalam memberikan masukan/saran/usul untuk perumusan konsepsi rencana tata ruang Kab. Mandailing Natal yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monang Nst : Ketua KTNA</li> <li>- H. Kholihul Yakim Nst : BPA</li> <li>- Sutan Naposo : BPA</li> <li>- Mulyadi : Ketua KNPI</li> <li>- Darto : Sekretaris KNPI</li> </ul>	<p>a. Dalam memberikan masukan/ saran/usul pada tahap perumusan konsepsi : setiap kecamatan di Mandailing Natal ada perwakilan untuk daerah kecamatan masing-masing, guna :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat</li> </ul> <p>b. Sebaiknya jumlah masyarakat ada 46 orang karena di Mandailing Natal ada 23 Kecamatan x 2 orang untuk menjadi utusan setiap kecamatan</p> <p>c. Jumlah masyarakat yang hadir 5 (lima) orang tersebut sudah memenuhi syarat sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan mereka bertempat tinggal didesa yang bersangkutan, berumur diatas 25 tahun, pendidikan mereka diatas SLTP</p>
	Teori	Fakta	Kesimpulan
Tahap Penetapan	<p>a. Wujud peran serta masyarakat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyampaikan pendapat : setuju, keberatan/sanggahan terhadap konsep RTRW dan Raperda RTRW Kab</li> </ul>	<p>a. Masyarakat tidak ada diundang</p>	<p>a. Masyarakat harus diundang untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyampaikan pendapat setuju, keberatan/sanggahan terhadap konsep RTRW dan Raperda RTRW Kab</li> </ul> <p>b. Komunikasi telah ada namun bersifat terbatas, inisiatif datang dari pemerintah (pemegang kekuasaan) dan keputusan ada di tangan pemegang kekuasaan</p>

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan evaluasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal yaitu:

- a. Proses penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal meliputi tahapan-tahapan berikut: persiapan penyusunan, pengumpulan data yang dibutuhkan, pengolahan dan analisis data, perumusan konsepsi RTRW Kabupaten Mandailing Natal, serta penyusunan raperda tentang RTRW Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Pemberitaan penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal dan pemberian informasi kepada masyarakat melalui surat undangan.
- c. Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang Kabupaten Mandailing Natal adalah bentuk sumbangan masukan/saran/usul. Karena prosesnya kurang transparan dan tidak tersosialisasi dengan baik, masyarakat kurang antusias untuk berpartisipasi, dan akibatnya masukan/saran/usul pendapat dari masyarakat masih banyak yang tidak terakomodasi.
- d. Partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor kesadaran dari masing-masing masyarakat dan didukung dengan faktor penghasilan dan faktor pendidikan. Tingkat penghasilan yang mencukupi akan memberikan waktu luang masyarakat karena mereka tidak disibukkan lagi dengan mencari tambahan penghasilan sehingga lebih aktif dalam pembangunan,



misalnya dalam hal menghadiri pertemuan dan semakin tinggi latar belakang pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan serta dalam pemberian informasi oleh pemerintah masih kurang dan peran pihak swasta juga masih kurang terlibat dalam penyusunan rencana tata ruang Kabupaten Mandailing Natal.

## 6.2. Saran

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat disampaikan saran yang berupa usulan bagi upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang Kabupaten Mandailing Natal selanjutnya, yaitu:

- a. Dalam rangka penerapan prinsip transparansi diperlukan keterbukaan dalam setiap aspek dan tahap perencanaan untuk menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu dalam proses penyusunan rencana tata ruang, pemberian informasi pengumuman kepada masyarakat tentang rencana penyusunan tata ruang dan rancangan rencana tata ruang, hendaknya dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik disamping lewat forum pertemuan sampai ke wilayah perencanaan.
- b. Dengan cara melakukan pengumuman melalui media cetak, elektronik, dan forum pertemuan, hendaknya sifat pelibatan masyarakat bukan lagi atas dasar inisiatif pemerintah semata tetapi ditingkatkan lagi menjadi partisipasi dengan inisiatif dari masyarakat sendiri.
- c. Jangka waktu untuk memberikan masukan/saran/usul/pertimbangan hendaknya diberikan jangka waktu yang mencukupi, agar dapat

mengakomodasi masukan masyarakat dan stakeholder lain lebih banyak lagi dalam upaya untuk mendapatkan dukungan dan komitmen yang lebih banyak pula.

- d. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan rencana tata ruang, dapat dilakukan lewat peningkatan pembinaan melalui penyuluhan atau sosialisasi, dan pemerintah perlu berinisiatif untuk meningkatkan kualitas seluruh stakeholder dalam perencanaan, termasuk unsur pemerintah sendiri, karena dengan kualitas yang setara diantara para stakeholder akan menghindari konflik karena kepentingan individu maupun golongan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abe, A. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif. Pembaruan. Yogyakarta.
- Arnstein, S. 1969. A Ladder of Citizen Participation. JAIP, Volume 35, No. 4, juli 1969.
- Bryan, C and Louise G. White. 1987. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. LP3ES. Jakarta.
- Conyers, D. 1994. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar Terjemahan Susetiwawan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haeruman, H. 2004. Penataan Ruang Dalam Era Otonomi Daerah Yang Diperluas. Available from <http://www.bktrn.org>: Internet.
- Ibrahim, S. 2004. Paradigma Baru Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Available from <http://www.bktrn.org>: Internet.
- Imparato, I and Jeff Ruster. 2003. Slum Upgrading and Participation: Lesson from Latin America. Washington, D.C: The World Bank.
- Kartasasmita, G. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan CIDES, Jakarta.
- Marzuki. 2002. Metodologi Riset. BPFE-UII. Yogyakarta.
- Miles, M B and A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metoda-Metoda Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit UI Press.
- Nazir, M. 1988. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Munawaroh, S. Prosedur Penyusunan Rencana Tata Ruang. Diunduh Tanggal 7 Maret 2013 dari <http://aisitimunawaroh.blogspot.com/2012/05/prosedur-penyusunan-rencana-tata-ruang.html>.
- Panudju, B. 1999. Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Bandung: Penerbit Alumni.
- Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.



- Permendagri Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.
- Sanoff, H. 2000. *Community Participation Methods in Design and Planning*. Toronto: John Wiley & Sons, Inc.
- Santosa, M. A and Arimbi Heroepoetri. 2005. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan. Available from <http://www.pacific.net.id>: Internet.
- Sastropetro, S. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Schubeler, P. 1996. *Participation and Partnership in Urban Infrastructure Management*. Washington, D.C: The World Bank.
- Siahaan, E. I. 2002. *Filosofi Perencanaan Pembangunan Kota Sesuai Paradigma Baru di Indonesia: Hakikat Ilmu Untuk Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat*. Makalah Falsafah Sains (PPs 702) Program Pasca Sarjana/S3. Institut Pertanian Bogor Agustus 2002. Available from <http://www.rudycr.tripod.com>; Internet.
- Slamet, Y. 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Soefaat, et al. 1998. *Kamus Tata Ruang*. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia.
- Soetrisno, L. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suciati, 2006. *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati*. Program Studi Pembangunan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sujarto, D. 1985. *Proses Perencanaan*. Departemen Planologi FTSP Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Sunarti. 2003. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Perumahan Secara Berkelompok*, Jurnal Tata Loka Volume 5, No. 1, Januari 2003.
- Tarigan, R. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Beserta Penjelasannya.

Www.Penataan Ruang.Com/Penataan Ruang Kawasan-Perdesaan. Html. Diunduh Tanggal 15 Februari 2013.

Www. 2frameit.blogspot.com/2013/05/Hambatan Dalam Partisipasi Masyarakat. Html. Diunduh Tanggal 3 Juli 2013.

Yeung, Y. M and T. G. Mc Gee. 1986 (eds). Community Participation in Delivering Urban Services in Asia. Ottawa: IDRC.

Yulianti, R. 2000. Efektivitas Metode Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Limbah Perkotaan di Perumnas Mojosongo Surakarta. Program Studi Pembangunan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.



## KUESIONER UNTUK MASYARAKAT

### A. FAKTOR INTERNAL

#### Petunjuk Pengisian

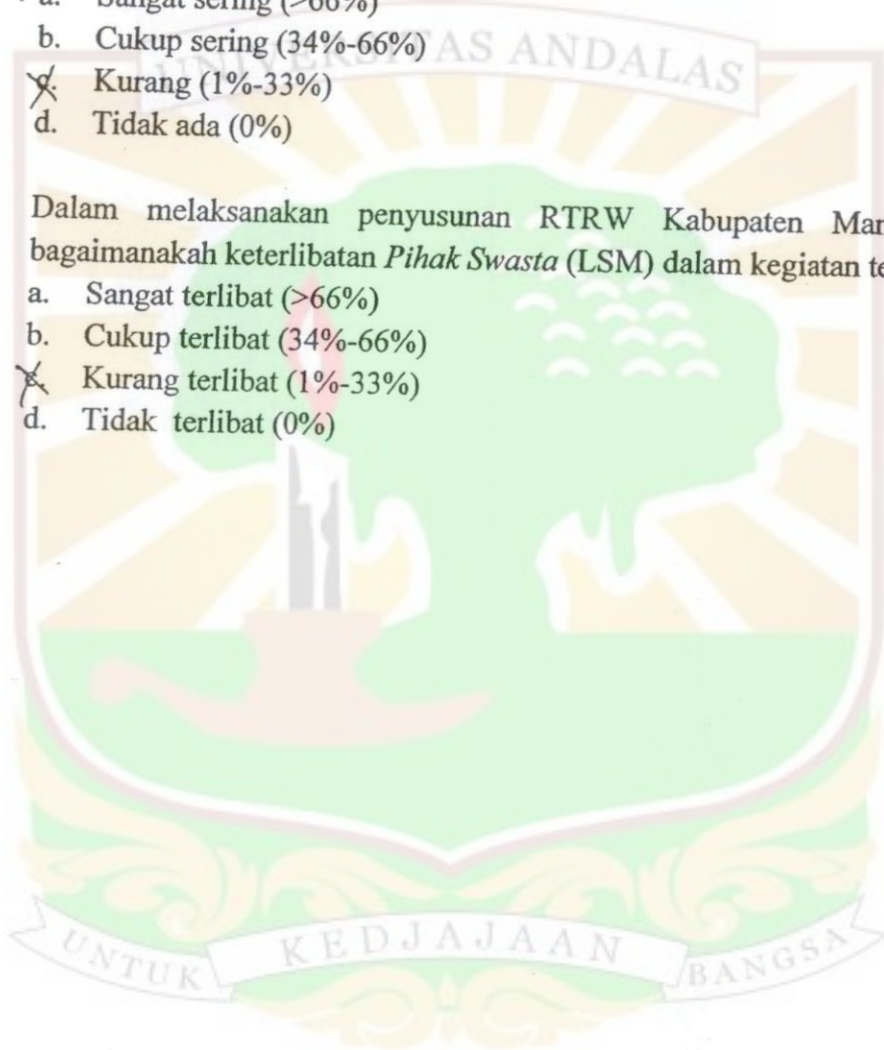
1. Daftar isian yang berbentuk pilihan, jawaban dipilih salah satu dengan memberikan tanda silang (x) pada salah satu huruf di depan jawaban.
2. Untuk pernyataan yang tidak tersedia pilihan jawaban, jawaban dapat diisikan dengan menuliskan pada tempat yang telah tersedia.

1. Nama : MONANG NST
2. Alamat : Desa/Kelurahan: BANGE KEC. PKY. MALINTANG.  
RT.....RW.....
3. Jenis Kelamin :  
☒ a. Pria  
☐ b. Wanita
4. Usia Bapak/Ibu :  
a. 20-30 tahun  
☒ b. 31-40 tahun  
☐ c. 41-50 tahun  
☐ d. 51-60 tahun
5. Pendidikan terakhir Bapak/Ibu :  
a. Sarjana  
b. Sarjana Muda/Diploma  
☒ c. Lulus SMA atau yang sederajat  
d. Lulus SMP atau yang sederajat  
e. Lulus SD atau yang sederajat
6. Pekerjaan Bapak/Ibu saat ini :  
a. PNS/TNI  
b. Pensiunan  
c. Kepala Desa/Kelurahan  
d. Pegawai Swasta  
e. Wiraswasta  
☒ f. Lain-lain, sebutkan TANI
7. Rata-rata penghasilan yang diterima Bapak/Ibu tiap bulan :  
a. Kurang dari Rp. 500.000,-  
b. Rp. 500.000,- s/d Rp. 799.000,-  
c. Rp. 800.000,- s/d Rp. 1.099.000,-  
d. Rp. 1.100.000,- s/d Rp. 1.400.000,-  
☒ e. Lebih dari Rp. 1.400.000,-



## B. FAKTOR EKSTERNAL

1. Dalam melaksanakan penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, bagaimanakah pembinaan dan informasi *Pemerintah Daerah* kepada masyarakat ?
  - a. Sangat sering (>66%)
  - b. Cukup sering (34%-66%)
  - ☒ c. Kurang (1%-33%)
  - d. Tidak ada (0%)
2. Dalam melaksanakan penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, bagaimanakah keterlibatan *Pihak Swasta (LSM)* dalam kegiatan tersebut?
  - a. Sangat terlibat (>66%)
  - b. Cukup terlibat (34%-66%)
  - ☒ c. Kurang terlibat (1%-33%)
  - d. Tidak terlibat (0%)

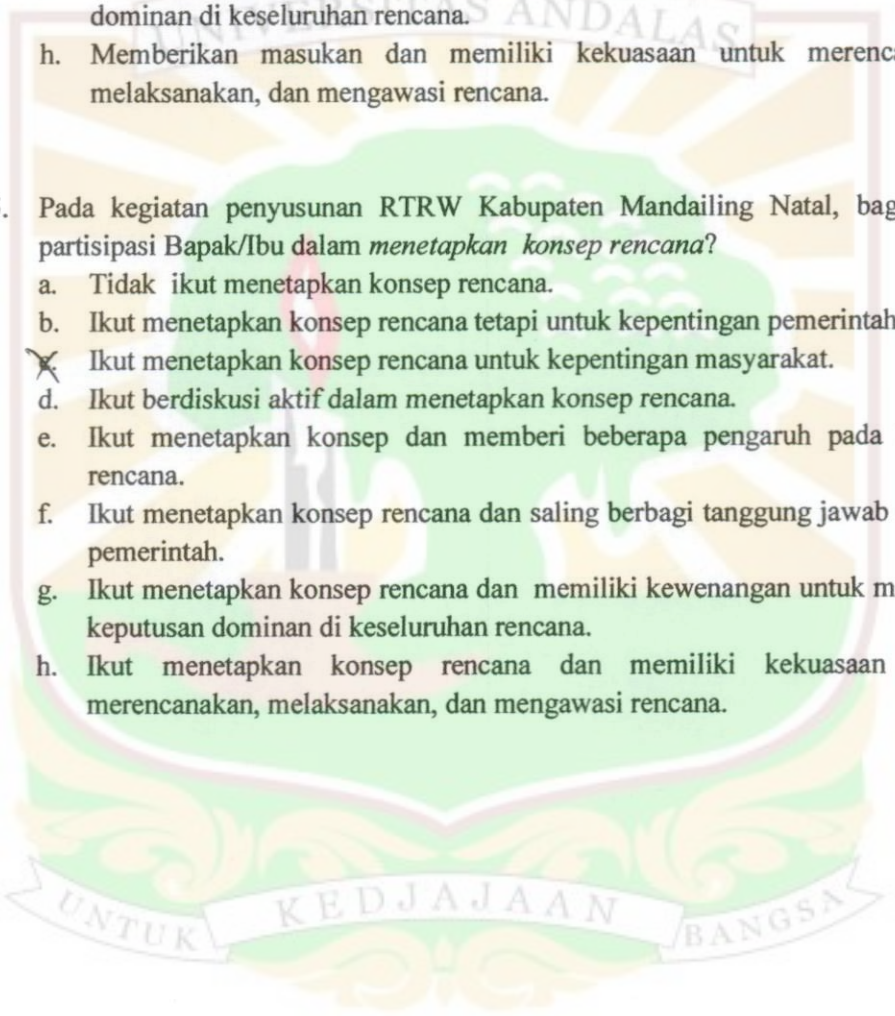


**BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN  
RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**Petunjuk pengisian**

1. Jawaban pertanyaan mohon dipilih salah satu dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu huruf di depan jawaban.
2. Apabila memilih jawaban (e), selain diberikan tanda silang (X), mohon juga dituliskan/disebutkan pada tempat yang telah tersedia.

1. Bagaimanakah bentuk partisipasi Bapak/Ibu dalam kegiatan *Penjaringan Aspirasi Masyarakat* pada penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal?
  - a. Hanya mendengarkan saja
  - ☒ b. Memberikan sumbangan masukan/saran/usul
  - c. Memberikan sumbangan informasi/data
  - d. Memberikan bantuan memperjelas hak atas ruang
  - e. Bentuk lain/lebih dari satu jawaban  
Sebutkan .....
2. Bagaimanakah bentuk partisipasi Bapak/Ibu dalam kegiatan *Seminar Rancangan Rencana* pada penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal?
  - a. Hanya mendengarkan saja
  - ☒ b. Memberikan sumbangan masukan/saran/usul
  - c. Memberikan sumbangan informasi/data
  - d. Memberikan bantuan memperjelas hak atas ruang
  - e. Bentuk lain/lebih dari satu jawaban  
Sebutkan .....
3. Kegiatan penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, bagaimana partisipasi *Kehadiran* Bapak/Ibu dalam rapat/pertemuan yang diadakan?
  - a. Hadir hanya sebagai pendengar saja.
  - b. Hadir dan memberikan masukan untuk kepentingan pemerintah saja.
  - ☒ c. Hadir dan mengemukakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
  - d. Hadir dan melakukan dialog/tanya jawab dengan pemerintah.
  - e. Hadir dan memberikan beberapa pengaruh pada apa yang direncanakan.
  - f. Hadir dan membagi tanggung jawab perencanaan dengan pemerintah.
  - g. Hadir dan diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana.
  - h. Hadir dan memiliki kekuasaan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.

4. Pada kegiatan penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, bagaimana partisipasi Bapak/Ibu dalam *mengemukakan masukan/saran/usul*?
- a. Tidak memberikan masukan/saran/usul.
  - b. Memberikan masukan untuk kepentingan pemerintah saja.
  - ☒ c. Memberikan masukan untuk kepentingan masyarakat.
  - d. Memberikan masukan dengan cara dialog dua arah dengan pemerintah.
  - e. Memberikan masukan dan usulannya diperhatikan sesuai dengan kebutuhan.
  - f. Memberikan masukan dan tercapai kesamaan kepentingan dengan pemerintah.
  - g. Memberikan masukan dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana.
  - h. Memberikan masukan dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.
5. Pada kegiatan penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, bagaimana partisipasi Bapak/Ibu dalam *menetapkan konsep rencana*?
- a. Tidak ikut menetapkan konsep rencana.
  - b. Ikut menetapkan konsep rencana tetapi untuk kepentingan pemerintah saja.
  - ☒ c. Ikut menetapkan konsep rencana untuk kepentingan masyarakat.
  - d. Ikut berdiskusi aktif dalam menetapkan konsep rencana.
  - e. Ikut menetapkan konsep dan memberi beberapa pengaruh pada konsep rencana.
  - f. Ikut menetapkan konsep rencana dan saling berbagi tanggung jawab dengan pemerintah.
  - g. Ikut menetapkan konsep rencana dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana.
  - h. Ikut menetapkan konsep rencana dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.
- 



6. Dalam penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, bagaimana partisipasi Bapak/Ibu dalam *memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana*?
- a. Tidak memberikan persetujuan.
  - b. Memberikan persetujuan tetapi untuk kepentingan pemerintah saja.
  - ☒ c. Memberikan persetujuan karena untuk kepentingan masyarakat.
  - d. Memberikan persetujuan karena telah terjadi dialog dua arah dengan pemerintah.
  - e. Memberikan persetujuan karena usulan dari masyarakat diperhatikan.
  - f. Memberikan persetujuan karena telah ada kesamaan kepentingan dengan pemerintah.
  - g. Memberikan persetujuan setelah diberi kewenangan untuk membuat keputusan dominan dikeseluruhan rencana.
  - h. Memberikan persetujuan setelah diberi kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi rencana.
7. Dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, pemberian informasi dilakukan *melalui* ?
- a. Media cetak
  - b. Media elektronik
  - c. Forum pertemuan
  - ☒ d. Surat undangan
  - e. Telepon dan SMS



## KUESIONER UNTUK MASYARAKAT

### A. FAKTOR INTERNAL

#### Petunjuk Pengisian

1. Daftar isian yang berbentuk pilihan, jawaban dipilih salah satu dengan memberikan tanda silang (x) pada salah satu huruf di depan jawaban.
2. Untuk pernyataan yang tidak tersedia pilihan jawaban, jawaban dapat diisikan dengan menuliskan pada tempat yang telah tersedia.

1. Nama : Gutan Naposo Nst
2. Alamat : Desa/Kelurahan: Platinsang  
RT.....RW.....
3. Jenis Kelamin :  
☒ a. Pria  
b. Wanita
4. Usia Bapak/Ibu :  
a. 20-30 tahun  
b. 31-40 tahun  
c. 41-50 tahun  
☒ d. 51-60 tahun
5. Pendidikan terakhir Bapak/Ibu :  
a. Sarjana  
☒ b. Sarjana Muda/Diploma  
c. Lulus SMA atau yang sederajat  
d. Lulus SMP atau yang sederajat  
e. Lulus SD atau yang sederajat
6. Pekerjaan Bapak/Ibu saat ini :  
a. PNS/TNI  
☒ b. Pensiunan  
c. Kepala Desa/Kelurahan  
d. Pegawai Swasta  
e. Wiraswasta  
f. Lain-lain, sebutkan
7. Rata-rata penghasilan yang diterima Bapak/Ibu tiap bulan :  
a. Kurang dari Rp. 500.000,-  
☒ b. Rp. 500.000,- s/d Rp. 799.000,-  
c. Rp. 800.000,- s/d Rp. 1.099.000,-  
d. Rp. 1.100.000,- s/d Rp. 1.400.000,-  
e. Lebih dari Rp. 1.400.000,-

## B. FAKTOR EKSTERNAL

1. Dalam melaksanakan penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, bagaimanakah pembinaan dan informasi *Pemerintah Daerah* kepada masyarakat ?
  - a. Sangat sering (>66%)
  - b. Cukup sering (34%-66%)
  - ☒ c. Kurang (1%-33%)
  - d. Tidak ada (0%)
2. Dalam melaksanakan penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, bagaimanakah keterlibatan *Pihak Swasta* (LSM) dalam kegiatan tersebut?
  - a. Sangat terlibat (>66%)
  - b. Cukup terlibat (34%-66%)
  - ☒ c. Kurang terlibat (1%-33%)
  - d. Tidak terlibat (0%)



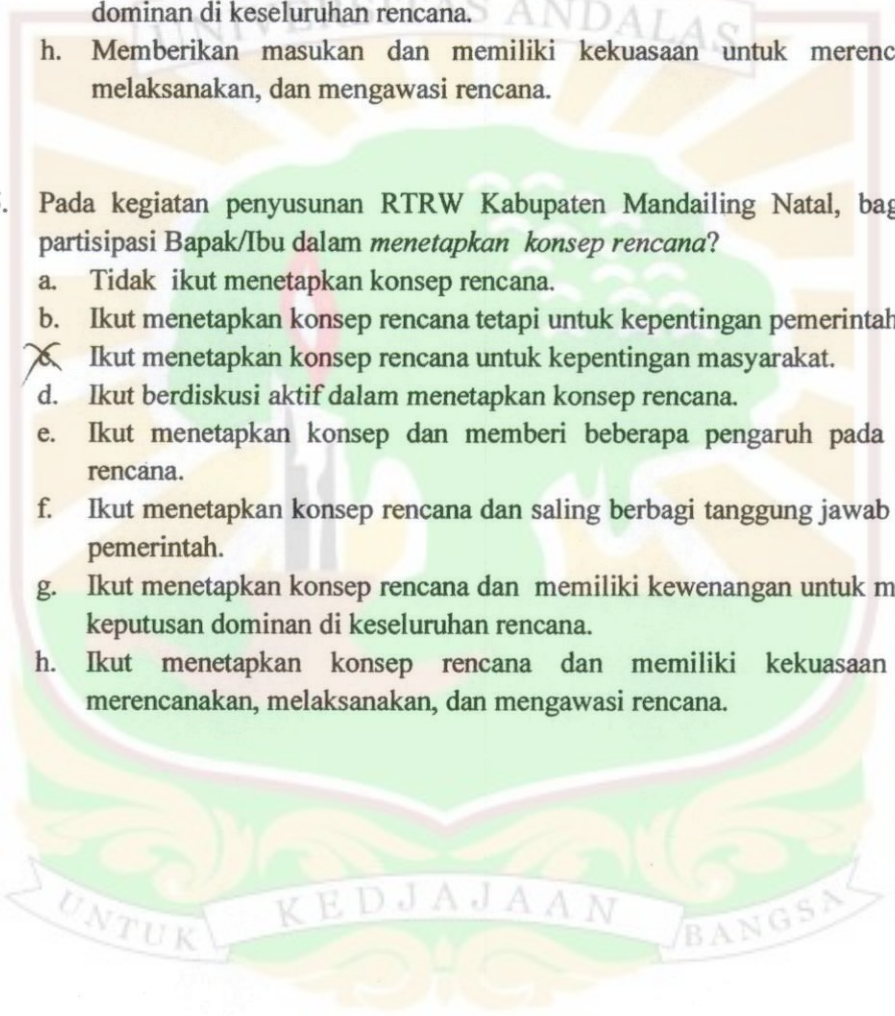


**BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN  
RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**Petunjuk pengisian**

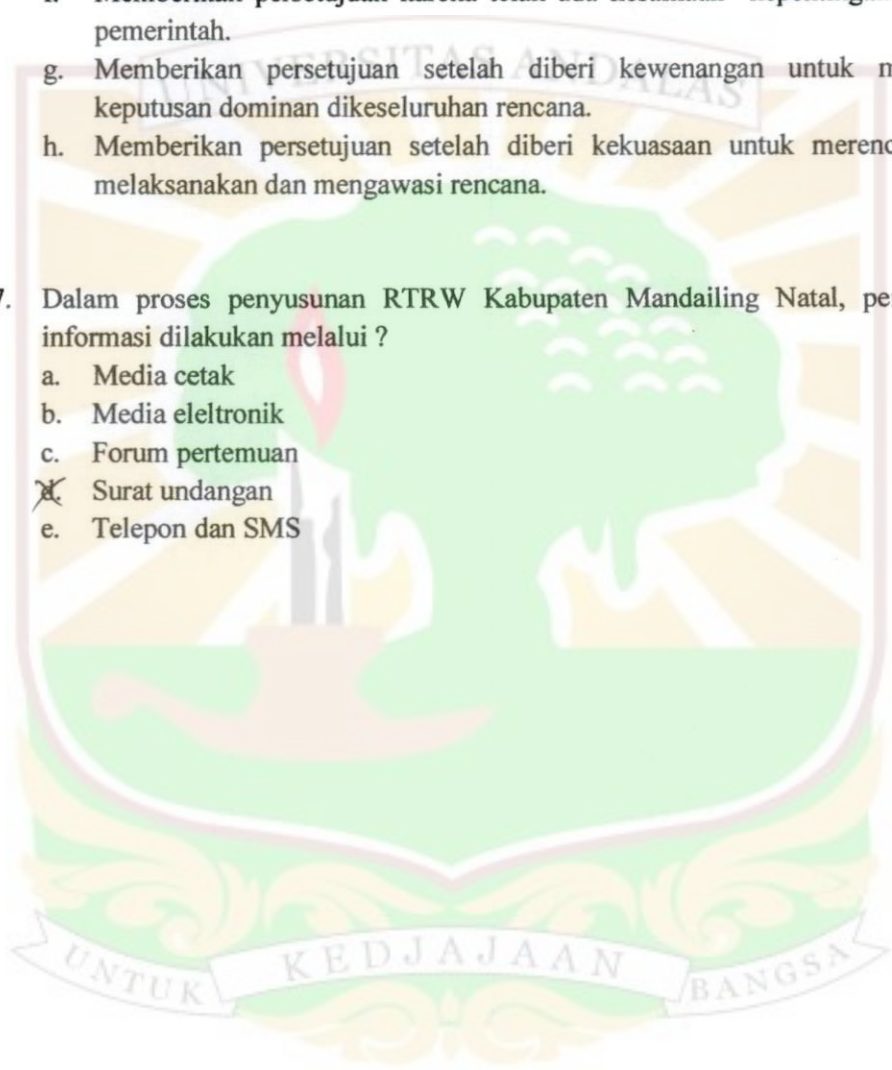
1. Jawaban pertanyaan mohon dipilih salah satu dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu huruf di depan jawaban.
2. Apabila memilih jawaban (e), selain diberikan tanda silang (X), mohon juga dituliskan/disebutkan pada tempat yang telah tersedia.

1. Bagaimanakah bentuk partisipasi Bapak/Ibu dalam kegiatan *Penjaringan Aspirasi Masyarakat* pada penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal?
  - a. Hanya mendengarkan saja
  - ☒ b. Memberikan sumbangan masukan/saran/usul
  - c. Memberikan sumbangan informasi/data
  - d. Memberikan bantuan memperjelas hak atas ruang
  - e. Bentuk lain/lebih dari satu jawaban  
Sebutkan .....
2. Bagaimanakah bentuk partisipasi Bapak/Ibu dalam kegiatan *Seminar Rancangan Rencana* pada penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal?
  - a. Hanya mendengarkan saja
  - ☒ b. Memberikan sumbangan masukan/saran/usul
  - c. Memberikan sumbangan informasi/data
  - d. Memberikan bantuan memperjelas hak atas ruang
  - e. Bentuk lain/lebih dari satu jawaban  
Sebutkan .....
3. Kegiatan penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, bagaimana partisipasi *Kehadiran* Bapak/Ibu dalam rapat/pertemuan yang diadakan?
  - a. Hadir hanya sebagai pendengar saja.
  - b. Hadir dan memberikan masukan untuk kepentingan pemerintah saja.
  - ☒ c. Hadir dan mengemukakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
  - d. Hadir dan melakukan dialog/tanya jawab dengan pemerintah.
  - e. Hadir dan memberikan beberapa pengaruh pada apa yang direncanakan.
  - f. Hadir dan membagi tanggung jawab perencanaan dengan pemerintah.
  - g. Hadir dan diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana.
  - h. Hadir dan memiliki kekuasaan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.

4. Pada kegiatan penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, bagaimana partisipasi Bapak/Ibu dalam *mengemukakan masukan/saran/usul*?
- a. Tidak memberikan masukan/saran/usul.
  - b. Memberikan masukan untuk kepentingan pemerintah saja.
  - ☒ c. Memberikan masukan untuk kepentingan masyarakat.
  - d. Memberikan masukan dengan cara dialog dua arah dengan pemerintah.
  - e. Memberikan masukan dan usulannya diperhatikan sesuai dengan kebutuhan.
  - f. Memberikan masukan dan tercapai kesamaan kepentingan dengan pemerintah.
  - g. Memberikan masukan dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana.
  - h. Memberikan masukan dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.
5. Pada kegiatan penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, bagaimana partisipasi Bapak/Ibu dalam *menetapkan konsep rencana*?
- a. Tidak ikut menetapkan konsep rencana.
  - b. Ikut menetapkan konsep rencana tetapi untuk kepentingan pemerintah saja.
  - ☒ c. Ikut menetapkan konsep rencana untuk kepentingan masyarakat.
  - d. Ikut berdiskusi aktif dalam menetapkan konsep rencana.
  - e. Ikut menetapkan konsep dan memberi beberapa pengaruh pada konsep rencana.
  - f. Ikut menetapkan konsep rencana dan saling berbagi tanggung jawab dengan pemerintah.
  - g. Ikut menetapkan konsep rencana dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana.
  - h. Ikut menetapkan konsep rencana dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.
- 



6. Dalam penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, bagaimana partisipasi Bapak/Ibu dalam *memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana*?
- a. Tidak memberikan persetujuan.
  - b. Memberikan persetujuan tetapi untuk kepentingan pemerintah saja.
  - ☒ c. Memberikan persetujuan karena untuk kepentingan masyarakat.
  - d. Memberikan persetujuan karena telah terjadi dialog dua arah dengan pemerintah.
  - e. Memberikan persetujuan karena usulan dari masyarakat diperhatikan.
  - f. Memberikan persetujuan karena telah ada kesamaan kepentingan dengan pemerintah.
  - g. Memberikan persetujuan setelah diberi kewenangan untuk membuat keputusan dominan dikeseluruhan rencana.
  - h. Memberikan persetujuan setelah diberi kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi rencana.
7. Dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, pemberian informasi dilakukan melalui ?
- a. Media cetak
  - b. Media elektronik
  - c. Forum pertemuan
  - ☒ d. Surat undangan
  - e. Telepon dan SMS





## KUESIONER UNTUK MASYARAKAT

### A. FAKTOR INTERNAL

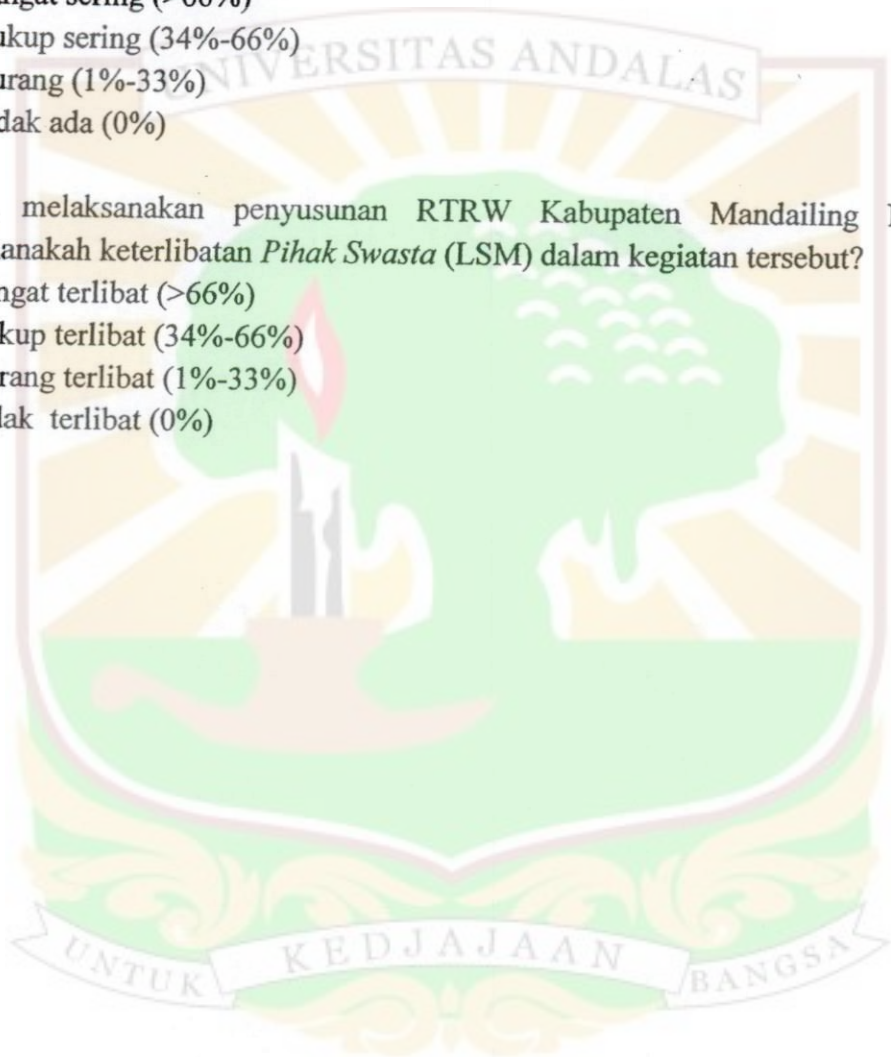
#### Petunjuk Pengisian

1. Daftar isian yang berbentuk pilihan, jawaban dipilih salah satu dengan memberikan tanda silang (x) pada salah satu huruf di depan jawaban.
2. Untuk pernyataan yang tidak tersedia pilihan jawaban, jawaban dapat diisi dengan menuliskan pada tempat yang telah tersedia.

1. Nama : Kholilul Yakin
2. Alamat : Desa/Kelurahan: Pangabungan  
RT. 01 ..... RW 4 .....
3. Jenis Kelamin :  
☒ a. Pria  
☐ b. Wanita
4. Usia Bapak/Ibu :  
☐ a. 20-30 tahun  
☐ b. 31-40 tahun  
☐ c. 41-50 tahun  
☒ d. 51-60 tahun
5. Pendidikan terakhir Bapak/Ibu :  
☐ a. Sarjana  
☐ b. Sarjana Muda/Diploma  
☒ c. Lulus SMA atau yang sederajat  
☐ d. Lulus SMP atau yang sederajat  
☐ e. Lulus SD atau yang sederajat
6. Pekerjaan Bapak/Ibu saat ini :  
☐ a. PNS/TNI  
☐ b. Pensiunan  
☐ c. Kepala Desa/Kelurahan  
☐ d. Pegawai Swasta  
☒ e. Wiraswasta  
☐ f. Lain-lain, sebutkan
7. Rata-rata penghasilan yang diterima Bapak/Ibu tiap bulan :  
☒ a. Kurang dari Rp. 500.000,-  
☐ b. Rp. 500.000,- s/d Rp. 799.000,-  
☐ c. Rp. 800.000,- s/d Rp. 1.099.000,-  
☐ d. Rp. 1.100.000,- s/d Rp. 1.400.000,-  
☐ e. Lebih dari Rp. 1.400.000,-

## B. FAKTOR EKSTERNAL

1. Dalam melaksanakan penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, bagaimanakah pembinaan dan informasi *Pemerintah Daerah* kepada masyarakat ?
  - a. Sangat sering (>66%)
  - b. Cukup sering (34%-66%)
  - ☒ c. Kurang (1%-33%)
  - d. Tidak ada (0%)
2. Dalam melaksanakan penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, bagaimanakah keterlibatan *Pihak Swasta* (LSM) dalam kegiatan tersebut?
  - a. Sangat terlibat (>66%)
  - b. Cukup terlibat (34%-66%)
  - ☒ c. Kurang terlibat (1%-33%)
  - d. Tidak terlibat (0%)




**BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN  
RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**Petunjuk pengisian**

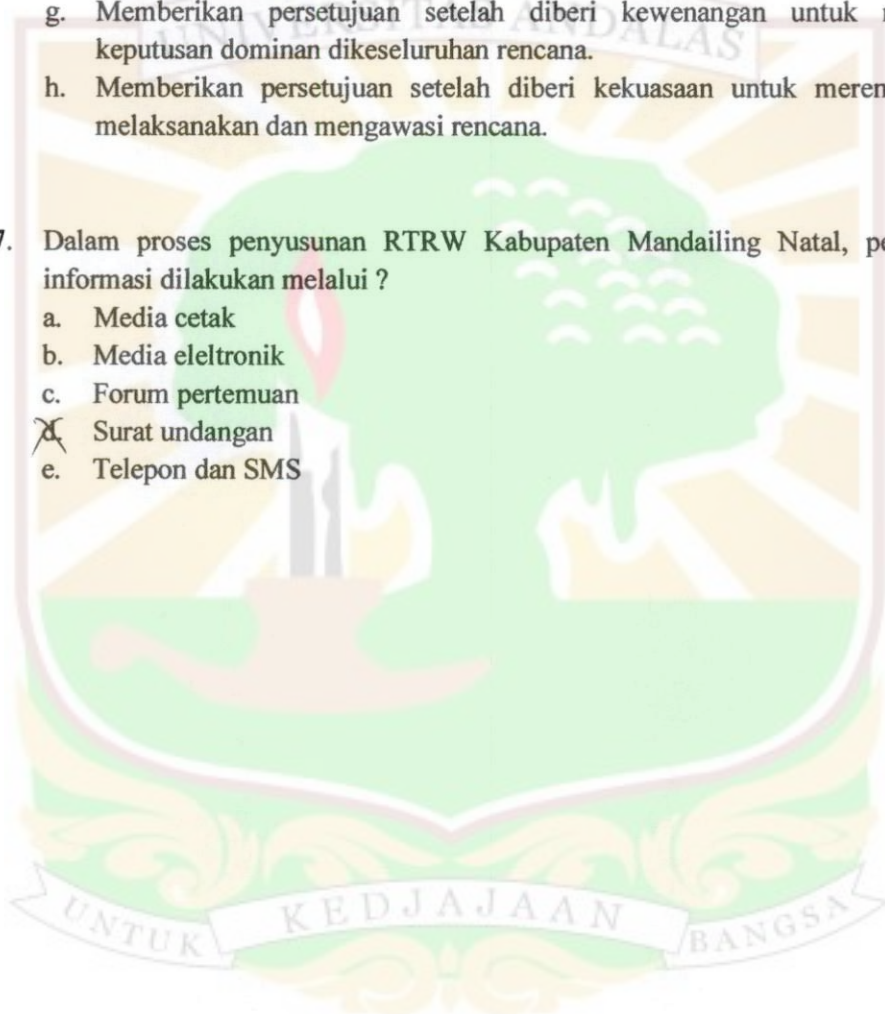
1. Jawaban pertanyaan mohon dipilih salah satu dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu huruf di depan jawaban.
2. Apabila memilih jawaban (e), selain diberikan tanda silang (X), mohon juga dituliskan/disebutkan pada tempat yang telah tersedia.

1. Bagaimanakah bentuk partisipasi Bapak/Ibu dalam kegiatan *Penjaringan Aspirasi Masyarakat* pada penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal?
  - a. Hanya mendengarkan saja
  - ☒ b. Memberikan sumbangan masukan/saran/usul
  - c. Memberikan sumbangan informasi/data
  - d. Memberikan bantuan memperjelas hak atas ruang
  - e. Bentuk lain/lebih dari satu jawaban  
Sebutkan .....
2. Bagaimanakah bentuk partisipasi Bapak/Ibu dalam kegiatan *Seminar Rancangan Rencana* pada penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal?
  - a. Hanya mendengarkan saja
  - ☒ b. Memberikan sumbangan masukan/saran/usul
  - c. Memberikan sumbangan informasi/data
  - d. Memberikan bantuan memperjelas hak atas ruang
  - e. Bentuk lain/lebih dari satu jawaban  
Sebutkan .....
3. Kegiatan penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, bagaimana partisipasi *Kehadiran* Bapak/Ibu dalam rapat/pertemuan yang diadakan?
  - a. Hadir hanya sebagai pendengar saja.
  - b. Hadir dan memberikan masukan untuk kepentingan pemerintah saja.
  - c. Hadir dan mengemukakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
  - ☒ d. Hadir dan melakukan dialog/tanya jawab dengan pemerintah.
  - e. Hadir dan memberikan beberapa pengaruh pada apa yang direncanakan.
  - f. Hadir dan membagi tanggung jawab perencanaan dengan pemerintah.
  - g. Hadir dan diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana.
  - h. Hadir dan memiliki kekuasaan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.



4. Pada kegiatan penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, bagaimana partisipasi Bapak/Ibu dalam *mengemukakan masukan/saran/usul*?
- a. Tidak memberikan masukan/saran/usul.
  - b. Memberikan masukan untuk kepentingan pemerintah saja.
  - ☒ c. Memberikan masukan untuk kepentingan masyarakat.
  - d. Memberikan masukan dengan cara dialog dua arah dengan pemerintah.
  - e. Memberikan masukan dan usulannya diperhatikan sesuai dengan kebutuhan.
  - f. Memberikan masukan dan tercapai kesamaan kepentingan dengan pemerintah.
  - g. Memberikan masukan dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana.
  - h. Memberikan masukan dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.
5. Pada kegiatan penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, bagaimana partisipasi Bapak/Ibu dalam *menetapkan konsep rencana*?
- ☒ a. Tidak ikut menetapkan konsep rencana.
  - b. Ikut menetapkan konsep rencana tetapi untuk kepentingan pemerintah saja.
  - c. Ikut menetapkan konsep rencana untuk kepentingan masyarakat.
  - d. Ikut berdiskusi aktif dalam menetapkan konsep rencana.
  - e. Ikut menetapkan konsep dan memberi beberapa pengaruh pada konsep rencana.
  - f. Ikut menetapkan konsep rencana dan saling berbagi tanggung jawab dengan pemerintah.
  - g. Ikut menetapkan konsep rencana dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana.
  - h. Ikut menetapkan konsep rencana dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.
- 

6. Dalam penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, bagaimana partisipasi Bapak/Ibu dalam *memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana*?
- a. Tidak memberikan persetujuan.
  - b. Memberikan persetujuan tetapi untuk kepentingan pemerintah saja.
  - ☒ c. Memberikan persetujuan karena untuk kepentingan masyarakat.
  - d. Memberikan persetujuan karena telah terjadi dialog dua arah dengan pemerintah.
  - e. Memberikan persetujuan karena usulan dari masyarakat diperhatikan.
  - f. Memberikan persetujuan karena telah ada kesamaan kepentingan dengan pemerintah.
  - g. Memberikan persetujuan setelah diberi kewenangan untuk membuat keputusan dominan dikeseluruhan rencana.
  - h. Memberikan persetujuan setelah diberi kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi rencana.
7. Dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, pemberian informasi dilakukan melalui ?
- a. Media cetak
  - b. Media elektronik
  - c. Forum pertemuan
  - ☒ d. Surat undangan
  - e. Telepon dan SMS



## KUESIONER UNTUK MASYARAKAT

### A. FAKTOR INTERNAL

#### Petunjuk Pengisian

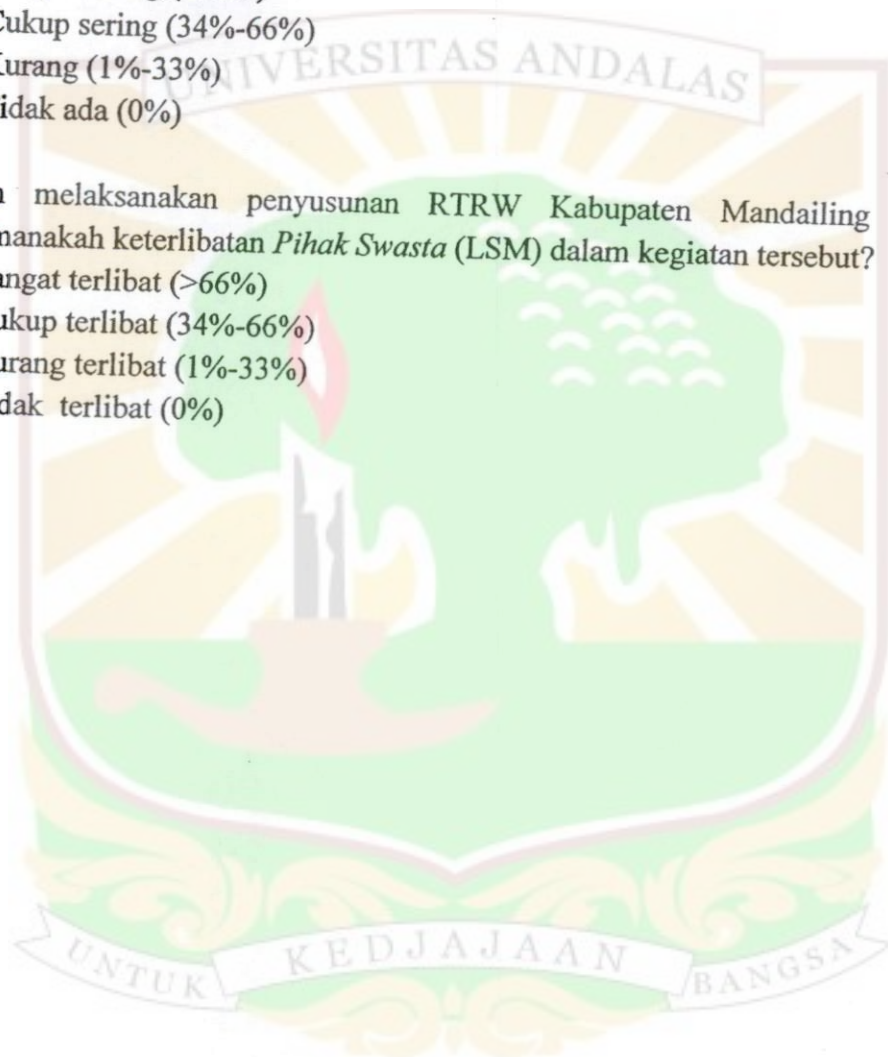
1. Daftar isian yang berbentuk pilihan, jawaban dipilih salah satu dengan memberikan tanda silang (x) pada salah satu huruf di depan jawaban.
2. Untuk pernyataan yang tidak tersedia pilihan jawaban, jawaban dapat diisikan dengan menuliskan pada tempat yang telah tersedia.

1. Nama : MULYADI NST
2. Alamat : Desa/Kelurahan: PIDOLI LORAKANG AER EALOGA  
RT.....RW.....
3. Jenis Kelamin :  
☒ a. Pria  
b. Wanita
4. Usia Bapak/Ibu :  
a. 20-30 tahun  
☒ b. 31-40 tahun  
c. 41-50 tahun  
d. 51-60 tahun
5. Pendidikan terakhir Bapak/Ibu :  
☒ a. Sarjana  
b. Sarjana Muda/Diploma  
c. Lulus SMA atau yang sederajat  
d. Lulus SMP atau yang sederajat  
e. Lulus SD atau yang sederajat
6. Pekerjaan Bapak/Ibu saat ini :  
a. PNS/TNI  
b. Pensiunan  
c. Kepala Desa/Kelurahan  
d. Pegawai Swasta  
☒ e. Wiraswasta  
f. Lain-lain, sebutkan
7. Rata-rata penghasilan yang diterima Bapak/Ibu tiap bulan :  
a. Kurang dari Rp. 500.000,-  
☒ b. Rp. 500.000,- s/d Rp. 799.000,-  
c. Rp. 800.000,- s/d Rp. 1.099.000,-  
d. Rp. 1.100.000,- s/d Rp. 1.400.000,-  
e. Lebih dari Rp. 1.400.000,-



## B. FAKTOR EKSTERNAL

1. Dalam melaksanakan penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, bagaimanakah pembinaan dan informasi *Pemerintah Daerah* kepada masyarakat ?
  - a. Sangat sering (>66%)
  - b. Cukup sering (34%-66%)
  - ☒ c. Kurang (1%-33%)
  - d. Tidak ada (0%)
2. Dalam melaksanakan penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, bagaimanakah keterlibatan *Pihak Swasta* (LSM) dalam kegiatan tersebut?
  - a. Sangat terlibat (>66%)
  - b. Cukup terlibat (34%-66%)
  - ☒ c. Kurang terlibat (1%-33%)
  - d. Tidak terlibat (0%)

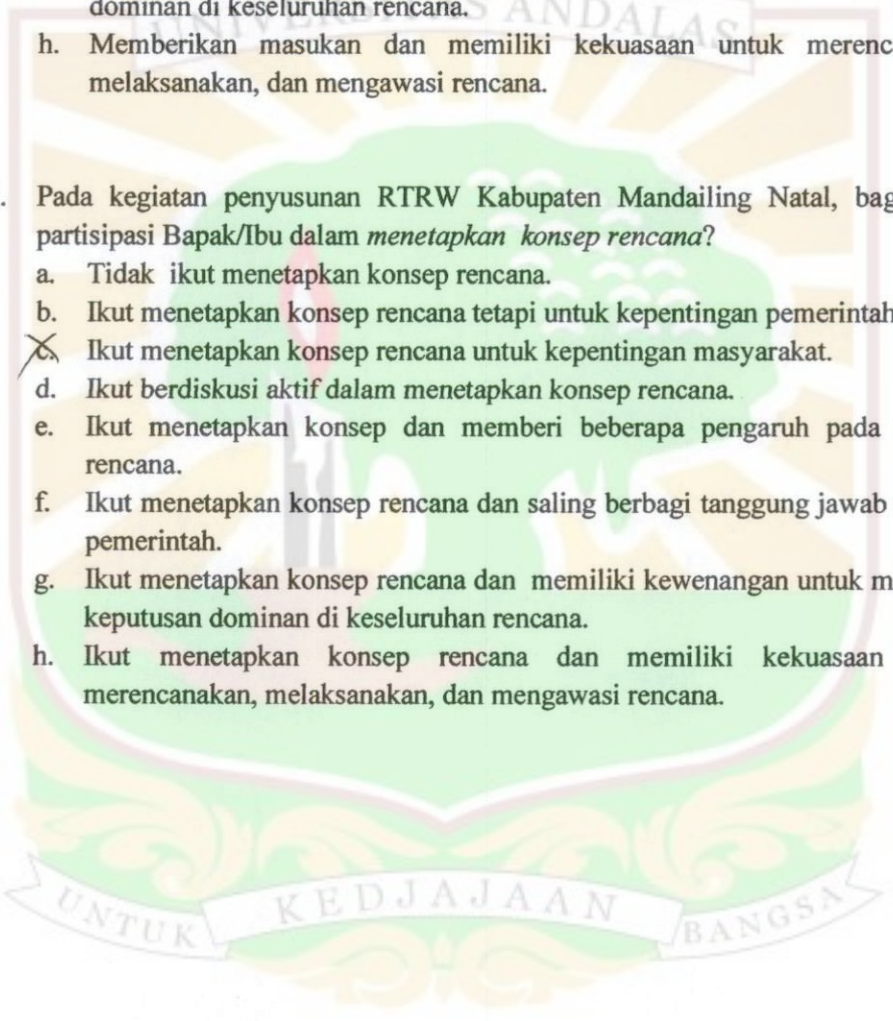


**BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN  
RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**Petunjuk pengisian**

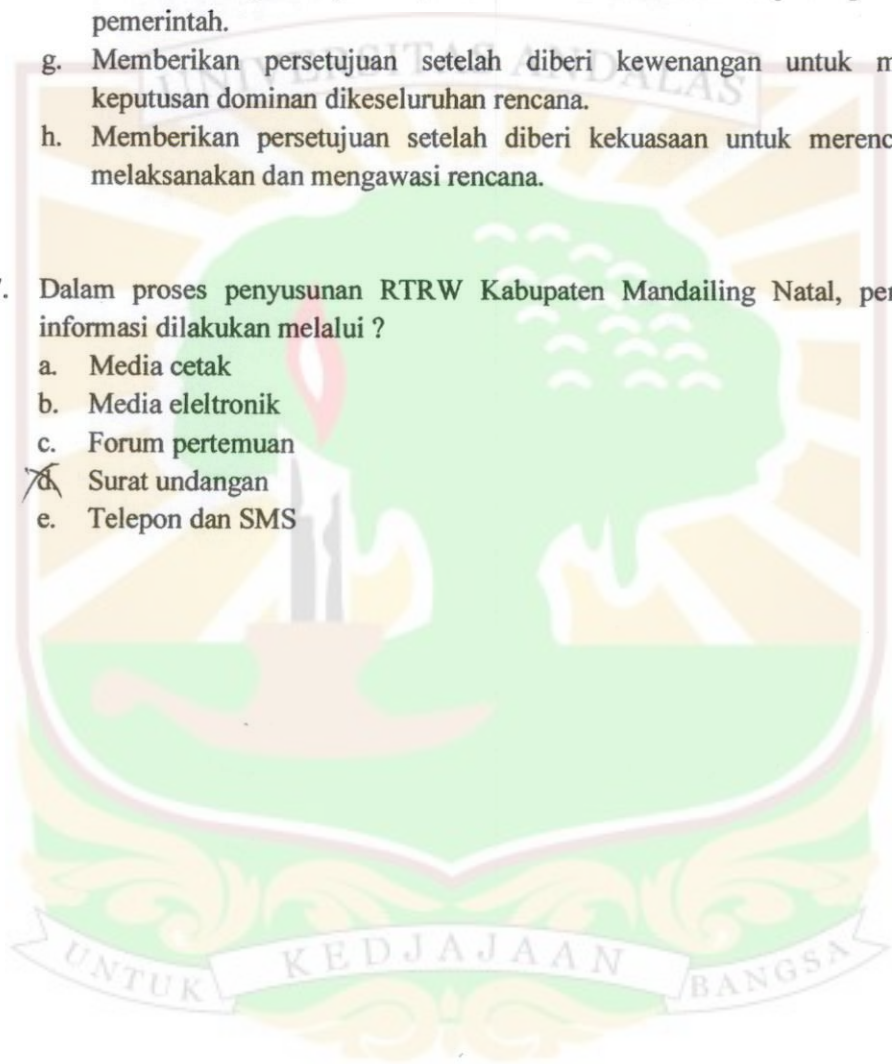
1. Jawaban pertanyaan mohon dipilih salah satu dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu huruf di depan jawaban.
2. Apabila memilih jawaban (e), selain diberikan tanda silang (X), mohon juga dituliskan/disebutkan pada tempat yang telah tersedia.

1. Bagaimanakah bentuk partisipasi Bapak/Ibu dalam kegiatan *Penjaringan Aspirasi Masyarakat* pada penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal?  
☒ a. Hanya mendengarkan saja  
☐ b. Memberikan sumbangan masukan/saran/usul  
☐ c. Memberikan sumbangan informasi/data  
☐ d. Memberikan bantuan memperjelas hak atas ruang  
☐ e. Bentuk lain/lebih dari satu jawaban  
Sebutkan .....
2. Bagaimanakah bentuk partisipasi Bapak/Ibu dalam kegiatan *Seminar Rancangan Rencana* pada penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal?  
☐ a. Hanya mendengarkan saja  
☒ b. Memberikan sumbangan masukan/saran/usul  
☐ c. Memberikan sumbangan informasi/data  
☐ d. Memberikan bantuan memperjelas hak atas ruang  
☐ e. Bentuk lain/lebih dari satu jawaban  
Sebutkan .....
3. Kegiatan penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, bagaimana partisipasi *Kehadiran* Bapak/Ibu dalam rapat/pertemuan yang diadakan?  
☐ a. Hadir hanya sebagai pendengar saja.  
☐ b. Hadir dan memberikan masukan untuk kepentingan pemerintah saja.  
☒ c. Hadir dan mengemukakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.  
☐ d. Hadir dan melakukan dialog/tanya jawab dengan pemerintah.  
☐ e. Hadir dan memberikan beberapa pengaruh pada apa yang direncanakan.  
☐ f. Hadir dan membagi tanggung jawab perencanaan dengan pemerintah.  
☐ g. Hadir dan diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana.  
☐ h. Hadir dan memiliki kekuasaan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.

4. Pada kegiatan penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, bagaimana partisipasi Bapak/Ibu dalam *mengemukakan masukan/saran/usul*?
- a. Tidak memberikan masukan/saran/usul.
  - b. Memberikan masukan untuk kepentingan pemerintah saja.
  - c. Memberikan masukan untuk kepentingan masyarakat.
  - ☒ d. Memberikan masukan dengan cara dialog dua arah dengan pemerintah.
  - e. Memberikan masukan dan usulannya diperhatikan sesuai dengan kebutuhan.
  - f. Memberikan masukan dan tercapai kesamaan kepentingan dengan pemerintah.
  - g. Memberikan masukan dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana.
  - h. Memberikan masukan dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.
5. Pada kegiatan penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, bagaimana partisipasi Bapak/Ibu dalam *menetapkan konsep rencana*?
- a. Tidak ikut menetapkan konsep rencana.
  - b. Ikut menetapkan konsep rencana tetapi untuk kepentingan pemerintah saja.
  - ☒ c. Ikut menetapkan konsep rencana untuk kepentingan masyarakat.
  - d. Ikut berdiskusi aktif dalam menetapkan konsep rencana.
  - e. Ikut menetapkan konsep dan memberi beberapa pengaruh pada konsep rencana.
  - f. Ikut menetapkan konsep rencana dan saling berbagi tanggung jawab dengan pemerintah.
  - g. Ikut menetapkan konsep rencana dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana.
  - h. Ikut menetapkan konsep rencana dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.
- 



6. Dalam penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, bagaimana partisipasi Bapak/Ibu dalam *memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana*?
- a. Tidak memberikan persetujuan.
  - b. Memberikan persetujuan tetapi untuk kepentingan pemerintah saja.
  - ☒ c. Memberikan persetujuan karena untuk kepentingan masyarakat.
  - d. Memberikan persetujuan karena telah terjadi dialog dua arah dengan pemerintah.
  - e. Memberikan persetujuan karena usulan dari masyarakat diperhatikan.
  - f. Memberikan persetujuan karena telah ada kesamaan kepentingan dengan pemerintah.
  - g. Memberikan persetujuan setelah diberi kewenangan untuk membuat keputusan dominan dikeseluruhan rencana.
  - h. Memberikan persetujuan setelah diberi kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi rencana.
7. Dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, pemberian informasi dilakukan melalui ?
- a. Media cetak
  - b. Media elektronik
  - c. Forum pertemuan
  - ☒ d. Surat undangan
  - e. Telepon dan SMS



## KUESIONER UNTUK MASYARAKAT

### A. FAKTOR INTERNAL

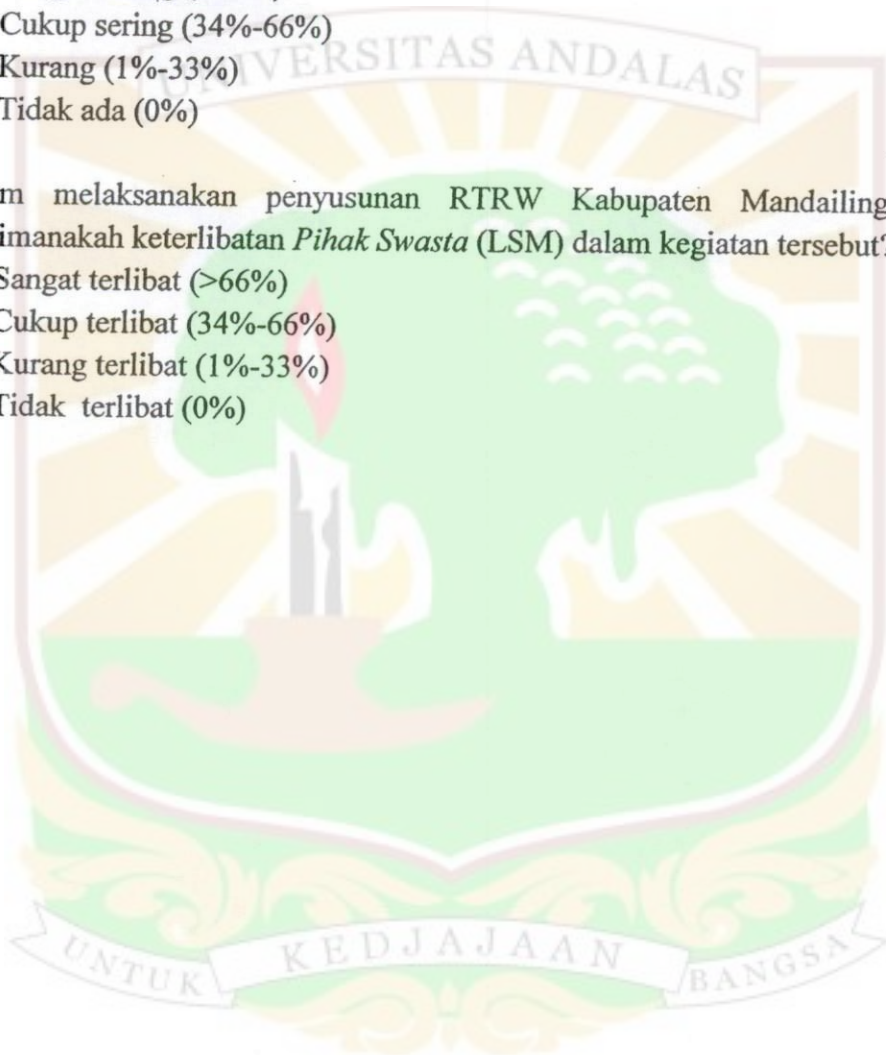
#### Petunjuk Pengisian

1. Daftar isian yang berbentuk pilihan, jawaban dipilih salah satu dengan memberikan tanda silang (x) pada salah satu huruf di depan jawaban.
2. Untuk pernyataan yang tidak tersedia pilihan jawaban, jawaban dapat diisi dengan menuliskan pada tempat yang telah tersedia.

1. Nama : Porto SIREGAR
2. Alamat : Desa/Kelurahan: .....  
RT.....RW.....
3. Jenis Kelamin :  
☒ a. Pria  
b. Wanita
4. Usia Bapak/Ibu :  
a. 20-30 tahun  
b. 31-40 tahun  
☒ c. 41-50 tahun  
d. 51-60 tahun
5. Pendidikan terakhir Bapak/Ibu :  
☒ a. Sarjana  
b. Sarjana Muda/Diploma  
c. Lulus SMA atau yang sederajat  
d. Lulus SMP atau yang sederajat  
e. Lulus SD atau yang sederajat
6. Pekerjaan Bapak/Ibu saat ini :  
a. PNS/TNI  
b. Pensiunan  
c. Kepala Desa/Kelurahan  
d. Pegawai Swasta  
☒ e. Wiraswasta  
f. Lain-lain, sebutkan
7. Rata-rata penghasilan yang diterima Bapak/Ibu tiap bulan :  
a. Kurang dari Rp. 500.000,-  
☒ b. Rp. 500.000,- s/d Rp. 799.000,-  
c. Rp. 800.000,- s/d Rp. 1.099.000,-  
d. Rp. 1.100.000,- s/d Rp. 1.400.000,-  
e. Lebih dari Rp. 1.400.000,-

## B. FAKTOR EKSTERNAL

1. Dalam melaksanakan penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, bagaimanakah pembinaan dan informasi *Pemerintah Daerah* kepada masyarakat ?
  - a. Sangat sering (>66%)
  - b. Cukup sering (34%-66%)
  - ☒ c. Kurang (1%-33%)
  - d. Tidak ada (0%)
2. Dalam melaksanakan penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, bagaimanakah keterlibatan *Pihak Swasta (LSM)* dalam kegiatan tersebut?
  - a. Sangat terlibat (>66%)
  - b. Cukup terlibat (34%-66%)
  - ☒ c. Kurang terlibat (1%-33%)
  - d. Tidak terlibat (0%)



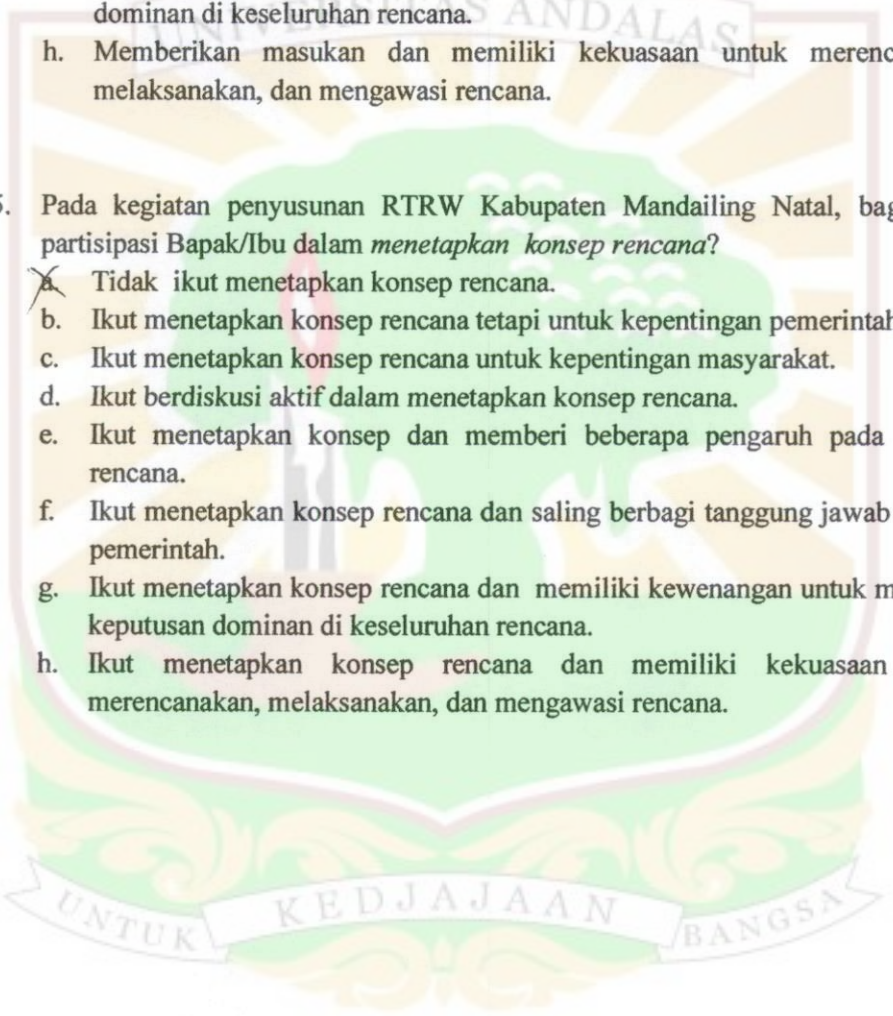


**BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN  
RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**Petunjuk pengisian**

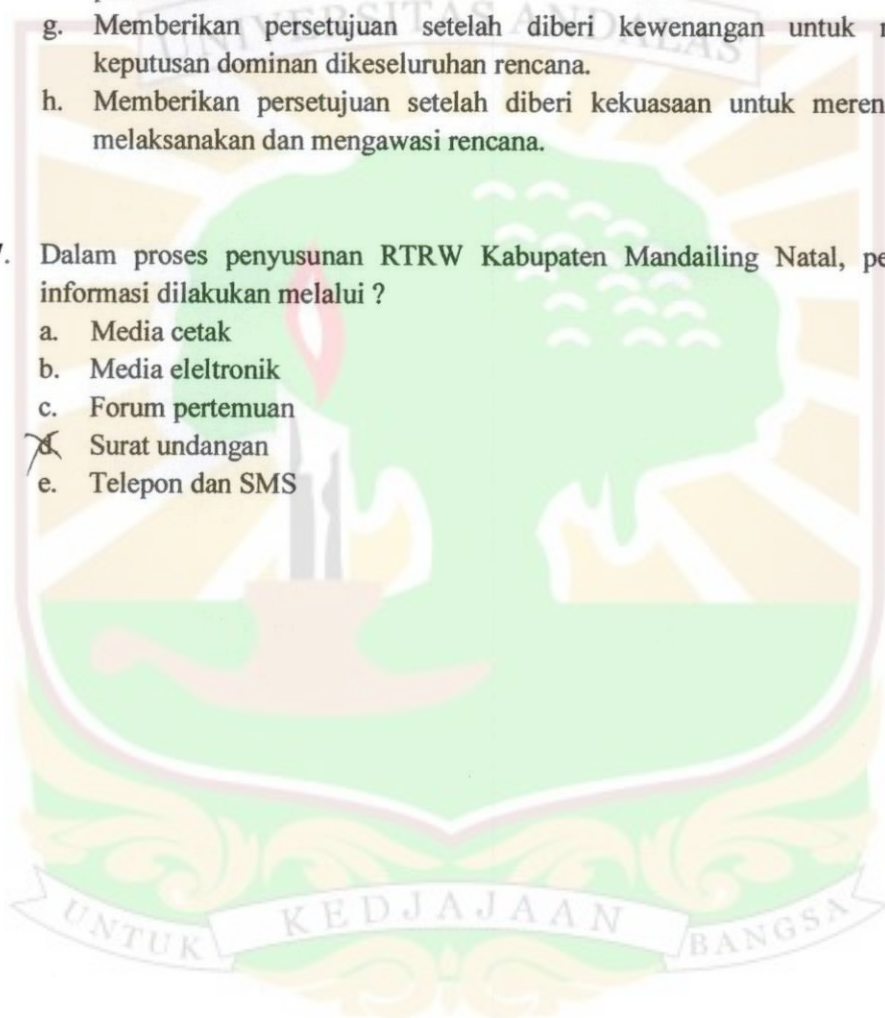
1. Jawaban pertanyaan mohon dipilih salah satu dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu huruf di depan jawaban.
2. Apabila memilih jawaban (e), selain diberikan tanda silang (X), mohon juga dituliskan/disebutkan pada tempat yang telah tersedia.

1. Bagaimanakah bentuk partisipasi Bapak/Ibu dalam kegiatan *Penjaringan Aspirasi Masyarakat* pada penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal?  
☒ a. Hanya mendengarkan saja  
☐ b. Memberikan sumbangan masukan/saran/usul  
☐ c. Memberikan sumbangan informasi/data  
☐ d. Memberikan bantuan memperjelas hak atas ruang  
☐ e. Bentuk lain/lebih dari satu jawaban  
Sebutkan .....
2. Bagaimanakah bentuk partisipasi Bapak/Ibu dalam kegiatan *Seminar Rancangan Rencana* pada penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal?  
☐ a. Hanya mendengarkan saja  
☒ b. Memberikan sumbangan masukan/saran/usul  
☐ c. Memberikan sumbangan informasi/data  
☐ d. Memberikan bantuan memperjelas hak atas ruang  
☐ e. Bentuk lain/lebih dari satu jawaban  
Sebutkan .....
3. Kegiatan penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, bagaimana partisipasi *Kehadiran* Bapak/Ibu dalam rapat/pertemuan yang diadakan?  
☐ a. Hadir hanya sebagai pendengar saja.  
☐ b. Hadir dan memberikan masukan untuk kepentingan pemerintah saja.  
☒ c. Hadir dan mengemukakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.  
☐ d. Hadir dan melakukan dialog/tanya jawab dengan pemerintah.  
☐ e. Hadir dan memberikan beberapa pengaruh pada apa yang direncanakan.  
☐ f. Hadir dan membagi tanggung jawab perencanaan dengan pemerintah.  
☐ g. Hadir dan diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana.  
☐ h. Hadir dan memiliki kekuasaan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.

4. Pada kegiatan penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, bagaimana partisipasi Bapak/Ibu dalam *mengemukakan masukan/saran/usul*?
- a. Tidak memberikan masukan/saran/usul.
  - b. Memberikan masukan untuk kepentingan pemerintah saja.
  - ☒ c. Memberikan masukan untuk kepentingan masyarakat.
  - d. Memberikan masukan dengan cara dialog dua arah dengan pemerintah.
  - e. Memberikan masukan dan usulannya diperhatikan sesuai dengan kebutuhan.
  - f. Memberikan masukan dan tercapai kesamaan kepentingan dengan pemerintah.
  - g. Memberikan masukan dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana.
  - h. Memberikan masukan dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.
5. Pada kegiatan penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, bagaimana partisipasi Bapak/Ibu dalam *menetapkan konsep rencana*?
- ☒ a. Tidak ikut menetapkan konsep rencana.
  - b. Ikut menetapkan konsep rencana tetapi untuk kepentingan pemerintah saja.
  - c. Ikut menetapkan konsep rencana untuk kepentingan masyarakat.
  - d. Ikut berdiskusi aktif dalam menetapkan konsep rencana.
  - e. Ikut menetapkan konsep dan memberi beberapa pengaruh pada konsep rencana.
  - f. Ikut menetapkan konsep rencana dan saling berbagi tanggung jawab dengan pemerintah.
  - g. Ikut menetapkan konsep rencana dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana.
  - h. Ikut menetapkan konsep rencana dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.
- 



6. Dalam penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, bagaimana partisipasi Bapak/Ibu dalam *mememberikan persetujuan terhadap rancangan rencana*?
- a. Tidak memberikan persetujuan.
  - b. Memberikan persetujuan tetapi untuk kepentingan pemerintah saja.
  - ☒ c. Memberikan persetujuan karena untuk kepentingan masyarakat.
  - d. Memberikan persetujuan karena telah terjadi dialog dua arah dengan pemerintah.
  - e. Memberikan persetujuan karena usulan dari masyarakat diperhatikan.
  - f. Memberikan persetujuan karena telah ada kesamaan kepentingan dengan pemerintah.
  - g. Memberikan persetujuan setelah diberi kewenangan untuk membuat keputusan dominan dikeseluruhan rencana.
  - h. Memberikan persetujuan setelah diberi kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi rencana.
7. Dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, pemberian informasi dilakukan melalui ?
- a. Media cetak
  - b. Media elektronik
  - c. Forum pertemuan
  - ☒ d. Surat undangan
  - e. Telepon dan SMS





## WAWANCARA DENGAN BAPPEDA

1. Apakah masyarakat telah cukup dilibatkan/berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten Mandailing Natal?

J : Pelibatan Masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal telah dilaksanakan dalam acara Rapat "Konsultasi Publik" yang melibatkan berbagai komponen masyarakat, seperti pemangku adat, tokoh pemuda, alim ulama serta stakeholder lainnya.

2. Apakah bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten Mandailing Natal selama ini telah sesuai harapan? Mengapa?

J : Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW sudah dilaksanakan pada "Konsultasi Publik", "kesepakatan dengan kabupaten tetangga", dan "konsultasi di tingkat provinsi serta di tingkat pusat" dalam berbagai acara ini masyarakat dilibatkan dan stakeholder lainnya menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan.

Peran aktif yang diharapkan masih terasa kurang hal ini disebabkan berbagai alasan seperti kurangnya minat dan keingintahuan masyarakat tentang RTRW, kurang memahami peraturan dan undang-undang tentang penyusunan RTRW.

3. Apakah tingkat Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal telah sesuai harapan? Mengapa?

J : Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW sangat diharapkan, karena penyusunan RTRW membutuhkan peran aktif semua sektor mengingat RTRW merupakan kepentingan wilayah dengan permasalahan multidimensi.

Peran aktif yang diharapkan masih terasa kurang hal ini disebabkan berbagai alasan seperti kurangnya minat dan keingintahuan masyarakat tentang RTRW, kurang memahami peraturan dan undang-undang tentang penyusunan RTRW.

4. Cukup memudahikah informasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam penyusunan RTRW Kab. Mandailing Natal? Apakah pengumuman telah dilakukan lewat media cetak dan elektronik?

J : Pengumuman dalam rangka penyusunan RTRW telah disampaikan pada "konsultasi publik" yang pada saat itu dihadiri oleh berbagai rekan-rekan pers. Saran, pendapat dan usulan perbaikan dalam rangka penyusunan RTRW kabupaten Mandailing Natal dapat disampaikan melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

5. Apakah stakeholder lain selain perwakilan masyarakat telah dilibatkan dalam penyusunan RTRW kab. Mandailing Natal?

J : Peran stakeholder sangat dibutuhkan dalam penyusunan RTRW, hampir semua stakeholder di Kabupaten Mandailing Natal dilibatkan dalam penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, stakeholder ini dalam menyampaikan usulan dan pendapatnya disampaikan dalam rapat-rapat yang dilaksanakan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka penyusunan RTRW.

6. Menurut Bapak, apakah peran dinas instansi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kab. Mandailing Natal telah sesuai harapan? Mengapa?

J : Harapan penyempurnaan penyusunan RTRW diperlukan peran semua pihak, termasuk peran dinas instansi. Hal ini diwujudkan dalam rapat-rapat yang dilaksanakan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Mandailing Natal.

7. Hambatan-hambatan apa yang menjadi kendala partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal?

J : Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan pelibatan masyarakat lebih intens dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

8. Saran-saran apa untuk perbaikan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal pada masa datang?

- J : 1. Diharapkan masyarakat berperan aktif dalam rangka penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal;  
2. Diperlukan sosialisasi terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal;



## WAWANCARA DENGAN DINAS PU

1. Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten Mandailing Natal, pemerintah daerah menerapkan beberapa kebijakan antara lain :
  - a. Pengembangan sektor dan komoditi unggulan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan daya dukung lahan.
  - b. Pengembangan sektor perhubungan, industri pengolahan lahan pertanian/perkebunan dan perikanan serta pariwisata dibagian barat wilayah kabupaten.
  - c. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana/infrastruktur yang mendukung kegiatan dunia usaha dan masyarakat.
  - d. Keberlanjutan kawasan lindung yang mampu mengakomodasi kepentingan kesejahteraan masyarakat.
2. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal ikut berperan dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini dikarenakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal bertanggung jawab masalah teknis dalam kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan yang erat kaitannya dengan Rencana Umum Tata Ruang.
3. Pada hakekatnya masyarakat hendaknya dilibatkan dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang karena akan berdampak langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat. Namun dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Mandailing Natal, masyarakat belum cukup dilibatkan/berpartisipasi.
4. Beberapa masyarakat telah berpartisipasi membantu/ikut serta dalam menyesuaikan posisi bangunan yang dibangun dengan ketentuan umum perizinan. Hal ini dikarenakan mulai adanya kesadaran masyarakat.
5. Dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang, pemerintah dalam hal ini masih belum cukup memadai dalam memberikan informasi.
6. Kesadaran dan keinginan masyarakat merupakan hambatan yang paling utama dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Mandailing Natal.
7. Dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Mandailing Natal, pemerintah dalam hal ini hendaknya melakukan pendekatan kepada masyarakat dan memberikan informasi yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Mandailing Natal.



## WAWANCARA DENGAN PERGURUAN TINGGI STAIM

1. Menurut Bapak, bagaimanakah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimanakah peranan instansi Bapak dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten Mandailing Natal?
3. Menurut pendapat Bapak, apakah masyarakat telah cukup dilibatkan/berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten Mandailing Natal ?
4. Apakah bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang ada selama ini telah cukup memadai? Mengapa?
5. Cukup memadaiakah informasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten Mandailing Natal?
6. Hambatan-hambatan apa yang menjadi kendala partisipasi selama ini?
7. Saran-saran apa untuk perbaikan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten Mandailing Natal pada masa mendatang?

### JAWABAN

1. Kebijakan Pemda dalam penyusunan RTR Madina sudah baik dan bagus
2. Tidak ada
3. Sudah
4. Belum, masih perlu dioptimalkan kedepan nanti
5. Cukup
6. Kekurang pedulian masyarakat dan kurang sosialisasi Pemda
7. - Masyarakat harus lebih diberdayakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan  
- Sosialisasi harus lebih di instensifkan dan dimaksimalkan

## WAWANCARA DENGAN CAMAT PANYABUNGAN

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten Mandailing Natal sangat penting sekali karena tanpa adanya Rencana Tata Ruang Kabupaten Mandailing Natal arah dan tujuan Tataruang Perencanaan Kabupaten tidak akan jelas demikian juga Tataruang Kecamatan, akan terjadi Perencanaan yang tidak jelas dan semraut apabila tidak ada RTR Kab. Madina yang disahkan oleh peraturan Perundang – undangan.

Peran Kecamatan dalam penyusunan RTR Kabupaten sangat minim sekali karena minimnya alokasi dana/anggaran untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam menunjang program tataruang di Kecamatan.

Dalam perencanaan RTR Kab. Mandailing Natal peran Masyarakat yang dilibatkan/berpartisipasi masih minim sekali / masih jauh dari yang diharapkan.

Bentuk – bentuk partisipasi Masyarakat selama ini dalam penyusunan RTR Kab, belum memadai, karena Masyarakat belum mengetahui secara mendalam tentang RTR Kab. Ini.

Informasi yang berikan Pemerintah kepada masyarakat dalam penyusunan RTR Kabupaten Mandailing Natal masih sangat kurang.

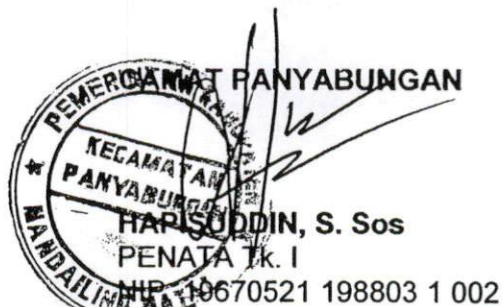
Hambatan – hambatan yang menjadi kendala partisipasi adalah ;

- Masyarakat masih kurang memahami pentingnya RTR Kabupaten ini
- Kurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah karena ketidak jelasan pemerintah dalam menegakkan peraturan – peraturan.

Saran – saran untuk perbaikan partisipasi Masyarakat dalam penyusunan RTR Kabupaten adalah

- Mengadakan sosialisasi tingkat Kecamatan yang dihadiri oleh, Pemerintah Desa, Tokoh – Tokoh Masyarakat, dll. Untuk penjelasan RTR Kabupaten/ Kecamatan.
- Mengikut sertakan tokoh – tokoh Masyarakat dalam penyusunan RTR Kabupaten disertai dukungan dana.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

  
PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
KECAMATAN PANYABUNGAN  
HAPISUDDIN, S. Sos  
PENATA Tk. I  
NIP. 19670521 198803 1 002





REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7247564 Fax. 7260856

Nomor : HK.01 03-Dr/1004

Jakarta, 30 Desember 2011

Lampiran : 1. Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Utara;  
2. Tabel Pencantuman Materi Muatan Teknis Raperda Kabupaten Mandailing Natal;  
3. Berita Acara BKPRN; dan  
4. Dokumen Pendukung.

Kepada Yth.  
Bupati Mandailing Natal  
di-

Panyabungan

Perihal : Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Mandailing Natal tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2031

Menunjuk Surat Bupati Mandailing Natal Nomor 050/663/BPMN/2011 tanggal 18 Oktober 2011 perihal Permohonan Pembahasan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Perda Kabupaten Mandailing Natal tentang RTRW Kabupaten Mandailing Natal telah mendapatkan rekomendasi Gubernur Sumatera Utara, sesuai dengan surat rekomendasi Nomor 050/8774/2011 tanggal 6 September 2011 sebagaimana terlampir dalam lampiran I.
2. Sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta penjelasannya, bahwasanya Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri, telah dilakukan penelaahan kesesuaian materi muatan teknis Rancangan Perda Kabupaten Mandailing Natal tentang RTRW Kabupaten Mandailing Natal dengan muatan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta rencana rincinya, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi beserta rencana rincinya, kebijakan nasional bidang penataan ruang, Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang, dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang lainnya, yang dituangkan dalam lampiran II.
3. Rancangan Perda Kabupaten Mandailing Natal tentang RTRW Kabupaten Mandailing Natal telah dibahas dalam forum koordinasi kelompok kerja teknis Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional beserta pemerintah daerah terkait dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tertuang dalam lampiran III.
4. Mengingat Kabupaten Mandailing Natal memiliki ruang terbuka hijau (RTH) seluas 0.03% dari luas kawasan perkotaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal agar mengupayakan perwujudan RTH seluas 30% dari luas wilayah perkotaan pada akhir tahun rencana sebagaimana tercantum dalam Raperda Kabupaten Mandailing Natal tentang RTRW Kabupaten Mandailing Natal.
5. Mengingat masih terdapat masalah batas wilayah administrasi, maka batas wilayah administrasi Kabupaten Mandailing Natal harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan persetujuan substansi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal tentang RTRW Kabupaten Mandailing Natal ini bukan sebagai dasar dalam penetapan batas wilayah administrasi tersebut.
6. Khusus terkait materi kehutanan, penetapan Rancangan Perda Kabupaten Mandailing Natal tentang RTRW Kabupaten Mandailing Natal harus memperhatikan saran, koreksi, dan perbaikan penetapan sebagaimana tertuang dalam dokumen pendukung terlampir.
7. Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, pada prinsipnya substansi Rancangan Perda dimaksud disetujui untuk segera diproses lebih lanjut, dengan tetap memperhatikan saran, koreksi, dan perbaikan sebagaimana tertuang dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, dan dokumen pendukung.
8. Sebagai pedoman matra spasial pengembangan wilayah, setelah diperolehnya persetujuan substansi ini diminta kepada pemerintah daerah untuk dapat segera menetapkannya sebagai peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian dan atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan);
3. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Gubernur Sumatera Utara;
6. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Mandailing Natal.





# BUPATI MANDAILING NATAL

Panyabungan, 28 Juli 2011

Nomor : 050/ 1149 /BPMN/2011  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (Dua) Lembar  
Hal : Undangan

Kepada :  
Yth. Sdr. ....  
(Daftar Terlampir)  
di - Tempat

Dalam rangka percepatan penyusunan revisi RTRW Kabupaten Mandailing Natal 2011-2031 dan percepatan penetapan Rancangan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Mandailing Natal 2011-2031, maka dengan ini saudara diundang untuk mengikuti rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 3 Agustus 2011

Waktu : Jadwal terlampir

Tempat : Aula Kantor Bupati Mandailing Natal

Acara : Konsultasi Publik Ranperda RTRW Kab. Mandailing Natal

Mengingat acara ini merupakan rangkaian tahapan dalam penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal 2011-2031, maka kehadiran saudara sangat diharapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



H. M. Hidayat Batubara, SE

Lampiran I :

Surat Bupati Mandailing Natal

Nomor : 050/1149/BPMN/2011

Tanggal : 28 Juli 2011

Perihal : Undangan

1. Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal;
2. Unsur pimpinan komisi DPRD Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Utara;
5. Tim Pendamping Daerah (TPD) Ditjen Penataan Ruang;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
7. Asisten Tata Praja Kabupaten Mandailing Natal;
8. Asisten Ekonomi dan Kesra Kabupaten Mandailing Natal;
9. Asisten Administrasi Kabupaten Mandailing Natal;
10. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Kabupaten Mandailing Natal;
11. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Keuangan Kabupaten Mandailing Natal;
12. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Mandailing Natal;
13. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Mandailing Natal;
14. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
15. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
17. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal;
18. Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal;
19. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mandailing Natal;
20. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal;
21. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal;
22. Kepala Dinas Perindag, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal;
23. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal;
24. Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Trans. Kab. Mandailing Natal;
25. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal;
26. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal;
27. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal;
28. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal;
29. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Mandailing Natal;
30. Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Mandailing Natal;
31. Kepala Bagian Layanan Pengadaan barang dan Jasa Kabupaten Mandailing Natal;
32. Para Camat se Kabupaten Mandailing Natal;
33. Kepala BPN Kabupaten Mandailing Natal;
34. Kepala Balai Taman Nasional Batang Gadis;
35. Kepala PLN Kabupaten Mandailing Natal;
36. Kepala PDAM Kabupaten Mandailing Natal;
37. Kepala Telkom Kabupaten Mandailing Natal;
38. Direktur Sorik Marapi Geothermal Power Kabupaten Mandailing Natal;
39. Direktur PTPN IV;
40. Kepala Balai PSDA Bt. Gadis Kabupaten Mandailing Natal;
41. Ketua KTNA Kabupaten Mandailing Natal;
42. Ketua LSM ICW Kabupaten Mandailing Natal;
43. Ketua LSM LIRA Kabupaten Mandailing Natal;
44. Ketua KNPI Kabupaten Mandailing Natal;
45. Ketua Dewan Pers Kabupaten Mandailing Natal;
46. Tokoh Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
47. Tokoh Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal.



# **DAFTAR HADIR**

Hari/Tanggal  
Tempat  
Acara

: RABU / 03 Agustus 2011  
: Aula Kantor Bupati Mandailing Natal  
: Konsultasi Publik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1
2	H. A. Samsuri Lubis	Asisten Administrasi	2
3	MHD. SYAFI' LUBIS	ASISTEN EKONOMI & KEKRA	3
4	Imran NGA	KRA BRAPPENA	4
5	Harlan B	Kadishub	5
6	Fariat	Staf Ahli	6
7	Syahrudin Bahubane	Camat P. Pangan	7
8	Awaluddin Rubis	Camat Kotanopan	8
9	H. SAFRIL . SH	Camat P. Barat	9
10	PARTAHIAN POMAN	CAMAT MBG	10
11	HAPISLODIN.	CAMAT PUNCAK SORIK MARAPI	11
12	ERY SALLAN	Camat Nagay	12
13	Drs. A. SULAIMAN, Mx.	KETUA BLU-STAM	13
14	Muhlisin	Camat Sidur	14
15	Alwi Nur Cubis	Camat Tarung	15
16	JUFRI ASTON	Kabag LPBJ	16
17	Awaluddin, S. Sos	Camat Pang. Timur	17
18	STANSU RIZAL NASUTION	MANAJER GENERAL AFFAIR PT SURIK MARAPI GEOTHERMAL POWER	18
19	Syafaruddin	Camat P. Ulu Pangkut	19
20	YOSLAN EVENDI	Kabag Teknik PDAM Tirta Madina	20
21	SIBIT	KMR - TARUNG PU	21
22	BUDI SARASWATI	KMR - TPD SUMUT	22
23	AMMAD MEINUL LUBIS	KA. PPT / KPPT	23
24	LILIANA A. LUBIS	Camat Pangabungan Selatan	24



25 TLIHAR NEL  
 26 KHAIRU ANWAR AP  
 27 MONANG NASUTION  
 28 MAGRIN LUBIS  
 29 Ym Syahrial NST  
 30 Azhar Lubis  
 31 AHMAD ARIAN, S.K  
 32 KEMUKYAH. NST  
 33 Swardi Usman NST  
 34 Zulhanus  
 35 SYAMSU S-SOS  
 36 ARIF ADNAN  
 37 MURNADY PARTAPU.  
 38 RAHMADSYAH LUBIS  
 39 SAMUEL S  
 40 HENDRA EDHA PURA.  
 41 Ahmad Yuni  
 42 Aspon S.Sos  
 43 MARSIONG GINTING  
 44 M. Affon  
 45 H. M. ASWAN HAB  
 46 H. Kholikulyakin NST.  
 47 Sutan Sapasa NST  
 48 Syamsul B. Ling  
 49 Drs. Rd. M.  
 50 Purnawan Lubis  
 51 LONNA DAMERIA  
 52 A. ANSARI dki.

Kabon / BSN Elodis  
 Camat Lembeh Sorih Murg  
 KINA. KAB. MADINA  
 PU RASDI PU.  
 Staf Ahli Bid Kem & STA  
 Camat Bt Natal  
 Komendian Agama  
 Kantor Buluh Murni  
 Camat Bkt Melintang  
 Ekst. Distamben  
 Camat Simunjan  
 CAMAT TAMBAKAN  
 CAMAT HUTABAROOT.  
 KASID BLHKP  
 OK-UKUM & JRE  
 KASAT POL PP  
 Camat P. Utara  
 Camat P. Utara  
 DISTARUKINSU  
 Diras pertamban / Kabid gadop  
 KADISDOKCAPIL  
 B.P.A  
 B.P.A.  
 Distamben SES  
 Camat Ranto Bae  
 Kaban B.LKP  
 Kabag Perencanaan  
 LAMS PRINDA, KOP.

25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52



NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1	2	3	
53	SARWEDI	CAMAT / NATAL	53
54	H. MHD. YUNUS	Chunsi Muzen Sijang	54
55	Budiman NPA	leabag tapem	55
56	A. IMRON LUBIS	KAB. PENOD.	56
57	Hidayat Lub.	Staf KPA Muti	57
58	Taufik Z. Ptozer	KAB. PETA.	58
59	Mulyadi NPA	KETUA KNPI	59
60	M. Sahman P.	As. I	60
61	DARTO SIREGAR	SEKRETARIS DPD KNPI MADINA	61
62			62
63			63
64			64
65			65
66			66
67			67
68			68
69			69
70			70
71			71
72			72
73			73
74			74
75			75
76			76
77			77
78			78
79			79
80			80



**BERITA ACARA KONSULTASI PUBLIK**  
**MATERI TEKNIS & RANPERDA RTRW KABUPATEN MANDAILING NATAL 2011-2031**

Pada hari ini Rabu tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu sebelas, telah diadakan Konsultasi Publik Pembahasan Materi Teknis & Ranperda RTRW Kabupaten Mandailing Natal, dengan ini menyatakan bahwa Rancangan Perda dimaksud secara substantif telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta rencana rincinya, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi beserta rencana rincinya, kebijakan nasional bidang penataan ruang, Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang, dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang lainnya. Beberapa catatan yang menjadi pokok pembahasan dalam Konsultasi Publik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fungsi PKL Natal supaya ditambahkan dengan kawasan bersejarah serta sebagai pusat budaya pantai barat. Di Natal terdapat benteng Portugis, sumur Multatuli sebagai peninggalan sejarah;
2. Fungsi PPL Panyabungan Selatan supaya ditambahkan dengan pariwisata dan *home industry* (bika). Panyabungan Selatan memiliki potensi wisata air terjun dan wisata air panas meskipun belum dikembangkan dan belum didukung prasarana jalan yang masih buruk;
3. Pengembangan agromarine di Natal harus memperhatikan kawasan rawan tsunami;
4. Wilayah kerja pertambangan panas bumi 42.900 ha selama 25 tahun di Sorik Marapi, namun belum diketahui titik-titik bangunan instalasi.
5. Peruntukan perkebunan, pertanian lahan basah, dan permukiman harus memperhatikan keberadaan hutan lindung. Lahan pertanian tanaman pangan harus dijaga agar tidak beralih fungsi ke penggunaan lainnya untuk menjaga ketahanan pangan.
6. Perumahan adat di Ulu Pungkut, kebudayaan khusus Ulu Muara Sipongi, agar tidak terganggu seiring dengan kemajuan pembangunan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 3 Agustus 2011

Pimpinan Rapat,  
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN MANDAILING NATAL



Drs. H. IMRAN NASUTION, MM  
Pembina Tk. I

NIP. 19550612 198503 1 004



## BUPATI MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN BUPATI MANDAILING NATAL  
NOMOR : 050/ 410 /K/2011

TENTANG

BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

BUPATI MANDAILING NATAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang di daerah perlu dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah, diperlukan kebijakan dan langkah-langkah yang terpadu dalam penataan ruang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b surat keputusan ini, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Mandailing Natal tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2437);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Mandailing Natal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab. Mandailing Natal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SUSUNAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- KESATU** : Membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Mandailing Natal dengan susunan dan tugas serta tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Badan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Badan bersifat Ad-Hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi Penataan Ruang di Kabupaten Mandailing Natal.
- KETIGA** : Badan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri dari Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang serta Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 625/025/K/2006 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Mandailing Natal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan  
pada tanggal 25 Juli 2011

BUPATI MANDAILING NATAL,



Salinan Keputusan ini masing-masing disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**SUSUNAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**A. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Mandailing Natal**

Penanggung Jawab: - Bupati Mandailing Natal  
- Wakil Bupati Mandailing Natal

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal  
Sekretaris : Kepala Bappeda Kabupaten Mandailing Natal  
Anggota : 1. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan  
Kabupaten Mandailing Natal  
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten  
Mandailing Natal  
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal ✓  
4. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mandailing  
Natal ✓  
5. Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing  
Natal ✓  
6. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mandailing Natal ✓  
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal ✓  
8. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal ✓  
9. Kepala Dinas Perindag, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten  
Mandailing Natal  
10. Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi Kabupaten Mandailing Natal  
11. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Mandailing Natal

**B. Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Mandailing Natal**

Ketua : Sekretaris Bappeda Kabupaten Mandailing Natal  
Anggota : 1. Kasubbag Program Bappeda Kabupaten Mandailing Natal  
2. Kasubbag Keuangan Bappeda Kabupaten Mandailing Natal  
3. Kasubbid Industri dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten  
Mandailing Natal

**C. Kelompok Kerja**

**1. Perencanaan Tata Ruang :**

Ketua : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Mandailing  
Natal  
Wakil Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Mandailing Natal  
Sekretaris : Kepala Sub Bidang Penataan Ruang, Keciaptakaryaan dan Pengairan  
Bappeda Kabupaten Mandailing Natal  
Anggota : a. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Mandailing Natal  
b. Kepala Bidang Bina Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan  
Kabupaten Mandailing Natal  
c. Kepala Bidang Bina Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan  
Kabupaten Mandailing Natal  
d. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan dan  
Informatika Kabupaten Mandailing Natal  
e. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan dan  
Informatika Kabupaten Mandailing Natal  
f. Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara Dinas Perhubungan  
dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal  
g. Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dinas  
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal  
h. Kepala Bidang Pengembangan Lahan dan Peralatan Pertanian Dinas  
Pertanian Kabupaten Mandailing Natal



- i. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindag, Koperasi, UKM dan Pasar Kab. Mandailing Natal
- j. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemutakhiran Data Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mandailing Natal

## 2. Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang :

- Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setdakab. Mandailing Natal
- Sekretaris : Kepala Seksi Penataan Ruang dan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal
- Anggota :
- a. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik dan Pengendalian Pembangunan Bappeda Kabupaten Mandailing Natal
  - b. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Mandailing Natal
  - c. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Mandailing Natal
  - d. Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal
  - e. Kepala Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mandailing Natal
  - f. Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Kebinamargaan Bappeda Kabupaten Mandailing Natal
  - g. Kepala Seksi Perijinan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal
  - h. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Organisasi Setdakab. Mandailing Natal
  - i. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Agraria pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Mandailing Natal
  - j. Kepala Sub Bagian Pemerintahan desa pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Mandailing Natal



**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA  
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH  
KABUPATEN MANDAILING NATA**

**A. BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)**

BKPRD Kabupaten Mandailing Natal dalam melaksanakan tugas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Kabupaten Mandailing Natal dan rekomendasi secara berkala kepada Bupati Mandailing Natal, dengan tugas sebagai berikut :

**1. Perencanaan tata ruang meliputi :**

- a. Mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang Kabupaten Mandailing Natal;
- b. Memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang Kabupaten Mandailing Natal serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- c. Mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang Kabupaten Mandailing Natal dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- d. Mensinergikan penyusunan rencana tata ruang Kabupaten Mandailing Natal dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang Kabupaten Mandailing Natal kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang Kab. Mandailing Natal ke provinsi;
- g. Mengoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang Kabupaten Mandailing Natal;
- h. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

**2. Pemanfaatan ruang meliputi :**

- a. Mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang baik di Kabupaten Mandailing Natal, dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
- b. Memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang Kabupaten Mandailing Natal;
- c. Memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang Kabupaten Mandailing Natal;
- d. Menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
- e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota;
- f. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

**3. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :**

- a. Mengoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem Kabupaten Mandailing Natal;
- b. Memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang Kabupaten Mandailing Natal;
- c. Melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Kabupaten Mandailing Natal dengan provinsi dan dengan kabupaten/kota terkait;
- d. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
- e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
- f. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

**B. SEKRETARIAT**

Sekretariat BKPRD Kabupaten Mandailing Natal dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris BKPRD Kabupaten Mandailing Natal, dengan tugas sebagai berikut :



1. Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Kabupaten Mandailing Natal;
2. Menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD Kabupaten Mandailing Natal;
3. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD Kabupaten Mandailing Natal;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD Kabupaten Mandailing Natal;
5. Mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD Kabupaten Mandailing Natal;
6. Menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang Kabupaten Mandailing Natal;
7. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kab. Mandailing Natal;
8. Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.

### C. KELOMPOK KERJA

#### 1. Perencanaan Tata Ruang :

Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang BKPRD Kabupaten Mandailing Natal dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD Kabupaten Mandailing Natal, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang Kabupaten Mandailing Natal;
- b. Melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- c. Melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
- d. Melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
- e. Menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang Kabupaten Mandailing Natal;
- f. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten Mandailing Natal.

#### 2. Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang :

Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang BKPRD Kabupaten Mandailing Natal dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD Kabupaten Mandailing Natal, dengan tugas sebagai berikut :

- a. memberikan masukan kepada Ketua BKPRD Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Mandailing Natal;
- b. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
- c. Melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
- d. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
- e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
- f. Melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang;
- g. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten Mandailing Natal.





BERITA ACARA  
KESEPAKATAN PENATAAN RUANG  
NO. 050/1837 /BPMN/2011

---

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
PROPINSI SUMATERA UTARA  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS  
PROPINSI SUMATERA UTARA

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Oktober tahun Dua Ribu Sebelas telah diadakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal yang dihadiri oleh Bupati Mandailing Natal (diwakili oleh Kepala Bappeda Kabupaten Mandailing Natal), BKPRD Kabupaten Mandailing Natal, Kepala Bappeda Kabupaten tetangga yang berbatasan yaitu; Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

1. Pola Ruang yang diperuntukkan untuk Kawasan Lindung pada wilayah berbatasan adalah hutan lindung antara Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara akan disinergikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masing-masing Kabupaten.
2. Pola Ruang yang diperuntukkan untuk Kawasan Perkebunan, Peruntukan Kawasan Pertanian, Daerah Aliran Sungai (DAS), Infrastruktur, Kawasan Strategis Perbatasan, Permukiman, Aksebilitas akan diwujudkan dalam Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara.
3. Hal lain yang berkaitan dengan Point 2 (Dua) yang melibatkan kedua daerah akan ditindaklanjuti lebih lanjut dengan kerjasama antar daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan kelengkapan proses penyusunan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2031 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, tanggal tersebut diatas

KEPALA BAPPEDA

SEKRETARIS BKPRD  
KAB. PADANG LAWAS

Drs. HARAPAN NAULISYAH

NIP. 19601129 199008 1 001

KEPALA BAPPEDA

SEKRETARIS BKPRD  
KAB. MANDAILING NATAL

Drs/H. IMRAN NASUTION, MM

NIP. 19550612 198503 1 004



BERITA ACARA  
KESEPAKATAN PENATAAN RUANG  
NO. 050/1836/BPMN/2011

---

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
PROPINSI SUMATERA UTARA  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Oktober tahun Dua Ribu Sebelas telah diadakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal yang dihadiri oleh Bupati Mandailing Natal (diwakili oleh Kepala Bappeda Kabupaten Mandailing Natal), BKPRD Kabupaten Mandailing-Natal, Kepala Bappeda Kabupaten tetangga yang berbatasan yaitu; Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

1. Pola Ruang yang diperuntukkan untuk Kawasan Lindung pada wilayah berbatasan adalah hutan lindung antara Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat akan disinergikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masing-masing Propinsi.
2. Pola Ruang yang diperuntukkan untuk Kawasan Perkebunan, Peruntukan Kawasan Pertanian, Daerah Aliran Sungai (DAS), Infrastruktur, Kawasan Strategis Perbatasan, Permukiman, Akseibilitas akan diwujudkan dalam Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat.
3. Hal lain yang berkaitan dengan Point 2 (Dua) yang melibatkan kedua daerah akan ditinjaulanjuti lebih lanjut dengan kerjasama antar daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan kelengkapan proses penyusunan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2031 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, tanggal tersebut diatas

KEPALA BAPPEDA  
SELAKU WAKIL KETUA BKPRD  
KAB. PASAMAN  
  
**M. SALEH, SH, MM**  
NIP. 19590126 198603 1 002

KEPALA BAPPEDA  
SELAKU SEKRETARIS BKPRD  
KAB. MANDAILING NATAL  
  
**Drs. H. IMRAN NASUTION, MM**  
NIP. 19550612 198503 1 004

BERITA ACARA  
KESEPAKATAN PENATAAN RUANG  
NO. 050/1835/BPMN/2011

---

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
PROPINSI SUMATERA UTARA  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
PROPINSI SUMATERA BARAT

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Oktober tahun Dua Ribu Sebelas telah diadakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal yang dihadiri oleh Bupati Mandailing Natal (diwakili oleh Kepala Bappeda Kabupaten Mandailing Natal), BKPRD Kabupaten Mandailing Natal, Kepala Bappeda Kabupaten tetangga yang berbatasan yaitu; Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

1. Pola Ruang yang diperuntukkan untuk Kawasan Lindung pada wilayah berbatasan adalah hutan lindung antara Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat akan disinergikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masing-masing Propinsi.
2. Pola Ruang yang diperuntukkan untuk Kawasan Perkebunan, Peruntukan Kawasan Pertanian, Daerah Aliran Sungai (DAS), Infrastruktur, Kawasan Strategis Perbatasan, Permukiman, Aksebilitas akan diwujudkan dalam Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat.
3. Hal lain yang berkaitan dengan Point 2 (Dua) yang melibatkan kedua daerah akan ditinjaulanjuti lebih lanjut dengan kerjasama antar daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan kelengkapan proses penyusunan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2031 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, tanggal tersebut diatas





**PEMBAHASAN PEMADUSERASIAN  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2011-2031**

---

**NOTA KESEPAKATAN**

Pada hari ini, Kamis Tanggal Delapan Bulan September Tahun Dua Ribu Sebelas telah dilaksanakan sinkronisasi/pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mandailing Natal, bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Selatan dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapanuli Selatan telah mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kebijakan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam Draft Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010;
2. Bahwa berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal, dinyatakan bahwa Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal merupakan dua wilayah berbatasan;
3. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berpendapat bahwa kedua daerah ini mempunyai peranan yang sangat strategis terutama dalam keterpaduan struktur ruang dan pola ruang;
4. Dalam hal keterpaduan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sependapat untuk melaksanakan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan dan sinkronisasi Jaringan jalan, baik jalan Propinsi maupun Jalan Kabupaten yang berbatasan sehingga aksesibilitas di kedua daerah berbatasan lebih baik dan hal-hal lainnya yang saling mendukung;
5. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyatakan sepakat untuk meningkatkan kerjasama pembangunan dalam mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang sesuai dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat;

Demikianlah nota kesepakatan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bappeda Kabupaten Mandailing Natal,



Drs. H. Imran Nasution, MM  
Pembina TK. I  
Np. 19550612 198503 1 004

Padangsidempuan, 8 September 2011

Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan,



Paulian Sabbih  
Pembina Utama Muda  
Np. 19590315 198602 1 001



## FOTO DOKUMENTASI

